



**PEMERINTAH DAERAH
KABUPATEN JOMBANG**
Jl. KH Wahid Hasyim NO. 137 Jombang

LAPORAN
INFORMASI KINERJA PENGELOLAAN
LINGKUNGAN HIDUP DAERAH
KABUPATEN JOMBANG
TAHUN 2016





LEMBAR PERNYATAAN

Mengingat karakteristik khusus wilayah Kabupaten Jombang yang harus diungkap dan dijadikan pertimbangan, maka bersama ini saya sebagai Bupati Jombang menyatakan bahwa isu prioritas daerah dirumuskan dengan melibatkan para pemangku kepentingan di wilayah Kabupaten Jombang dan hasil perumusan isu prioritas daerah dapat saya pertanggungjawabkan.

Jombang, 28 April 2017

BUPATI JOMBANG,

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'Nyono', written over a circular purple official stamp of the Bupati Jombang. The stamp contains the Garuda Pancasila emblem and the text 'BUPATI JOMBANG' around the perimeter.

NYONO SUHARLI WIHANDOKO



KATA PENGANTAR



Puji syukur ke hadirat Tuhan Yang Maha Kuasa, atas segala limpahan berkah dan rahmat-Nya yang telah diberikan kepada Pemerintah Kabupaten Jombang, sehingga penyusunan buku Informasi Kinerja Pengelolaan Lingkungan Hidup Daerah (IKPLHD) Kabupaten Jombang 2016 dapat diselesaikan.

Laporan IKPLHD Kabupaten Jombang Tahun 2016 ini disusun sesuai dengan Pedoman Penyusunan yang diterbitkan oleh Kementerian Lingkungan Hidup Republik Indonesia. Laporan IKPLHD ini merupakan gambaran berbagai informasi yang berkaitan dengan pengelolaan lingkungan hidup di Kabupaten Jombang selama tahun 2016. Laporan ini berisikan pendahuluan, isu lingkungan hidup strategis, dan analisis *Pressure, State, Response* terhadap isu lingkungan hidup daerah, inovasi daerah dalam pengelolaan lingkungan hidup, dan penutup,

Laporan IKPLHD Kabupaten Jombang Tahun 2016 disusun dengan menggunakan pendekatan P-S-R (*Pressure, State, Response*), yaitu, konsep hubungan sebab akibat dimana kegiatan manusia memberikan tekanan kepada lingkungan (*pressure*) yang menyebabkan perubahan sumber daya alam dan lingkungan secara kualitas dan kuantitas (*state*) yang kemudian direspon oleh Pemerintah ataupun masyarakat dalam bentuk kebijakan maupun program untuk menangani dampak lingkungan yang terjadi.

Dengan tersusunnya Laporan IKPLHD Kabupaten Jombang tahun 2016, diharapkan dapat menjadi acuan penyusunan rencana pembangunan dan pengambilan keputusan dalam rangka mewujudkan visi Kabupaten Jombang serta bermanfaat untuk semua pihak sehingga dapat meningkatkan mutu informasi tentang lingkungan Hidup.

Terima kasih kami ucapkan kepada semua pihak yang terkait atas dukungan dan kerjasama yang diberikan dalam pembuatan laporan ini.

Jombang, 28 April 2017

BUPATI JOMBANG,

NYONO SUHARLI WIHANDOKO



DAFTAR ISI

Kata Pengantar	iii
Daftar Isi	iv
Daftar Tabel	vi
Daftar Gambar	viii
Daftar Lampiran	x
Bab I Pendahuluan	
1.1. Latar Belakang	i-1
1.2. Profil Kabupaten Jombang dan Kondisi Ekologisnya	i-3
1.3. Kondisi Ekologis	i-5
1.4. Proses Penyusunan Dokumen Informasi Kinerja Pengelolaan Lingkungan Hidup Daerah	i-20
1.5. Maksud dan Tujuan	i-21
1.6. Ruang Lingkup	i-22
BAB II Isu Prioritas Lingkungan Hidup Daerah	
2.1. Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	ii-2
2.1.1. Indeks Pencemaran Air	ii-3
2.1.2. Indeks Pencemaran Udara	ii-8
2.1.3. Indeks Tutupan Lahan	ii-10
2.2. Isu Prioritas	ii-12
2.2.1. Pertambangan	ii-12
2.2.2. Penanganan Sampah	ii-16
2.2.3. Penanganan Limbah B3	ii-36
BAB III Analisis Pressure, State, dan Response Isu Lingkungan Hidup Daerah	
3.1. Tataguna Lahan	iii-10
3.1.1. Pemanfaatan Sumber Daya Alam	iii-10
3.2. Luas Kawasan Lindung Berdasarkan RTRW dan Tutupan Lahan	iii-15
3.3. Penggunaan Lahan Utama	iii-16
3.4. Lahan Kritis	iii-17
3.5. Kerusakan Lahan Kering	iii-18
3.6. Perubahan Penggunaan Lahan	iii-19
3.7. Pertambangan	iii-19
3.8. Penghijauan dan Reboisasi	iii-20
3.9. Kualitas Air	iii-21
3.10. Sungai	iii-22
3.11. Danau/Waduk/Situ/Embung	iii-33
3.12. Air Sumur	iii-37
3.13. Kualitas Udara	iii-39
3.13.1. Kualitas Udara Ambien	iii-39
3.13.2. Penggunaan Bahan Bakar	iii-40
3.13.3. Kendaraan Bermotor	iii-40



3.13.4. Kondisi Jalan	iii-41
3.14. Resiko Bencana	iii-42
3.14.1. Bencana Banjir	iii-43
3.14.2. Bencana Kekeringan	iii-45
3.14.3. Bencana Kebakaran Hutan	iii-46
3.14.4. Bencana Alam Tanah Longsor dan Gempa Bumi	iii-46
3.14.5. Bencana Angin Kencang dan Angin Puting Beliung	iii-47
3.14.6. Bencana Paling Parah Terjadi di Kabupaten Jombang	iii-49
3.15. Perkotaan	iii-51
3.15.1. Permukiman	iii-51
3.15.2. Jumlah Rumah Tangga Miskin	iii-54
3.15.3. Sumber Air Minum	iii-55
3.15.4. Sanitasi	iii-56
3.15.5. Pengelolaan Sampah	iii-57
BAB IV Inovasi Daerah dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup	
4.1. Rehabilitasi Lingkungan	iv-2
4.1.1. Penghijauan dan Reboisasi	iv-2
4.2. Kegiatan Fisik Lainnya oleh Instansi dan Masyarakat	iv-4
4.2.1. Pengawasan AMDAL	iv-4
4.2.2. Dokumen Lingkungan	iv-5
4.2.3. Pengawasan Izin Lingkungan (AMDAL, UKL-UPL, SPPL)	iv-6
4.2.4. Penegakan Hukum	iv-8
4.2.5. Pengaduan Masyarakat	iv-8
4.2.6. Peran Serta Masyarakat	iv-10
4.2.7. Jumlah Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Lingkungan Hidup	iv-12
4.2.8. Penghargaan	iv-14
4.2.9. Kegiatan Sosialisasi Lingkungan Hidup	iv-16
4.2.10. Kelembagaan	iv-17
4.2.11. Produk Hukum Bidang Pengelolaan Bidang Lingkungan Hidup	iv-17
4.2.12. Anggaran Pengelolaan Lingkungan Hidup	iv-18
4.2.13. Jumlah Personil Lembaga Pengelolaan Lingkungan Hidup menurut Tingkat Pendidikan	iv-20
BAB V Penutup	
5.1. Kesimpulan	v-1
5.2. Saran	v-3



DAFTAR TABEL

Tabel 1.1.	Pembagian Wilayah Administrasi Kabupaten Jombang	i-5
Tabel 1.2.	Lokasi dan Jenis Fasilitas Pengembangan Taman Keanekaragaman Hayati	i-11
Tabel 1.3.	Tim Teknis Penyusun Informasi Kinerja Pengelolaan Lingkungan Hidup Daerah Kabupaten Jombang	i-20
Tabel 2.1.	Status Mutu Air Sungai di Kabupaten Jombang	ii-6
Tabel 2.2.	Data Hasil Perhitungan Indeks Pencemaran Air	ii-8
Tabel 2.3.	Lokasi Titik Pantau Kualitas Udara dengan Passive Samper di Kabupaten Jombang	ii-9
Tabel 2.4.	Data Hasil Perhitungan Indeks Pencemaran Udara	ii-10
Tabel 2.5.	Hasil Perhitunagn Indeks Tutupan Lahan untuk IKLH Kabupaten Jombang	ii-10
Tabel 2.6.	Hasil Perhitunagn IKLH Kabupaten Jombang	ii-11
Tabel 2.7.	Perbandingan IKLH Kabupaten Jombang Tahun 2015 dan 2016	ii-11
Tabel 2.8.	Bank Sampah di Kabupaten Jombang	ii-26
Tabel 2.9.	Data Pengusaha LIK di Kecamatan Kesamben	ii-38
Tabel 2.10.	Data Pengusaha LIK di Kecamatan Sumobito	ii-39
Tabel 2.11.	Ringkasan Hasil Analisis Laboratorium Data Primer	ii-44
Tabel 2.12.	Ringkasan Hasil Analisis Laboratorium Data Sekunder	ii-46
Tabel 2.13	Daftar Kelengkapan Dokumen Perijinan Industri Daur Ulang Slag Aluminium	ii-49
Tabel 2.14.	Hasil Pengumpulan Data Primer dan Sekunder Terkait Dampak Lingkungan	ii-52
Tabel 2.15.	Data Perusahaan Daur Ulang Slag Aluminium Kecamatan Kesamben	ii-54
Tabel 2.16.	Hasil Penilaian Bahaya Dampak Lingkungan Potensial Industri Daur Ulang Slag Aluminium	ii-56
Tabel 2.17.	Hasil Penilaian Tingkat Risiko Lingkungan Industri Daur Ulang Slag Aluminium	ii-58
Tabel 2.18.	Pengelola Risiko	ii-64
Tabel 3.1.	Matriks Pressure-Status-Response	iii-3
Tabel 3.2.	Nama Sungai yang Ada di Kabupaten Jombang	iii-22
Tabel 3.3.	Hasil Uji Analisis Laboratorium untuk Parameter pH (Januari-Juni)	iii-28
Tabel 3.4.	Hasil Uji Analisis Laboratorium untuk Parameter pH (Juli-Desember)	iii-29
Tabel 3.5.	Inventarisasi Danau/Waduk/Embung di Kabupaten Jombang	iii-34
Tabel 3.6.	Inventarisasi Mata Air di Kabupaten Jombang	iii-34
Tabel 3.7.	Hasil Analisis Laboratorium Kualitas Mata Air	iii-36
Tabel 3.8.	Daerah Rawan Bencana di Kabupaten Jombang	iii-42
Tabel 3.9.	Data Jumlah Kejadian Banjir di Kabupaten Jombang dari Tahun 2012 s/d 2016	iii-43
Tabel 3.10.	Data Jumlah Kejadian Longsor di Kabupaten Jombang dari Tahun 2012 s/d 2016	iii-46
Tabel 3.11.	Data Jumlah Kejadian Angin Puting Beliung di Kabupaten Jombang dari Tahun 2012 s/d 2016	iii-47
Tabel 3.12.	Data Pengolahan Sampah	iii-72



Tabel 4.1.	Hasil Pengawasan Izin Lingkungan (AMDAL, UKL/UPL, SPPL)	iv-7
Tabel 4.2.	Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Lingkungan Hidup	iv-12
Tabel 4.3.	Penghargaan Lingkungan Hidup	iv-14
Tabel 4.4.	Produk Hukum dalam Tata Ruang dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	iv-18
Tabel 4.5.	Anggaran untuk Pengelolaan Lingkungan Hidup	iv-19
Tabel 4.6.	Jumlah Personil Lembaga Pengelola Lingkungan Hidup menurut Tingkat Pendidikan di Kabupaten Jombang	iv-20
Tabel 4.7.	Jumlah Staf Fungsional Bidang Lingkungan dan Staf yang Telah Mengikuti Diklat	iv-21



DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1.	Peta Kabupaten Jombang	i-4
Gambar 1.2.	Lokasi Pembangunan dan Pengembangan Taman Kehati	i-8
Gambar 1.3.	Foto Tanaman di Taman Kehati Jombang	i-13
Gambar 1.4.	Kegiatan Penyiangan	i-14
Gambar 1.5.	Kegiatan Pemupukan	i-15
Gambar 1.6.	Kegiatan Perbaikan Taman Hias di Akses Jalan Masuk	i-16
Gambar 1.7.	Papan Interpretasi	i-17
Gambar 1.8.	Pelaksanaan Penandatanganan Kerjasama dan Seminar Kehati	i-18
Gambar 1.9.	Kondisi Taman Kehati Kabupaten Jombang Saat Ini	i-19
Gambar 2.1.	Foto Lokasi Tambang Galian	ii-13
Gambar 2.2.	Foto Lokasi Bekas Tambang yang Ditinggalkan Pengelolanya	ii-14
Gambar 2.3.	Siteplan TPA Kabupaten Jombang	ii-18
Gambar 2.4.	Kegiatan di TPA Kabupaten Jombang	ii-19
Gambar 2.5.	Siteplan Rencana Pengembangan TPA dengan Sistem Sanitary Landfill	ii-23
Gambar 2.6.	Upaya Pengendalian Dampak Lingkungan	ii-25
Gambar 2.7.	Aktivitas di Bank Sampah Kabupaten Jombang	ii-35
Gambar 2.8.	Persentase Kepemilikan Dokumen Perijinan Industri Daur Ulang Slag Aluminium (Obyek Studi) di Kecamatan Sumobito	ii-51
Gambar 2.9.	Persentase Kepemilikan Dokumen Perijinan Industri Daur Ulang Slag Aluminium (Obyek Studi) di Kecamatan Kesamben	ii-51
Gambar 3.1.	Pendekatan PSR dalam Pengkajian Informasi Kinerja Pengelolaan Lingkungan Hidup Daerah Kabupaten Jombang	iii-2
Gambar 3.2.	Sungai Rejoagung di Kabupaten Jombang	iii-23
Gambar 3.3.	Pengambilan Sampel untuk Analisis Laboratorium	iii-26
Gambar 3.4.	Salah Satu Embung di Kecamatan Kabuh	iii-33
Gambar 3.5.	Bencana Banjir di Kabupaten Jombang Tahun 2012 s/d 2016	iii-44
Gambar 3.6.	Bencana Longsor di Kabupaten Jombang Tahun 2012 s/d 2016	iii-47
Gambar 3.7.	Bencana Angin Kencang dan Putting Beliung di Kabupaten Jombang Tahun 2012 s/d 2016	iii-48
Gambar 3.8.	Bencana Kekeringan di Kabupaten Jombang Tahun 2012 s/d 2016	iii-49
Gambar 3.9.	Bencana Paling Parah di Kabupaten Jombang	iii-50
Gambar 3.10.	Keadaan Permukiman di Kabupaten Jombang	iii-54
Gambar 3.11.	Foto Kegiatan Jumat Bersih	iii-68
Gambar 3.12.	Foto Sarana Pengumpulan Sampah	iii-69
Gambar 3.13.	Produk Kerajinan 3R	iii-70
Gambar 3.14.	Kegiatan Pelatihan Daur Ulang Sampah Anorganik	iii-70
Gambar 3.15.	Kegiatan Bank Sampah	iii-71
Gambar 3.19.	Keranjang Takakura	iii-71
Gambar 3.20.	Lokasi TPA	iii-73
Gambar 3.21.	Lokasi Pengolahan Sampah di TPA	iii-74
Gambar 3.22.	Fasilitas TPA	iii-74
Gambar 3.23.	Pembuatan Kompos	iii-75
Gambar 3.24.	Sumur Pantau dan Drainase dengan Saluran Lindi	iii-75
Gambar 3.25.	Instalasi Pengolahan Lindi	iii-76



Gambar 3.26.	Pembuatan Biogas di TPA	iii-76
Gambar 3.27.	Pembuatan Biogas di Sekolah	iii-77
Gambar 3.28.	Pembuatan Biogas di Pemerintah Daerah	iii-78
Gambar 3.29.	Penggunaan Gas Methan TPA untuk Sumber Energi Genset	iii-78
Gambar 3.30.	Penggunaan Gas Metan TPA untuk Lampu Penerangan dan Kompor Gas	iii-79
Gambar 4.1.	Taman Partisipasi Masyarakat	iv-11
Gambar 4.2.	Kegiatan Car Free Day	iv-11



Bab

1

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Kualitas lingkungan hidup Indonesia merupakan salah satu isu yang sangat penting ditengah meningkatnya tekanan yang berpotensi mengubah kondisi lingkungan, baik sebagai dampak pertumbuhan ekonomi maupun peningkatan jumlah penduduk. Dalam perdebatan akan kualitas lingkungan hidup, satu hal yang sering sekali sulit untuk dijawab secara lugas berdasarkan data-data yang ada adalah apakah kualitas lingkungan hidup Indonesia berada dalam kategori baik, sedang atau buruk.

Selama ini data kualitas lingkungan hidup hanya diperoleh melalui proses laboratorium ataupun sarana berbasis teknologi lainnya, misalnya citra satelit. Hal ini sangat menyulitkan bagi masyarakat awam untuk memahami angka pengukuran karena diperlukan latar belakang berbasis keilmuan teknis. Selain daripada itu, indikator lingkungan hidup diukur secara parsial, yaitu berdasarkan media, seperti air, udara, dan lahan sehingga sulit untuk mendapatkan gambaran yang dapat mewakili kondisi lingkungan hidup secara utuh dan menyeluruh.

Sementara, pemahaman akan kualitas lingkungan hidup ini sangat penting untuk mendorong semua pemangku kepentingan (*stakeholder*) melakukan aksi nyata dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan berkepentingan untuk mempermudah masyarakat awam



dan para pengambil keputusan mulai dari pemerintah pusat hingga pemerintah daerah untuk memahami kualitas lingkungan hidup Indonesia.

Pemerintah daerah menjadi leading sector dalam rangka pengelolaan lingkungan hidup agar tercipta pembangunan yang berkelanjutan (*sustainable development*). Pembangunan berkelanjutan adalah suatu konsep pembangunan yang memadukan aspek ekonomi, sosial, budaya dan lingkungan hidup dalam upaya menyejahterakan masyarakat. Hal itu mengacu pada pertumbuhan dengan memperhatikan keterbatasan sumberdaya alam dan kemampuan institusi masyarakat dalam melaksanakan pembangunan, dimana kebutuhan dan aspirasi masyarakat yang merupakan dasar di dalam menyusun program-program pembangunan.

Hingga saat ini, sumber daya alam sangat berperan sebagai tulang punggung perekonomian nasional, dan masih akan diandalkan dalam jangka menengah. Namun di lain pihak, kebijakan ekonomi yang lebih berpihak pada pertumbuhan jangka pendek telah memicu pola produksi dan konsumsi yang agresif, eksploitatif, dan ekspansif menyebabkan daya dukung dan fungsi lingkungan hidupnya semakin menurun, bahkan mengarah pada kondisi yang mengkhawatirkan yaitu kerusakan lingkungan. Jika kerusakan lingkungan semakin meningkat, dapat menyebabkan bencana-bencana alam.

Dengan semakin berkembangnya ilmu pengetahuan dan teknologi, telah pula mendorong perkembangan pemahaman manusia terhadap pentingnya lingkungan. Pemahaman akan lingkungan ini melahirkan ide-ide tentang upaya pengelolaan lingkungan dan upaya untuk meminimalkan kerusakan lingkungan yang telah, sedang, dan akan terjadi.

Dalam Undang – Undang Dasar 1945 Amandemen pasal 28 F yang menyebutkan bahwa setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki menyimpan, mengolah dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia. Khusus di bidang



lingkungan hidup, dengan Undang-Undang Dasar 1945 Amandemen pasal 28 F didukung dengan adanya Undang- Undang Nomor 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup antara lain menyatakan bahwa sistem informasi lingkungan hidup paling sedikit memuat informasi mengenai status lingkungan hidup, peta rawan lingkungan hidup, dan informasi lingkungan hidup lainnya. Selain itu Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah telah melimpahkan kewenangan pengelolaan lingkungan hidup kepada pemerintahan daerah provinsi dan kabupaten/kota. Dengan meningkatnya kemampuan pemerintah daerah provinsi atau kabupaten/kota dalam penyelenggaraan pemerintahan yang baik (good governance) diharapkan akan semakin meningkatkan kepedulian kepada pelestarian lingkungan hidup. Di dalam melaksanakan ketentuan pasal 6 ayat (3) Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 ditetapkan Peraturan Pemerintah Nomor 6 tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (EKPPD) yang menjelaskan bahwa pemerintah berkewajiban mengevaluasi kinerja pemerintahan daerah dalam memanfaatkan hak yang diperoleh daerah dengan capaian keluaran dan hasil yang telah direncanakan. Sumber informasi utama EKPPD adalah Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan daerah (LPPD) yang disampaikan kepada pemerintah.

Oleh karenanya, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan mulai tahun 2016 memberikan penghargaan Nirwasita Tantra kepada Kepala Daerah yang memiliki kinerja terbaik dalam pengelolaan lingkungan hidup di daerahnya, dimana penilaian dilakukan berdasarkan dokumen Informasi Kinerja Pengelolaan Lingkungan Hidup Daerah.

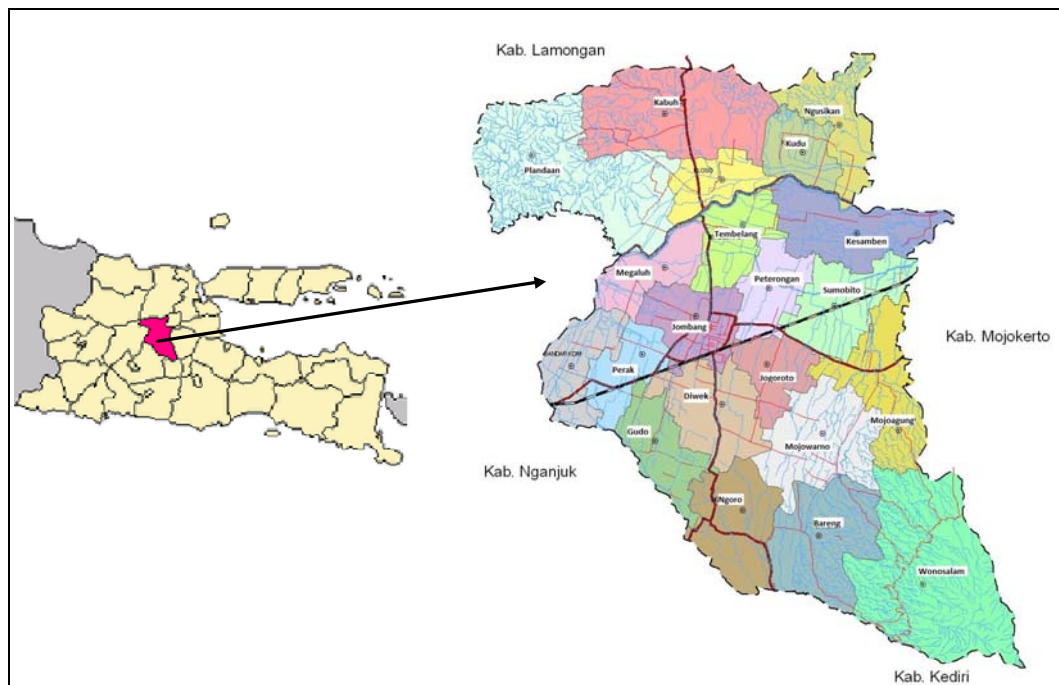
B. Profil Kabupaten Jombang dan Kondisi Ekologisnya

Kabupaten Jombang adalah sebuah kabupaten yang terletak di bagian tengah Provinsi Jawa Timur yang secara letak geografi berada di 5,20° - 5,30° BT, dan antara 7,20' dan 7,45' LS. Luas wilayah dari Kabupaten Jombang adalah 115.950



Ha atau 2,4% dari luas Provinsi Jawa Timur. Kabupaten Jombang ini memiliki batas-batas wilayah sebagai berikut:

- Sebelah utara : Kabupaten Lamongan
- Sebelah selatan : Kabupaten Kediri
- Sebelah timur : Kabupaten Mojokerto
- Sebelah barat : Kabupaten Nganjuk



Gambar 1.1. Peta Kabupaten Jombang

Kabupaten Jombang terdiri atas 21 kecamatan, yang mencakup 306 desa dan 400 kelurahan. Pembagian wilayah administrasi Kabupaten Jombang dapat ditunjukkan **Tabel 1.1** dan peta administrasi Kabupaten Jombang ditunjukkan pada **Gambar 1.1**.



Tabel 1.1 Pembagian wilayah administrasi Kabupaten Jombang

No.	Kecamatan	Luas Wilayah (km ²)	Jumlah Desa/Kelurahan
1	Bandar Kedungmulyo	32,50	11
2	Perak	29,05	13
3	Gudo	34,39	18
4	Diwek	47,70	20
5	Ngoro	49,86	13
6	Mojowarno	78,62	19
7	Bareng	94,27	13
8	Wonosalam	121,63	9
9	Mojoagung	60,18	18
10	Sumobito	47,64	21
11	Jogoroto	28,28	11
12	Peterongan	29,47	14
13	Jombang	36,40	20
14	Megaluh	28,41	13
15	Tembelang	32,94	15
16	Kesamben	51,72	14
17	Kudu	77,75	11
18	Ngusikan	34,98	11
19	Ploso	25,96	13
20	Kabuh	97,35	16
21	Plandaan	120,40	1

Sumber: BPS, Kabupaten Jombang Dalam Angka 2016

C. Kondisi Ekologis

Keanekaragaman hayati telah dimanfaatkan oleh masyarakat Indonesia sejak berabad-abad silam, seperti penyediaan pangan, papan, obat-obatan dan bahan hayati lainnya. Selain itu, masyarakat Indonesia juga telah mengenal jasa yang dihasilkan oleh hutan, seperti ketersediaan air bersih, udara bersih, penekan tingkat erosi, sedimentasi, dan lain-lain. Keanekaragaman hayati juga menjadi



pendukung utama kegiatan perekonomian dunia, sekitar 40% perekonomian dunia merupakan kegiatan pemanfaatan keanekaragaman hayati.

Pesatnya laju pertumbuhan penduduk dan kegiatan pembangunan akan mengakibatkan peningkatan kebutuhan bahan hayati dan lahan untuk pengembangan pertanian serta kegiatan pembangunan lainnya. Apabila tidak disertai dengan upaya konservasi yang memadai, maka akan menyebabkan kemerosotan keanekaragaman hayati yang disebabkan antara lain: konversi lahan, eksploitasi yang berlebihan, pencemaran, introduksi jenis asing, dan perubahan iklim. Konversi hutan menjadi peruntukan lain dan pemanenan hasil hutan secara tidak berkelanjutan (pembalakan hutan secara illegal) merupakan ancaman bagi ekosistem hutan. Ancaman tersebut saat ini telah terbukti yang berdampak pada kerusakan tata nilai jasa lingkungan, antara lain meningkatnya frekuensi kejadian banjir, tanah longsor, kekeringan, dan terjadinya wabah hama serta penyakit.

Antisipasi untuk mencegah dan mengatasi penyebab keanekaragaman hayati perlu mendapatkan perhatian. Amanat untuk menyelamatkan keanekaragaman spesies, keanekaragaman ekosistem serta keanekaragaman genetik disampaikan melalui Undang-undang No. 32 Tahun 2009, antara lain dengan membuat pencadangan hayati. Tujuan pencadangan adalah penyediaan biji/benih fertil dari spesies tumbuhan lokal dalam bentuk bibit yang cukup sehingga dapat digunakan, yang juga berfungsi untuk merekonstruksi lahan-lahan kritis atau memulihkan fungsi dari suatu tipe ekosistem. Prioritasnya adalah spesies tumbuhan lokal yang penyerbukannya perlu dibantu oleh satwa, a.l. oleh serangga (lebah, kumbang), burung, kelelawar atau mamalia lainnya. Tempat pencadangan berbagai keragaman spesies, genetik dan ekosistem tersebut dikenal dengan Taman Kehati.

Dalam pelaksanaannya maka dibuatlah Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup No. 29 Tahun 2009 tentang Pedoman Konservasi Keanekaragaman Hayati di Daerah. Taman Kehati adalah suatu kawasan pencadangan sumber daya alam hayati lokal di luar kawasan hutan yang mempunyai fungsi in-situ dan/atau ex-

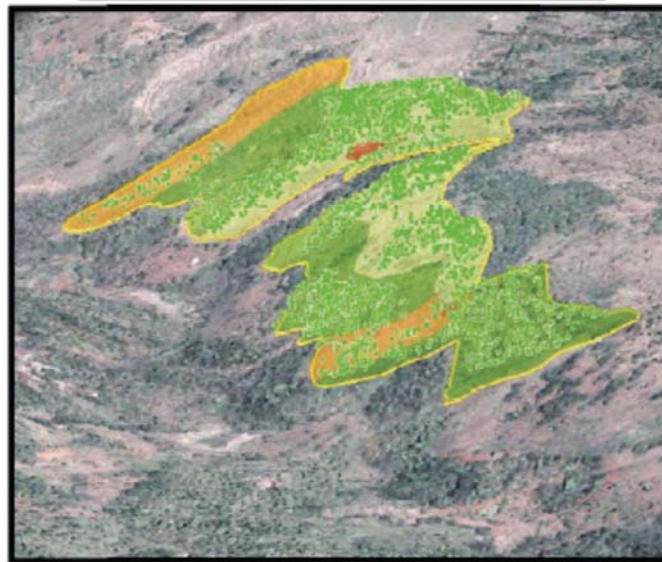


situ. Tujuan pembuatan Taman Kehati adalah membuat pencadangan spesies tumbuhan yang penyerbukannya harus dibantu oleh satwa.

Menurut Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomer 3 tahun 2012 tentang Taman Kehati, yang dimaksud Taman KEHATI adalah suatu kawasan pencadangan sumberdaya alam hayati lokal di luar kawasan hutan yang mempunyai fungsi konservasi in-situ dan/atau ex-situ, khususnya bagi tumbuhan yang penyerbukannya dan/atau pemencaran bijinya harus dibantu oleh satwa dengan struktur dan komposisi vegetasinya dapat mendukung kelestarian satwa penyerbuk dan pemencar biji.

Program Taman Kehati adalah program Kementerian Lingkungan Hidup yang diselenggarakan untuk menyelamatkan berbagai spesies tumbuhan asli/lokal yang memiliki tingkat ancaman sangat tinggi terhadap kelestariannya atau ancaman yang mengakibatkan kepunahannya. Taman Kehati Kabupaten Jombang yang terletak di Desa Sumber Rejo, Kecamatan Wonosalam merupakan salah satu kawasan pencadangan sumber daya alam hayati lokal di Jawa Timur khususnya daerah sekitar Jombang. Pembangunannya dilakukan sejak tahun 2011 dan diresmikan oleh Menteri Negara Lingkungan Hidup pada tanggal 23 Agustus 2011. Luas Taman Kehati ini sekitar 15 hektar, yang dapat diakses dengan mudah melalui jalan utama Jombang ke Wonosalam yang berjarak sekitar 30 Km dari kota Jombang, melalui Mojoagung. Kawasan yang berbukit dengan udara relatif sejuk dengan lingkungan pedesaan merupakan tempat yang cukup ideal sebagai tempat edukasi alami yang terkait dengan pengetahuan keragaman tumbuhan dan satwa. Kawasan yang terletak di antara perkebunan buah-buahan seperti durian (*Durio zibethinus*), salak (*Sallaca edulis*), rambutan (*Nephelium lappaceum*), tanaman industri cengkeh (*Syzygium aromaticum*), dan kebun-kebun penduduk seperti pete (*Parkia spesiosa*), jambu air (*Syzygium aqueum*) dan lain-lain, dipadu dengan Taman Kehati merupakan obyek ekowisata yang cukup ideal.

Lokasi pembangunan dan pengembangan taman kehati adalah di area Perusahaan Daerah Panglungan, Ds. Sumberjo, Kec. Wonosalam, Kab. Jombang.



Gambar 1.2. Lokasi Pembangunan dan Pengembangan Taman Kehati

Tujuan pembangunan dan pengembangan Taman Keanekaragaman Hayati Kabupaten Jombang, ialah:

- a. Menyelamatkan berbagai jenis tumbuhan lokal terutama di Jawa Timur dari ancaman kepunahan;
- b. Membangun dan mengembangkan Taman Keanekaragaman Hayati sebagai kawasan konservasi eksitu;
- c. Sebagai koleksi berbagai tumbuhan lokal dan langka;
- d. Sebagai sumber benih dan bibit;



- e. Sebagai sarana pendidikan, penelitian dan praktek pengenalan jenis-jenis tumbuhan lokal;
- f. Sebagai sarana rekreasi dan ekowisata;
- g. Sebagai ruang terbuka hijau.

Sasaran kegiatan pemantauan Taman Keanekaragaman Hayati Kabupaten Jombang Provinsi Jawa Timur adalah :

- a. Menginventarisasi kondisi taman kehati terutama keanekaragaman tumbuhan dan satwa.
- b. Mengevaluasi fungsi dan pemanfaatan taman kehati sebagai fungsi ekologi, sosial ekonomi dan fungsi ekonomi
- c. Memberikan rekomendasi saran tindak untuk pengembangan dan peningkatan fungsi taman kehati.

Arahan pengembangan Taman Kehati Kabupaten Jombang sebagaimana telah ada di Masterplan Pengembangan Taman Kehati, pembagian blok dilakukan sebagai upaya pengaturan pemanfaatan kawasan sesuai dengan fungsi-fungsi yang ingin dicapai dari pengembangan kawasan. Secara garis besar terdapat dua fungsi yang ingin dicapai, yaitu:

1) fungsi perlindungan dan pelestarian, dan 2) fungsi pemanfaatan wisata. Kedua fungsi tersebut diterjemahkan dalam pembagian blok pengembangan menjadi blok intensif dan blok non intensif, dalam pembagian blok pengembangan ini dilakukan melalui pendekatan pemanfaatan fasilitas eksisting dan pertimbangan ekologis kawasan.

1. Blok Intensif

Blok intensif dikembangkan untuk penempatan fasilitas pengelolaan utama dan pusat aktivitas pengunjung. Blok pemanfaatan intensif direncanakan dengan pengembangan fungsi sebagai berikut :



a. Area Penerimaan

Merupakan ruang pertama yang dapat dijumpai pengunjung ketika memasuki kawasan. Sebagai *welcome area*, ruang ini berfungsi memberikan identitas atau ciri khusus bagi kawasan serta memberikan fungsi informasi sehingga dapat menarik minat pengunjung.

b. Area Pelayanan

Adalah ruang yang berfungsi sebagai pusat kegiatan kunjungan. Ruang ini memberikan kemudahan bagi pengunjung berupa fasilitas umum ataupun jasa. Ruang ini memusat pada suatu lokasi yang dapat dengan mudah dicapai oleh pengunjung, pada titik-titik tertentu dalam tapak sebagai *rest area*. Ruang ini ditujukan bagi pengembangan rekreatif dan edukatif.

c. Area Pemanfaatan Tanaman

Area ini ditujukan bagi pengembangan tanaman-tanaman yang dapat dimanfaatkan oleh masyarakat pada tapak, sebagai upaya untuk memanfaatkan potensi lahan yang cukup subur serta untuk menambah daya tarik dan nilai ekonomi pada tapak.

2. Blok Non Intensif

Blok non intensif dikembangkan sebagai ruang dengan fungsi utama ekologis, yaitu untuk pelestarian koleksi tumbuhan. Blok non intensif yang direncanakan untuk pengembangan jenis tanaman lokal/endemik, jenis tanaman langka, dan jenis-jenis tanaman populer.

Jenis fasilitas yang dikembangkan, secara garis besar dikelompokkan menjadi 2 bagian, yaitu fasilitas pengelolaan dan fasilitas pemanfaatan. Fasilitas pengelolaan merupakan fasilitas yang dibangun untuk pemenuhan kebutuhan pengelolaan, mulai dari fasilitas administrasi, penanaman dan pemeliharaan tanaman koleksi, serta fasilitas pengelolaan pengunjung.

Sedangkan fasilitas pemanfaatan adalah fasilitas-fasilitas yang dibangun untuk menampung aktivitas dan program pemanfaatan kawasan, diantaranya adalah *welcome area*, jalur sirkulasi dan interpretasi kawasan, serta fasilitas



rekreasi. Lokasi dan jenis fasilitas yang akan dikembangkan di taman keanekaragaman hayati dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 1.2. Lokasi dan Jenis Fasilitas Pengembangan Taman Keanekaragaman Hayati

Lokasi		Fasilitas
Intensif	Area Penerimaan	Gerbang masuk ke tapak
		Papan nama area
		Papan Interpretasi
		Jalan aspal/perkerasan
	Area Pelayanan	Parkir pengunjung
		Kantor pengelola
		Pusat informasi
		Balai pertemuan
		Parkir pengunjung dan staff
		Musholla
		Toilet
		Papan interpretasi
		Jalur aspal/perkerasan
		Jalan setapak
		Pos Jaga
		<i>Shelter</i>
		<i>Sign board</i>
		Tempat sampah
		Gudang peralatan
		<i>Nursery</i> (pembenihan tanaman)
Area pemanfaatan tanaman	Jalan setapak	
	<i>Shelter</i>	
	<i>Sign board</i>	
Non intensif	Area Penyangga	Tempat sampah
		Jalan setapak
		<i>Shelter</i>
		<i>Sign board</i>
		Tempat sampah

Tidak kurang 100 spesies tumbuhan lokal penting Provinsi Jawa Timur dengan sekitar 2.500 individu pohon dipelihara sebagai koleksi ilmiah di dalam kebun. Sekitar 46 spesies telah dideskripsikan manfaat dan perannya bagi kehidupan masyarakat. Beberapa diantaranya tergolong agak jarang ditemukan seperti cendana (*Santalum album*), nogosari (*Mesua ferrea*), duwet (*Syzygium cuminii*), trenggulun (*Protium javanicum*), kemloko (*Phyllanthus emblica*), jangkang



(*Sterculia foetida*), wuni (*Antidesma bunius*), rukem (*Flacourtia rukam*), kepel (*Stelechocarpus burahol*), wuru sintok (*Cinnamomum sintoc*), mundu (*Garcinia dulcis*), sawo kecil (*Manilkara kauki*), gayam (*Inocarpus fagiferous*), kedawung (*Parkia timoriana*), gowok (*Syzygium polycephalum*). Spesies koleksi tersebut umumnya secara tradisional sudah banyak digunakan masyarakat baik sebagai bahan pangan, bangunan, obat/jamu dan keperluan dalam upacara adat.

Koleksi penting lain juga berpotensi sebagai bahan bioaktif obat modern (obat paten) antara lain adalah mengkudu (*Morinda citrifolia*) untuk berbagai penyakit tekanan darah, diabetes dan meningkatkan stamina tubuh bagi wanita. Buah kepel juga telah diketahui sebagai bahan penyerap bau, dan digunakan pada beberapa produk kosmetika. Masih ada beberapa tumbuhan liar di kawasan ini seperti pegagan (*Centela asiatica*), yang banyak dan sangat melimpah, bahan bioaktifnya sebagai digunakan dalam sediaan obat penyakit syaraf. Beberapa koleksi lain merupakan bahan kayu bangunan tradisional yang baik seperti uru lilin (*Litsea garciae*), sogo (*Adenanthera pavonina*), sonokeling (*Dalbergia latifolia*), angšana (*Pterocarpus indicus*), cempaka (*Michelia champaca*). Beberapa koleksi lain merupakan koleksi unggulan seperti durian bido (*Durio zibethinus*) dengan rasa khas duren pahit, pete wonosalam (*Parkia spesiosa*) yang bisa menghasilkan buah sepanjang tahun.

Berbagai satwa juga terdapat di kawasan ini mulai dari binatang menyusui (musang, kelelawar, tupai) burung (elang ular bido, srigunting, cerocokan, kutilang, perkutut, derkuku, alap-alap, kukuk beluk, dan kelompok burung perkici), reptilia (ular, bunglon dan kadal), amfibia (katak terbang) dan kelompok serangga penyerbuk dan penghasil madu. Beberapa koleksi tumbuhan menghasilkan buah yang disukai oleh burung dan kelelawar seperti dari kelompok beringin-beringin (*Ficus spp.*), jambu-jambuan (*Syzygium spp.*), medang-medangan (*Litsea spp. dan Cinnamomum spp.*)

Identifikasi pelabelan dan titik tanam terhadap seluruh koleksi diperoleh data sekitar 2.584 titik tanam. Koleksi yang telah diidentifikasi meliputi 36 family (suku), 78 genus (marga) dan 114 species (jenis). Tegakan koleksi paling banyak



merupakan koleksi dari kelompok Moraceae (beringin-beringin) dengan jumlah genus terbanyak adalah *Ficus* (11 species), kemudian disusul oleh Myrtaceae (jambu-jambuan) dengan genus terbanyak adalah *Syzygium* (5 spesies) dan Lauraceae (medang-medangan) dengan genus *Litsea* (5 spesies). Kemudian diikuti dari kelompok Anacardiaceae (mangga-mangga) dengan genus *Mangifera* (3 spesies) dan Ebenaceae (kayu hitam atau eboni-ebonian) dengan marga *Diospyros* (3 spesies).



Gambar 1.2. Foto Tanaman di Taman Kehati Jombang

Kegiatan Pemeliharaan dan Pengembangan

Untuk kegiatan pemeliharaan rutin yang telah dianggarkan melalui APBD Kabupaten Jombang TA 2015, meliputi pemupukan, pembersihan gulma, pemeliharaan dan lain-lain dilakukan dengan partisipasi keterlibatan masyarakat terutama di 2 desa yaitu desa Panglungan dan desa Sumberjo. Kegiatan pemeliharaan yang dilakukan pada tahun 2015 sebagaimana berikut:



1. Penyiangan

Gulma yang tumbuh liar di sekitar bibit dibersihkan, agar kemampuan kerja akar dalam menyerap unsur-unsur hara dapat berjalan optimal. Disamping itu tindakan penyiangan juga dimaksudkan untuk mencegah datangnya hama menjadikan rumput atau gulma lain sebagai tempat persembunyiannya, sekaligus untuk memutus daur hidupnya.



Gambar 1.3. Kegiatan Penyiangan

2. Pemupukan

Sebagian besar lahan Taman Kehati Kabupaten Jombang berupa batu-batuan dan ditumbuhi semak belukar. Secara ekologis dan ekonomis areal lahan tersebut tidak produktif dan memiliki kesesuaian lahan dengan nilai N untuk pertanaman keras, perkebunan dan pertanian. Hal ini terkait dengan miskinnya/sangat minim media tumbuh (*topsoil*) di lokasi pengembangan taman keanekaragaman hayati.

Pemeliharaan tanaman dengan pemberian pupuk diperlukan pada tanah-tanah yang miskin zat hara. Pemupukan dilakukan 1x setahun pada bulan Nopember



2015 (musim penghujan) agar pertumbuhan bibit lebih optimal dan untuk mendapatkan hasil yang berkualitas baik. Untuk merangsang pertumbuhan awal tanaman antara lain melalui pemberian pupuk fosfor atau NPK, meskipun jumlah pupuk yang disediakan masih belum mencukupi jumlah tumbuhan dan luasan lahan yang harus dilakukan pemupukan.



Gambar 1.4. Kegiatan Pemupukan

3. Perbaikan Taman Hias di Akses Jalan Masuk

Minimnya anggaran pemeliharaan mengakibatkan sebagian besar tanaman hias di gerbang masuk taman kehati tidak tumbuh dengan baik. Upaya perbaikan dilakukan agar aspek estetika di taman kehati dapat lebih baik. Pada APBD TA 2015, dilakukan penyulaman dan penggantian tanaman hias, dengan variasi jenis yang lebih menarik antara lain dengan jenis anting putri, corimbusa, puring, bougenvil dan jenis tanaman hias lain.



Gambar 1.3. Kegiatan Perbaikan Taman Hias di Akses Jalan Masuk

4. Pemasangan Papan Interpretasi

Untuk meningkatkan fungsi taman kehati sebagai lokasi pembelajaran lingkungan hidup di tahun 2015 telah dipasang 10 (sepuluh) papan interpretasi yang dibuat untuk menjelaskan objek jenis tanaman, menjelaskan fungsi dan manfaatnya. Pemasangan bekerjasama dengan LSM Lingkungan Hidup Lokal sebagai bagian peningkatan dan pemberdayaan masyarakat yaitu LSM Padepokan Wonosalam Lestari.



Gambar 1.6. Papan Interpretasi

5. Kerjasama Pengembangan

PT Indonesia Power Unit Grati Pasuruan bersama dengan Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Jombang sebagai bentuk kepedulian terhadap penyelamatan sumber daya kehati di Indonesia telah membuat kerjasama untuk memanfaatkan dana Corporate Social Responsibility (CSR) nya, khususnya memaksimalkan fungsi Taman Kehati di Kabupaten Jombang. Kerjasama yang disepakati akan dilaksanakan dalam waktu 5 (lima) tahun kedepan dan digunakan untuk pembangunan sarana dan prasarana, program pendidikan lingkungan, pengkayaan tanaman dan pemberdayaan kelompok masyarakat pengelola. Kerjasama ditandai dengan penandatanganan Perjanjian Kerjasama antara Bupati Jombang dengan General Manager PT Indonesia Power Unit



Grati-Pasuruan tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup di Kabupaten Jombang Provinsi Jawa Timur Nomor 180/10/415.10.1/2015 dan 08.Pj/060/UPPGT/2015 tanggal 22 Oktober 2015.

Pada tanggal 21 Desember 2015 telah dilaksanakan launching program dengan ditandai Penandatanganan Perjanjian Kerjasama antara General Manager PT. Indonesia Power Grati Pasuruan dengan Kepala Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Jombang terkait pengembangan Taman Kehati di Jombang, dilanjutkan seminar lingkungan hidup dengan tema **“Potensi dan Permasalahan Keanekaragaman Hayati di Indonesia”**.



Gambar 1.6. Pelaksanaan Penandatanganan Kerjasama dan Seminar Kehati



Gambar 1.7. Kondisi Taman Kehati Kabupaten Jombang Saat Ini



D. Proses Penyusunan Dokumen Informasi Kinerja Pengelolaan Lingkungan Hidup Daerah

Dokumen Informasi Kinerja Pengelolaan Lingkungan Hidup Daerah Kabupaten Jombang tahun 2016 disusun oleh Tim yang telah dikukuhkan dengan Surat Keputusan Bupati Jombang Nomor 188.4.45/89/415.10.3.4/2017 tanggal 25 Februari 2017.

Tabel 1.3 Tim Teknis Penyusun Informasi Kinerja Pengelolaan Lingkungan Hidup Daerah Kabupaten Jombang

NO	KEDUDUKAN DALAM TIM	KETERANGAN
1.	Penanggung jawab	Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Jombang
2.	Ketua	Kepala Bidang Tata Lingkungan pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Jombang
3.	Sekretaris	Kepala Seksi Inventarisasi, Perencanaan dan Informasi Lingkungan Hidup
4.	Anggota	<ul style="list-style-type: none">a. Kepala Bidang Pengendalian, Pengawasan, dan Penegakan Hukum Lingkungan pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Jombangb. Kepala Bidang Pengelolaan Sampah dan Pertamanan pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Jombangc. Kepala Bidang Konservasi Lingkungan pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Jombangd. Kepala Seksi Lalu Lintas Angkutan Jalan pada Dinas Perhubungan Kabupaten Jombange. Kepala Seksi Perlindungan Tanaman pada Dinas Pertanian Kabupaten Jombangf. Kepala Urusan Lingkungan pada Perum Perhutani KPH Jombangg. Kepala Sub Bidang Perumahan Pemukiman dan Lingkungan Hidup Pada Bappeda Kab. Jombangh. Kepala Seksi Kesehatan Lingkungan Pada Dinas Kesehatan Kabupaten Jombangi. Kepala Seksi Pencegahan dan Kesiapsiagaan Pada Badan Penanggulangan Bencana daerahj. Kepala Seksi Operasional dan Pemeliharaan Pada Dinas Pekerjaan Umum dan Pentaan Ruang Kabupaten Jombangk. NASHIKAH IMAMAH, ST, MT /Perguruan Tinggil. SHANTI WURYADANI/LSM SANGGAR HIJAU



E. Maksud dan Tujuan

Maksud disusunnya Informasi Kinerja Pengelolaan Lingkungan Hidup Daerah adalah:

- a. Memberikan informasi kepada para pengambil keputusan di tingkat pusat dan daerah tentang kondisi lingkungan di Kabupaten Jombang Tahun 2016 sebagai bahan evaluasi kebijakan pembangunan yang berkelanjutan dan berwawasan lingkungan.
- b. Sebagai bentuk pertanggungjawaban kepada publik tentang pencapaian target program-program pemerintah di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.
- c. Dalam fungsinya sebagai pendukung kebijakan, Indikator Kinerja dapat membantu dalam penentuan skala prioritas yang disesuaikan dengan derajat permasalahan lingkungan sebagaimana diindikasikan oleh angka indeks kualitas lingkungan hidup. Indeks kualitas lingkungan hidup juga dapat digunakan untuk mengidentifikasi sumber permasalahan dalam pengelolaan lingkungan hidup.
- d. Indikator Kinerja dalam fungsinya sebagai ‘bahasa’ komunikasi untuk publik dapat membantu meningkatkan kesadaran masyarakat awam sehingga indeks dapat menjadi alat penggerak bagi keterlibatan publik.

Tujuan disusunnya Informasi Kinerja Pengelolaan Lingkungan Hidup Daerah adalah:

- a. Menyediakan pondasi yang handal berupa data, informasi dan dokumentasi untuk meningkatkan kualitas pengambilan keputusan pada semua tingkat dengan memperhatikan aspek dan daya dukung serta daya tampung lingkungan hidup daerah;
- b. Secara rutin menyediakan informasi tentang kondisi lingkungan kini dan prospeknya di masa mendatang yang akurat, berkala, dan terjangkau bagi publik, pemerintah, organisasi non pemerintah serta pengambil keputusan;
- c. Menyediakan peringatan dini akan masalah potensial, serta memungkinkan adanya evaluasi akan rencana mendatang;



- d. Meningkatkan mutu informasi tentang lingkungan hidup sebagai bagian dari sistem pelaporan publik serta sebagai bentuk dari akuntabilitas publik;
- e. Menyediakan sumber informasi utama bagi Rencana Pembangunan Tahunan Daerah (Repetada), Program Pembangunan Daerah (Propeda) dan kepentingan investor;
- f. Menyediakan informasi lingkungan hidup sebagai sarana publik untuk melakukan pengawasan dan penilaian pelaksanaan "Tata Praja Lingkungan" (Good Governance) di daerah, sebagai landasan publik untuk berperan dalam menentukan kebijakan pembangunan berkelanjutan yang berwawasan lingkungan (Bangun Praja) bersama-sama dengan Lembaga Eksekutif, Legislatif dan Yudikatif, serta sebagai sarana pendidikan untuk peningkatan kesadaran dan kefahaman publik akan kecenderungan dan kondisi lingkungan dalam mewujudkan kelestarian lingkungan hidup.

F. Ruang Lingkup

Ruang Lingkup penyusunan Informasi Kinerja Pengelolaan Lingkungan Hidup Daerah diantaranya:

1. Wilayah studi adalah Kabupaten Jombang secara keseluruhan.
2. Pengelolaan Lingkungan Hidup yang dimaksud meliputi pengelolaan pada kualitas air, udara, dan lahan baik pengelolaan yang dilakukan oleh pemerintah, akademisi, LSM, dan masyarakat.
3. Data yang ditampilkan untuk menggambarkan Informasi Kinerja dapat berupa tabel, diagram, gambar, dan analisa yang tepat dan sesuai dengan kondisi riil di lapangan.



Bab 2

ISU PRIORITAS LINGKUNGAN HIDUP DAERAH

Kabupaten Jombang dengan segala potensi alam yang dimilikinya merupakan daya tarik bagi investor untuk menginvestasikan modalnya dan bersama ikut membangun Kabupaten Jombang menjadi lebih maju. Peluang investasi di Kabupaten Jombang diantaranya dalam sektor industri, pariwisata, maupun pertambangan. Hal ini dapat dilihat dengan semakin banyak industri yang didirikan di Kabupaten Jombang pada tahun 2016 total terdapat 543 industri kecil, 26 industri menengah, dan 8 industri besar. Dalam hal pariwisata, banyak sekali dilakukan renovasi lahan-lahan wisata dengan fasilitas yang menjadikan pengunjung menjadi lebih nyaman di lokasi wisata. Begitu juga pada sektor pertambangan, terdapat tambang-tambang baru yang jumlahnya sangat besar. Namun meningkatnya jumlah investasi di Kabupaten Jombang harus diimbangi dengan keberadaan badan usaha yang legal, dengan dibuktikan dengan kepemilikan izin-izin yang dimiliki.

Dalam hal perizinan, Pemerintah Kabupaten Jombang melakukan tindakan untuk menelusuri kegiatan-kegiatan di lapangan, di samping memberikan banyak kemudahan dalam pengurusan perizinan. Hal terpenting dari perizinan adalah



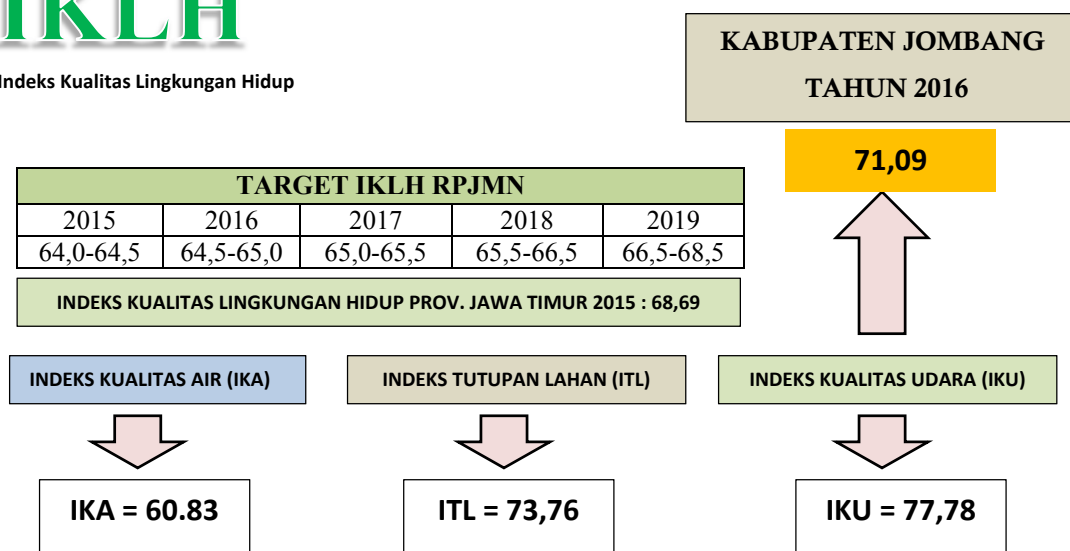
kesesuaian lokasi kegiatan dengan tata ruang Kabupaten Jombang. Dalam hal tata ruang, Pemerintah Kabupaten Jombang menerbitkan Peraturan Daerah Kabupaten Jombang No. 21 Tahun 2009 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Jombang. Sehingga setiap kegiatan harus menyesuaikan dengan Peraturan Daerah tersebut.

Perizinan ini berkaitan pula dengan pengelolaan dampak kegiatan terhadap lingkungan di sekitarnya, yaitu dampak sosial-budaya, ekonomi, kesehatan, pertahanan-keamanan, dan pencemaran terhadap lingkungan. Pengelolaan ini juga selalu dipantau oleh Pemerintah Kabupaten Jombang melalui Badan Lingkungan Hidup Daerah Kabupaten Jombang dan bekerjasama dengan masyarakat sekitar kegiatan dengan cara memberikan laporan bila ada kegiatan yang meresahkan.

2.1 INDEKS KUALITAS LINGKUNGAN HIDUP

IKLH

Indeks Kualitas Lingkungan Hidup



Indeks kualitas lingkungan hidup merupakan gambaran atau indikasi awal yang memberikan kesimpulan cepat dari kondisi lingkungan hidup pada lingkup dan periode tertentu. Indeks dapat menjadi angka atau titik referensi kualitas



lingkungan, apakah pada posisi kondisi yang baik atau buruk atau pada kisaran keduanya. Indeks bermakna sebagai pembandingan atau komparasi, dimana suatu subyek relatif terhadap subyek lainnya.

Penyusunan indeks kualitas lingkungan hidup juga terkait erat dengan kebutuhan sasaran pengarusutamaan pembangunan berkelanjutan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) yaitu terpeliharanya kualitas lingkungan hidup dan menjadi baku pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM). Indeks kualitas lingkungan hidup Kabupaten Jombang tahun 2016 sebesar **71,09** sesuai klasifikasi angka indeks berada dalam **Kategori Cukup**. Nilai indeks ini dihitung berdasar nilai indeks kualitas air, indeks kualitas udara, dan indeks kualitas tutupan lahan.

Berdasarkan analisa data dan pertimbangan nilai indeks maka dapat dirumuskan isu lingkungan hidup prioritas yang wajib mendapat perhatian bersama, sebagai berikut:

2.1.1 Indeks Pencemaran Air

Indeks kualitas air memperlihatkan gambaran mengenai besarnya tekanan beban pencemaran terhadap air sungai baik dari industri dan domestik. Hal ini juga menggambarkan kondisi pengelolaan lingkungan di daerah, diantaranya kebijakan dalam penetapan besaran anggaran untuk lingkungan hidup, sumber daya manusiis, sarana dan prasarana, serta kebijakan-kebijakan lainnya. Harapannya indeks kualitas air dapat dijadikan bahasa bersama dari seluruh pemangku kepentingan untuk berbuat sesuai dengan proporsi dan kemampuan masing-masing untuk memperbaiki kualitas air sungai.

Pemantauan terhadap kualitas air sungai di Kabupaten Jombang secara rutin telah dilaksanakan pada 6 sungai dan 2 avour dengan titik pengambilan pada bagian hulu, tengah, dan hilir sehingga secara keseluruhan terdapat 18 lokasi titik pantau air sungai dengan periode



pemantauan satu bulan sekali. Adapun lokasi titik pantau air sungai adalah sebagai berikut :

1. Sungai Gude Ploso (Sebelum PG Djombang Baru),
2. Sungai Gude Ploso (Depan PG Djombang Baru),
3. Sungai Gude Ploso (DAM Tambak Beras),
4. Sungai Jombang (Rel KA Jabon),
5. Sungai Jombang Kulon (samping Toko Anies),
6. Sungai Jombang Kulon (DAM Sambong),
7. Sungai Jombang wetan (Setelah DAM Cokenongo),
8. Sungai Jombang Wetan (Samping Pegadaian),
9. Sungai Jombang Wetan (DAM Pancasila),
10. Afvour Mojongapit (Pojok Timur Pasar Pon),
11. Afvour Mojongapit (Samping SPBU Mojongapit),
12. Afvour Pandan (Depan SMEA Negeri),
13. Afvour Pandan (Jembatan Rel KA),
14. Sungai Rejoagung IV A (Depan Balai Desa Kaliwungu),
15. Sungai Rejoagung IV A (Perampatan Jalan Pahlawan),
16. Sungai Gude (Belakang Pabrik Seng Fong),
17. Sungai Gude Denanyar (Depan Perum Denanyar Indah),
18. Sungai Rejoagung IV B (Samping Tirta Wisata).





Kondisi kualitas air sungai di Kabupaten Jombang berdasarkan indeks kualitas air termasuk kategori **kurang** (nilai indeks kualitas air 60,83). Hal ini berdasarkan nilai indeks kualitas air untuk masing-masing wilayah sungai, berikut hasil perhitungan status mutu setiap titik pantau sungai di Kabupaten Jombang.



Tabel 2.1. Status Mutu Air Sungai di Kabupaten Jombang

No	Nama Sungai	Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Juni	Juli	Agt	Sept	Okt	Nov	Des
1	Sungai Gude Denanyar (Depan Perum Denanyar Indah)	ringan	ringan	memenuhi	memenuhi	memenuhi	memenuhi	memenuhi	memenuhi	tidak ada air	Tidak ada air	ringan	memenuhi
2	Sungai Gude Ploso (DAM Tambakberas)	ringan	ringan	ringan	memenuhi	memenuhi	memenuhi	memenuhi	memenuhi	memenuhi	ringan	ringan	memenuhi
3	Sungai Jombang Kulon (DAM Sambong)	ringan	ringan	memenuhi	ringan	memenuhi	memenuhi	ringan	memenuhi	memenuhi	memenuhi	ringan	ringan
4	Sungai Jombang Kulon (Samping Toko Anies)	ringan	ringan	memenuhi	memenuhi	memenuhi	memenuhi	memenuhi	sedang	memenuhi	memenuhi	ringan	memenuhi
5	Sungai Jombang Wetan (DAM Pancasila)	ringan	ringan	memenuhi	ringan	memenuhi	memenuhi	ringan	memenuhi	memenuhi	memenuhi	ringan	ringan
6	Afvour Mojongapit (Samping SPBU Mojongapit)	ringan	ringan	ringan	memenuhi	memenuhi	memenuhi	memenuhi	sedang	ringan	memenuhi	ringan	ringan
7	Sungai Rejoagung IV B (Samping Tirta Wisata)	ringan	ringan	ringan	memenuhi	memenuhi	memenuhi	memenuhi	memenuhi	ringan	memenuhi	memenuhi	ringan
8	Afvour Mojongapit (Pojoek Timur Pasar Pon)	ringan	ringan	tidak ada air	ringan	Tidak Ada Air	Tidak Ada Air	tidak ada air	tidak ada air	tidak ada air	memenuhi	Tidak ada air	ringan
9	Sungai Rejoagung IV A (Depan Balai Desa Kaliwungu)	ringan	ringan	ringan	ringan	Tidak Ada Air	Tidak Ada Air	memenuhi	memenuhi	ringan	memenuhi	ringan	ringan



Informasi Kinerja Pengelolaan Lingkungan Hidup Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2016



No	Nama Sungai	Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Juni	Juli	Agt	Sept	Okt	Nov	Des
10	Afvour Pandan (Jembatan Rel KA)	ringan	ringan	memenuhi	memenuhi	memenuhi	memenuhi	memenuhi	memenuhi	ringan	memenuhi	ringan	memenuhi
11	Sungai Jombang Kulon (Rel KA Jabon)	ringan	ringan	memenuhi	memenuhi	memenuhi	memenuhi	memenuhi	memenuhi	ringan	ringan	ringan	memenuhi
12	Sungai Gude (Belakang PT Seng Fong)	ringan	ringan	ringan	memenuhi	memenuhi	memenuhi	memenuhi	memenuhi	ringan	ringan	ringan	ringan
13	Sungai Gude Ploso (Depan PG Djombang Baru)	ringan	ringan	memenuhi	memenuhi	memenuhi	memenuhi	memenuhi	ringan	ringan	memenuhi	ringan	ringan
14	Sungai Gude Ploso (Sebelum PG Djombang Baru)	ringan	ringan	ringan	memenuhi	memenuhi	memenuhi	memenuhi	memenuhi	ringan	ringan	ringan	memenuhi
15	Sungai Jombang Wetan (Setelah DAM Cokenongo)	ringan	ringan	memenuhi	memenuhi	memenuhi	memenuhi	memenuhi	memenuhi	memenuhi	memenuhi	ringan	memenuhi
16	Afvour Pandan (Depan SMEA Negeri)	ringan	ringan	memenuhi	memenuhi	memenuhi	memenuhi	memenuhi	memenuhi	memenuhi	memenuhi	ringan	ringan
17	Sungai Rejoagung IV A (Perempatan Jalan Pahlawan)	ringan	ringan	ringan	memenuhi	memenuhi	memenuhi	memenuhi	memenuhi	memenuhi	memenuhi	ringan	ringan
18	Sungai Jombang Wetan (Samping Pegadaian)	ringan	ringan	memenuhi	memenuhi	memenuhi	memenuhi	ringan	memenuhi	memenuhi	memenuhi	ringan	ringan



Data Perhitungan Indeks Pencemaran Air untuk IKLH Kabupaten Jombang yaitu sebesar 60,83 yang terangkum pada Tabel dibawah ini.

Tabel 2.2. Data Hasil Perhitungan Indeks Pencemaran Air

Status	Jumlah	Persen	Koefisien	Nilai
Memenuhi	113	55%	70	38,58537
Ringan	90	44%	50	21,95122
Sedang	2	1%	30	0,292683
Berat	0	0%	10	0
	205			
Nilai Indeks Penc. Air				60,83

2.1.2 Indeks Pencemaran Udara



Pemantauan kualitas udara untuk mengetahui Indeks Pencemaran Udara Kabupaten Jombang yang dihitung dari 2 konsentrasi parameter yaitu NO_2 dan SO_2 , dilakukan melalui metode *Passive Sampler* untuk pemantauan udara di 4 titik lokasi area Kabupaten Jombang yang mewakili area transportasi, industri, perkantoran, dan pemukiman. Berikut beberapa lokasi titik pantau untuk mengetahui kualitas udara di Kabupaten Jombang :



Tabel 2.3. Lokasi Titik Pantau Kualitas Udara dengan Passive Sampler di Kabupaten Jombang

Lokasi Sampling		Koordinat Lokasi	TAHAP I		TAHAP II	
			SO2	NO2	SO2	NO2
			$\mu\text{g}/\text{Nm}^3$	$\mu\text{g}/\text{Nm}^3$	$\mu\text{g}/\text{Nm}^3$	$\mu\text{g}/\text{Nm}^3$
Transportasi	Jl. Basuki Rahmat No. 1 Jombang	07 ^o 33'25" LS 112 ^o 14'05,0"	7,41	14,55	6,14	33
Industri	PT Seng Fong Jl. Yos Sudarso No. 173 Tunggorono	07 ^o 32'58" LS 112 ^o 12'39,0"	14,02	16,1	3,26	25,7
Perkantoran	Area PEMDA Jl. Wahid Hasyim No. 137	07 ^o 33'06" LS 112 ^o 14'12,0"	2,8	6,65	4,11	12,5
Perumahan	Perum Jombang Permai Jl. Hayam Wuruk	07 ^o 32'37" LS 112 ^o 14'44,0"	8,11	7,65	4,59	15,5
BLANK			<2,57	<0,41	<2,57	<0,41



Dari rincian hasil perhitungan total rata-rata konsentrasi parameter NO₂ dan SO₂ didapat hasil indeks pencemaran udara sebesar 77,78. Kondisi kualitas udara di Kabupaten Jombang berdasarkan indeks pencemaran udara termasuk kategori **baik**. Secara rinci, hasil perhitungan dalam tabel dibawah ini.

Tabel 2.4. Data Hasil Perhitungan Indeks Pencemaran Udara

Parameter	Rerata	EU	IEU
NO ₂	16,45625	40,00	0,4114
SO ₂	6,31	20,00	0,3153
Rata-Rata			0,5000
Indeks Udara			77,78

2.1.3 Indeks Tutupan Hutan

Setiap luas lahan harus memiliki proporsi luas hutan yang sama untuk menjaga kelestarian lingkungan hidupnya. Dengan demikian, perhitungan indeks merupakan perbandingan luas hutan dibandingkan luas wilayah administrasinya. Angka persentase yang diwajibkan adalah 30% berdasarkan UU 41/99 Kehutanan. Sebagai angka idealnya diambil 84,3% yaitu luas tutupan hutan pada tahun 1982. Dalam konteks peng-indeks-an 30% mendapat angka 50, sedangkan angka ideal maksimal 100 adalah ketika 84,3%.

Sebagai contoh untuk mengetahui Indeks Tutupan Lahan dilakukan pemantauan di lokasi area Kabupaten Jombang, yaitu pada masing-masing kelurahan di semua kecamatan.

Tabel 2.5. Hasil Perhitungan Indeks Tutupan Lahan untuk IKLH Kabupaten Jombang

No	Kab.	Penduduk	Luas Wilayah (km ²)	Luas Tutupan Lahan (KM ²)	Tutupan Lahan /Luas Wilayah	Indeks Tutupan Lahan
1	Jombang	1.321.223	1.160,00	647	55,80%	73,76



Perhitungan pada tabel diatas didapatkan total angka Indeks Tutupan Hutan yaitu sebesar **73,76** dari total luas wilayah Kabupaten Jombang. Kondisi Tutupan Hutan di Kabupaten Jombang berdasarkan indeks tutupan lahan termasuk kategori **Cukup**.

Dari hasil perhitungan Indeks Pencemaran Air, Indeks Pencemaran Udara, dan Indeks Tutupan Hutan di Kabupaten Jombang, berdasarkan rentang nilai IKLH diperoleh bahwa kualitas lingkungan hidup Kabupaten Jombang pada tahun 2016 berada pada posisi **CUKUP**, karena angka Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) yang diperoleh berada pada rentang 66 – 74 yaitu sebesar 71,09.

Berikut ini adalah ringkasan untuk Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Kabupaten Jombang tahun 2016 dan statusnya.

Tabel 2.6. Hasil Perhitungan IKLH Kabupaten Jombang

No	Kab./Kota	Penduduk	Luas Wilayah (km ²)	Indeks Penc. Udara	Indeks Penc. Air	Indeks Tutupan Lahan	IKLH
1	Jombang	1.321.223	1.160,00	77,78	60,83	73,76	71,09

Dari hasil perhitungan IKLH Jombang Tahun 2016 diatas, maka dapat dilakukan perbandingan Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Kabupaten Jombang tahun 2015 dan 2016 beserta statusnya.

Tabel 2.7. Perbandingan IKLH Kabupaten Jombang Tahun 2015 dan 2016

KABUPATEN JOMBANG		
Indeks	TAHUN 2015	TAHUN 2016
Indeks Pencemaran Air	56,60	60,83
Indeks Pencemaran Udara	91,67	77,78
Indeks Tutupan Hutan	62,60	73,76
IKLH	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup 2015	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup 2016
Nilai	69,52	71,09
Status	Status: CUKUP	Status: CUKUP



2.2 ISU PRIORITAS

2.2.1 PERTAMBANGAN

Salah satu isu yang menjadi prioritas di Kabupaten Jombang pada tahun 2016 ini berkaitan dengan pertambangan. Isu tersebut adalah penambangan liar mineral bukan logam dan bebatuan atau penambangan galian C. Isu ini diangkat sebagai isu prioritas karena pada tahun 2016 ini penambangan liar mineral bukan logam dan bebatuan cukup banyak dilakukan tanpa izin penambangan resmi dan tidak dilakukan pengelolaan pasca penambangan. Penambangan hanya dilakukan atas kesepakatan pemilik tanah dengan para penambang. Setelah tambang habis, lahan ditinggalkan dan tidak direklamasi, sehingga timbul masalah-masalah baru berupa kerusakan kualitas tanah, terjadinya keceakaan-kecelakaan akibat lokasi tambang yang berlubang, banjir dan lain sebagainya. Lebih jauh dari itu penambangan liar ini merusak kelestarian lingkungan hidup di Kabupaten Jombang dalam jangka waktu yang panjang. Pengangkatan isu ini sebagai isu prioritas diharapkan akan menjadi perhatian khusus bagi pemerintah Kabupaten Jombang dan masyarakat Kabupaten Jombang umumnya untuk menertibkan diri dan menaati segala bentuk perizinan penambangan yang ada.

KONDISI PERTAMBANGAN DI KABUPATEN JOMBANG

Kabupaten Jombang memiliki potensi mineral yang berupa tambang bukan logam dan bebatuan, diantaranya adalah tanah urug, batuan andesit, dan tanah padas. Terdapat 113,976 Ha lahan tambang galian C di Kabupaten Jombang yang tersebar di Kecamatan Kabuh, Kecamatan Kesamben, Kecamatan Perak, Kecamatan Bandar Kedungmulyo, Kecamatan Ngoro, dan Kecamatan Bareng. Lahan tambang yang telah berizin seluas 40,66 Ha dan 73,316 Ha belum berizin. Total lokasi penambang adalah 71 lokasi, dimana 6 lokasi telah berizin dan 65 lokasi belum berizin atau ilegal. Semua tambang yang berizin masih aktif melakukan penambangan. Sedangkan 65 lokasi tambang ilegal, 21 lokasi diantaranya masih aktif melakukan penambangan dan 44 lokasi sudah tidak aktif. Keadaan lokasi penambangan Tambang Galian C dapat dilihat pada **Gambar 2.1**. Penambangan yang belum berizin atau ilegal sering kali menimbulkan kerusakan lingkungan karena pasca penambangan tidak dilakukan reklamasi sehingga terdapat kubangan-kubangan yang membahayakan penduduk sekitarnya dan jika hujan turun



lokasi sangat becek atau bahkan tertutup air dan ini juga membahayakan. Hal ini dimungkinkan terjadi longsor tanah dari tanah tepian cekungan yang rapuh. Keadaan lokasi penambangan Tambang Galian C yang sudah habis tambang dan ditinggalkan pengelolaanya dapat dilihat pada **Gambar 2.2**.



Gambar 2.1. Foto Lokasi Tambang Galian

Luas pertambangan rakyat menurut jenis galian:

- Luas pertambangan tanah uruk 26,937Ha
- Luas pertambangan Sirtu 6,23 Ha
- Luas pertambangan tanah Padas 7,5 Ha



Gambar 2.2. Foto Lokasi bekas tambang yang ditinggalkan pengelolanya

✚ TEKANAN PERTAMBANGAN DI KABUPATEN JOMBANG

Beberapa hal yang menjadi tekanan dalam isu prioritas ini sehingga pertumbuhan pertambangan ilegal semakin cepat. Diantaranya 14ector pertumbuhan penduduk, 14ector percepatan informasi lokasi pertambangan baru, dan kurangnya kesadaran serta kepehaman untuk mengelola pertambangan.

Kabupaten Jombang pada tahun 2016 memiliki jumlah penduduk sebanyak 1.321.223 jiwa. Dalam pendidikan, terdapat 244.511 jiwa penduduk yang tidak bersekolah di Kabupaten Jombang. Dalam hal kondisi perekonomian, jumlah rumah tangga miskin di Kabupaten Jombang, pada tahun 2016 mencapai 74,340 rumah tangga. Pertumbuhan penduduk, tingkat pendidikan yang tidak berimbang, dan tingkat kemiskinan menyebabkan persaingan untuk mendapatkan pekerjaan yang tidak berimbang. Kurangnya lapangan pekerjaan yang sesuai dengan tingkat



pendidikan memacu perorangan untuk membuka lapangan pekerjaan yang baru, yang lebih mudah dilaksanakan dan cepat mendapatkan pendapatan. Alternatif termudah adalah menjadi buruh kasar di pertambangan.

Mudah diperolehnya informasi tentang potensi sumber daya alam di Kabupaten Jombang yang memiliki kekayaan tambang dan informasi lokasi penambangan menyebabkan terjadinya alih profesi dari bertani menjadi penambang. Mudanya informasi untuk mendapatkan pekerja tambang dan lowongan kerja buruh kasar menyebabkan pelaksanaan penambangan menjadi mudah untuk dilakukan tanpa prosedur yang berbelit-belit.

Kurangnya kesadaran dan kephahaman dalam melakukan izin terhadap segala kegiatan dan/atau usaha yang dilakukan menambah kemudahan bagi investor nakal untuk berfikir hanya mencari keutnungan semata tanpa berfikir dampak yang ditimbulkan di kemudian hari. Sehingga penambangan dilakukan secara besar-besar tanpa memperhatikan daya dukung di sekitar lokasi tambang maka terjadilah penambangan liar di beberapa tempat yang tidak berizin.

RESPON PENANGANAN PERTAMBANGAN DI KABUPATEN JOMBANG

Langkah awal yang dilakukan Pemerintah Daerah Kabupaten Jombang adalah melakukan inspeksi di lokasi-lokasi penambangan belum berizin atau ilegal. Inspeksi ini bertujuan untuk mengetahui keadaan pertambangan tersebut selain untuk menegur pemilik tanah dan para penambang atas kegiatannya. Hasil inspeksi menyarankan kepada penambang untuk segera mengurus izin usaha pertambangan. Dalam proses izin usaha pertambangan ini mewajibkan penambangan memiliki dokumen lingkungan berupa Amdal atau UKL-UPL sesuai yang dipersyaratkan dalam Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup No. 05 Tahun 2012 tentang Rencana Usaha Dan/Atau Kegiatan Yang Wajib Memiliki Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup.

Di dalam dokumen lingkungan tersebut penambang wajib mencantumkan upaya pengelolaan dan pemantauan lingkungan yang dilakukan pada kegiatannya. Termasuk di dalamnya adalah upaya untuk pengelolaan lahan pasca tambang.



Dengan adanya dokumen lingkungan ini diharapkan, dampak yang ditimbulkan akibat penambangan dapat diminimalkan. Selain dengan membuat dokumen lingkungan, Pemerintah Daerah Kabupaten Jombang melalui Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Jombang melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan upaya pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup seperti yang telah tertulis dalam dokumen lingkungan. Pengawasan ini dapat berupa pemantauan secara langsung atau/dan mewajibkan penambang melaporkan pelaksanaan upaya pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup. Pelanggaran atas upaya pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup akan dikenakan sanksi.

Untuk menangani lokasi pertambangan yang telah terlanjur ditinggalkan penambangnya, pemerintah daerah Kabupaten Jombang merencanakan untuk melakukan reklamasi lahan dengan penghijauan dan reboisasi. Upaya ini dilakukan untuk mengembalikan kesuburan tanah sehingga lahan dapat difungsikan kembali sebagai areal pertanian dan perkebunan.

Pada tahun 2016 Pemerintah Daerah Kabupaten Jombang melalui Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Jombang telah membuat Dokumen Kajian Reklamasi Lahan Bekas Kegiatan Pengelolaan Sumber Daya Alam. Kajian reklamasi ini diharapkan dapat mendukung sistem pengambilan keputusan menyangkut optimalisasi pemanfaatan lahan secara umum, penanganan dampak usaha kegiatan pertambangan dan mengurangi degradasi lingkungan di Kabupaten Jombang. Kajian reklamasi ini disusun berdasarkan karakteristik geofisiknya agar lebih berdaya guna, berwawasan lingkungan dan berkelanjutan.

Ruang lingkup kajian yang dilakukan meliputi identifikasi kondisi/status kerusakan lingkungan dan pemetaan lahan bekas penambangan dengan contoh kasus di Desa Pulorejo Kecamatan Ngoro Kabupaten Jombang mengingat banyaknya lokasi bekas pertambangan rakyat tidak berizin pada lokasi tersebut. Kegiatan pasca tambang demplot (demonstration plot) di Desa Pulorejo direncanakan seluas 0,55 ha yang digunakan sebagai tempat wisata berupa kolam pancing/kolam ikan dan dapat dimanfaatkan sepanjang musim baik musim hujan ataupun musim kemarau.



2.2.2 **PENANGANAN SAMPAH**

Pertumbuhan penduduk yang semakin tinggi dan semakin bertambahnya tingkat konsumsi masyarakat serta aktivitas lainnya. Hal ini tentunya akan berdampak pada terjadinya pertambahan volume buangan/sampah yang dihasilkan. Meski setiap hari manusia selalu menghasilkan sampah, namun manusia pula yang paling menghindari sampah. Orang kebanyakan hanya bisa membuangnya, namun kurang peduli bagaimana barang sisa itu seharusnya diperlakukan. Tidaklah heran, akibat kelalaian dan kurang pedulian terhadap sampah, kita pula yang menuai bencana yang ditimbulkan oleh sampah yang akhirnya menjadi permasalahan lingkungan serius yang harus ditangani. Dapat difahami bahwa kondisi pengelolaan persampahan dalam dekade terakhir ini semakin memburuk, hal tersebut dikarenakan kemampuan pendanaan dan manajemen Pemerintah daerah (Pemda) di masa krisis ekonomi dan masa transisi manajemen pemerintahan ke otonomi daerah untuk pengelolaan persampahan menurun. Era otonomi daerah menciptakan iklim kemandirian di pemerintah daerah, sedemikian rupa pola manajemen daerah harus lebih efisien namun tidak mengalahkan kaidah- kaidah non ekonomi seperti halnya aspek sosial, budaya ataupun pemeliharaan lingkungan hidup.

Dengan latar belakang kondisi yang ada, diperlukan peningkatan efektifitas dan efisiensi dalam penanganan persampahan yang ideal, melalui pengelolaan secara terpadu, dan adanya koordinasi seluruh pihak dalam satu sistem. Diperlukan peningkatan kualitas dan kinerja dan pengelolaan di daerah, serta kerjasama antar lembaga Pemerintah yang terkait. Untuk itu Pemerintah Kabupaten Jombang melalui Satker Dinas PU, Cipta Karya, Kebersihan dan Pertamanan, menyelenggarakan kegiatan Rencana Induk Persampahan pada tahun 2013.

Permasalahan sampah di Kabupaten Jombang sudah dimulai sejak awal yaitu dari sumber sampah. Hal ini dikarenakan peningkatan jumlah penduduk dari tahun ke tahun menyebabkan tingginya volume sampah yang dihasilkan, baik dari keperluan individu maupun dari kegiatan-kegiatan penunjang lain seperti pasar, perkantoran dll.

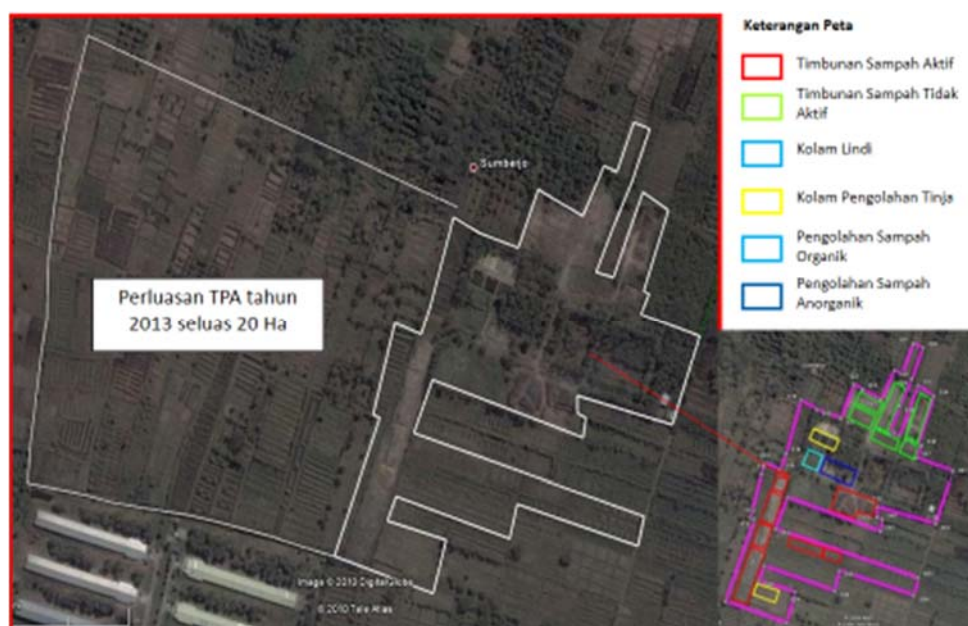


Permasalahan yang disebabkan oleh tingginya volume sampah tersebut terus berlanjut kepada permasalahan lain yang mengikutinya seperti kebutuhan akan pewardahan sampah yang layak, metode pengumpulan yang sesuai dan teratur, lahan untuk TPS beserta penanganan sampah untuk sementara sebelum diangkut ke TPA, kebutuhan akan armada yang layak beserta sistem transportasinya yang memadai sampai dengan masalah penyediaan lahan untuk TPA yang layak dan tidak mencemari lingkungan sekitar.

Selain dari permasalahan-permasalahan kebutuhan di dalam penanganan sampah, masih ada permasalahan-permasalahan lain yang tidak kalah pentingnya yaitu permasalahan pembiayaan operasional, permasalahan kelembagaan yang mengatur dan menangani masalah sampah sampai dengan masalah hukum dan peraturan yang menjadi landasan pengelolaan sampah di Kabupaten Jombang.

✚ **Kondisi Eksisting Tempat Pengolahan/Pemrosesan Akhir (TPA) Sampah**

Pengelolaan sampah di TPA Banjardowo Kabupaten Jombang saat ini dengan menggunakan sistem *controlled landfill*. Berikut siteplan dan kondisi eksisting TPA Banjardowo :



Gambar 2.3. Siteplan TPA Kabupaten Jombang



Gambar 2.4 Kegiatan di TPA Kabupaten Jombang



Peningkatan pengelolaan TPA secara baik dan terpadu juga diikuti oleh pengelolaan persampahan di Kabupaten Jombang yang terintegrasi mulai dari pengumpulan, pewadahan dan pengangkutan. Hal ini juga diikuti dengan semangat 3 R (*Reduce, Reuse, dan Recycle*).

Pengelolaan sampah dengan menggunakan Tempat Pengolahan/pemrosesan Akhir (TPA) sebagai tempat pemusnahan sampah bagi Kabupaten Jombang dirasakan kurang efektif karena selain biaya operasionalnya yang sangat besar juga memerlukan lahan yang luas, yang mana akhir-akhir ini bagi Kabupaten Jombang menjadi kendala karena terbatasnya lokasi/lahan yang sesuai dengan TPA. Dengan demikian diperlukan adanya alternatif lain sebagai sarana pengolahan sampah di Kabupaten Jombang. Selain pemusnahan sampah dengan cara pembakaran, aktivitas yang masih dilakukan di TPA adalah pengolahan sampah menjadi kompos dan pencacahan sampah plastik.

Tekanan Terhadap Penanganan Pengelolaan Sampah di Kabupaten Jombang

Permasalahan yang masih dihadapi dalam pengelolaan dan penanganan sampah Kabupaten Jombang adalah sebagai berikut :

1. Peningkatan jumlah penduduk di Kabupaten Jombang menyebabkan peningkatan timbulan sampah domestik yang semakin meningkat.
2. Perilaku masyarakat yang masih rendah dalam menangani/ melakukan pengelolaan sampah. Masyarakat merasa telah melakukan kewajibannya dalam pengelolaan sampah yaitu dengan membayar retribusi, sehingga permasalahan sampah sepenuhnya telah diserahkan kepada Pemerintah Kabupaten.
3. Keterlibatan pengelola sebuah kawasan untuk pengelolaan sampah secara mandiri masih belum sepenuhnya dilakukan, sehingga proses pembinaan pemberdayaan masyarakat dalam mengelola sampah masih belum optimal. Pembinaan masyarakat baru dilaksanakan pada kawasan tertentu saja.
4. Masih banyak masyarakat yang membuang sampah di sembarang tempat.



5. Sampah banyak yang tidak terangkut petugas pengumpul atau tertinggal di bak sampah karena warga membuang sampah setelah petugas pengumpul mengambil sampah, akibatnya sampah menumpuk di bak sampah.

Peran masyarakat dalam tahap pengumpulan sampah ini meringankan biaya operasional yang harus disediakan Dinas, namun sistem ini memiliki kelemahan :

- a. Sebagian besar masyarakat merasa harus melakukan pembayaran retribusi ganda, di lingkungan RT/RW dan retribusi pemerintah.
- b. Beberapa masyarakat merasa kesulitan untuk mendapatkan jasa pengangkut sampah walaupun bersedia membayar iuran kebersihan.
- c. Beberapa masyarakat yang berada atau tinggal berdekatan dengan transfer depo atau kontainer dan yang menunggak pembayaran jasa swasta, memilih untuk membuang sampahnya sendiri secara pribadi.
- d. Beberapa masyarakat yang tidak mampu dan yang hidup jauh dari jangkauan akses pelayanan kebersihan berpotensi membuang sampahnya atau menimbun sampah di pinggir sungai, sungai, saluran air, halaman rumah dan membakar sampah.
- e. Tidak terikatnya atau tidak ada peraturan yang jelas yang mengatur petugas pengangkut sampah di lingkungan RT/RW berakibat pada pengangkutan sampah yang dilakukan tidak setiap hari (tergantung petugas) sehingga di beberapa daerah walaupun telah membayar jasa perorangan sampahnya tetap menumpuk di depan rumah.

Response Penanganan Pengelolaan Sampah di Kabupaten Jombang

Langkah awal yang dilakukan Pemerintah Daerah Kabupaten Jombang adalah melakukan upaya-upaya **pengelolaan TPA semaksimal mungkin** serta melakukan upaya-upaya yang dapat **meningkatkan kesadaran masyarakat untuk mengurangi sampah mulai dari sumbernya.**

❖ Inovasi Pengelolaan TPA

Inovasi Pengelolaan TPA di Kabupaten Jombang diantaranya meliputi:

1. Peningkatan secara bertahap sistem pengolahan sampah dari controlled landfill menjadi sanitary landfill.
2. Peningkatan Wilayah Urban Terlayani



3. Peningkatan Fasilitas Penunjang TPA
4. Peningkatan Upaya Pengelolaan Dampak Lingkungan di TPA

Pemerintah Daerah Kabupaten Jombang secara legal mengeluarkan beberapa Produk Hukum dan Kebijakan di Bidang Persampahan diantaranya:

1. Perda No. 9 tahun 2010 tentang Ketertiban Umum.
2. Perda No. 6 tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah
3. SK Kepala BLH Jombang No. 188/1/415.43/2012 tanggal 6 Januari 2012 Tentang Pembentukan Bank Sampah Induk di Kabupaten Jombang

Dalam rangka mewujudkan TPA Banjardowo menjadi sistem *Sanitary Landfill* Pemerintah Kabupaten Jombang Telah mendapat kepercayaan dari Pemerintah Jerman berkerjasama dengan Kementerian PU melalui **Program KfW** mulai tahun 2010, dengan total investasi Rp. ± 138,7 M, yang digunakan untuk :

- Pembangunan TPA baru-*Sanitary Landfill*,
- Pembangunan Instalasi Pemilahan,
- Pembangunan Instalasi Pengomposan,
- Penutupan dan Rehabilitasi TPA lama.

TPA dengan sistem *Sanitary Landfill* direncanakan mulai beroperasi pada Tahun 2019 dengan perkiraan usia pakai sel ke-1 selama 6-12 tahun. Berikut adalah Siteplan Rencana Pengembangan TPA dengan sistem Sanitary Landfill.



Gambar 2.5. SITE PLAN RENCANA PENGEMBANGAN TPA
DENGAN SISTEM SANITARY LANDFILL

Sambil menunggu terealisasinya sel sampah dengan sistem Sanitary Landfill, maka saat ini Pemerintah Kabupaten Jombang juga telah melakukan percobaan melalui sel sampah mini seluas $\pm 0,75$ Ha yang dioperasikan dengan sistem *sanitary landfill* seperti gambar berikut.



Pelapisan Tanah Urug



Penataan Lapisan Kedap Air Untuk Mencegah Lindi Masuk ke Tanah

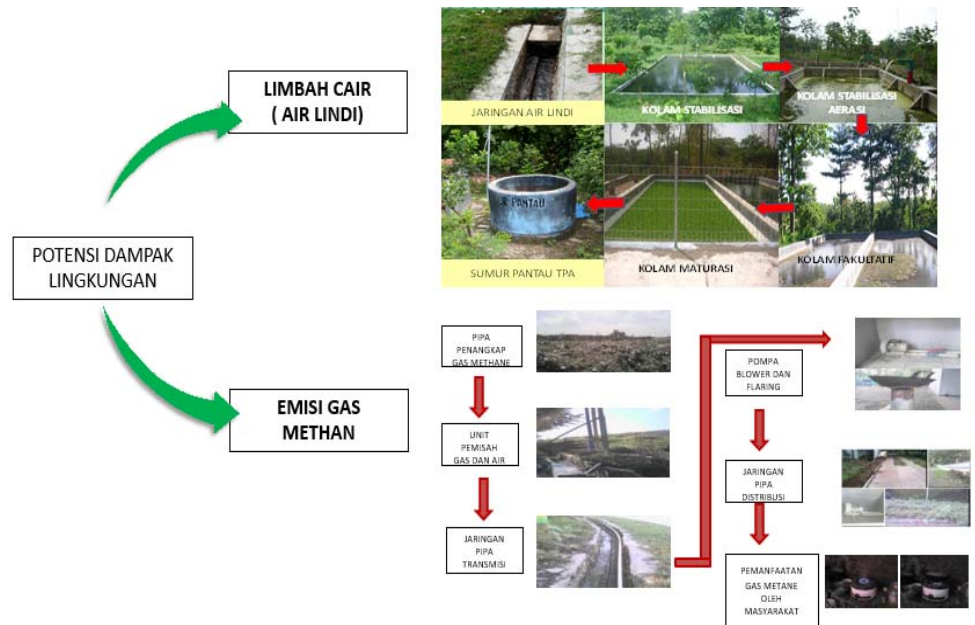


Pemasangan Pipa Gas Methan



Pemasangan Jaringan Perpipaan Lindi

Terkait upaya pengendalian dampak lingkungan di lokasi TPA Banjardowo Kabupaten Jombang terlihat seperti Gambar di bawah ini:



Gambar 2.6. Upaya Pengendalian Dampak Lingkungan

❖ Peran Serta Masyarakat Untuk Mereduksi Sampah Mulai Dari Sumber Sampah

Keterlibatan masyarakat terkait kesadaran pengelolaan sampah dari sumbernya diwujudkan dalam Kegiatan Bank Sampah. Pengelolaan beberapa Bank Sampah di masyarakat dikoordinir oleh Bank Sampah Induk Kabupaten Jombang. Jumlah Bank Sampah Di Kabupaten Jombang pada akhir tahun 2016 sebanyak 100 buah dengan nama-nama Bank Sampah sebagai berikut:



Tabel 2.8. Bank Sampah Di Kabupaten Jombang

No.	Nama Bank Sampah	Alamat	Legalitas	Waktu Pendirian
1	Bank Sampah Jombang Beriman	Jl. Prof. Dr. Murcholish Madjid No 80		20-Jan-16
2	Bank Sampah Jombang Beriman	Jl. Madura No. 85	SK Kepala BLH No. 188/1/415.43/2012	16-Jan-12
3	Bank Sampah Jombang Beriman	Jl. Arif Rahman Hakim No 7	SK Kepala BLH No. 188/1/415.43/2012	16-Jan-12
4	Bank Sampah Jombang Beriman	Jl. Raya Mojokrapak 8 Tembelang Jombang	SK Kepala BLH No. 188/1/415.43/2012	16-Jan-12
5	Bank Sampah Jombang Beriman	Desa Wonosalam	SK Kepala BLH No. 188/1/415.43/2012	16-Jan-12
6	Bank Sampah Jombang Beriman	Jl. Pattimura	SK Kepala BLH No. 188/1/415.43/2012	16-Jan-12
7	Bank Sampah Jombang Beriman	Jl. Diponegoro 8 Jombang	SK Kepala BLH No. 188/1/415.43/2012	16-Jan-12
8	Bank Sampah Jombang Beriman	Kelurahan Jelakombo	SK Kepala BLH No. 188/1/415.43/2012	16-Jan-12
9	Bank Sampah Jombang Beriman	Perum Sambong Perml	SK Kepala BLH No. 188/1/415.43/2012	16-Jan-12
10	Bank Sampah Jombang Beriman	Jl. Mayjen sungkono	SK Kepala BLH No. 188/1/415.43/2012	16-Jan-12
11	Bank Sampah Jombang Beriman	Jl. Halmahera	SK Kepala BLH No. 188/1/415.43/2012	16-Jan-12
12	Bank Sampah Jombang Beriman	Jl. KH. Wahid Hasyim	SK Kepala BLH No. 188/1/415.43/2012	16-Jan-12



No.	Nama Bank Sampah	Alamat	Legalitas	Waktu Pendirian
13	Bank Sampah Jombang Beriman	Jl. Diponegoro	SK Kepala BLH No. 188/1/415.43/2012	16-Jan-12
14	Bank Sampah Jombang Beriman	Jl. Otto Iskandardinata	SK Kepala BLH No. 188/1/415.43/2012	16-Jan-12
15	Bank Sampah Jombang Beriman	Ceweng Diwek Jombang	SK Kepala BLH No. 188/1/415.43/2012	16-Jan-12
16	Bank Sampah Jombang Beriman	Jl.Dr. Wahidin Sudirohuso	SK Kepala BLH No. 188/1/415.43/2012	16-Jan-12
17	Bank Sampah Jombang Beriman	Jl. Dr. Sutomo	SK Kepala BLH No. 188/1/415.43/2012	16-Jan-12
18	Bank Sampah Jombang Beriman	Jl. Dr. Wahidin Sudorohusodo	SK Kepala BLH No. 188/1/415.43/2012	16-Jan-12
19	Bank Sampah Jombang Beriman	Jl. Otto Iskandardinata No.10	SK Kepala BLH No. 188/1/415.43/2012	16-Jan-12
20	Bank Sampah Jombang Beriman	Perum Kepuhpermai	SK Kepala BLH No. 188/1/415.43/2012	16-Jan-12
21	Bank Sampah Jombang Beriman	Jl.Pattimura 63 Jombang	SK Kepala BLH No. 188/1/415.43/2012	16-Jan-12
22	Bank Sampah Jombang Beriman	KH. Ahmad Dahlan No.1	SK Kepala BLH No. 188/1/415.43/2012	16-Jan-12



No.	Nama Bank Sampah	Alamat	Legalitas	Waktu Pendirian
23	Bank Sampah Jombang Beriman	Jl. Seruni 34 Mojoagung	SK Kepala BLH No. 188/1/415.43/2012	16-Jan-12
24	Bank Sampah Jombang Beriman	Jl. Gubernur Suryo	SK Kepala BLH No. 188/1/415.43/2012	16-Jan-12
25	Bank Sampah Jombang Beriman	Jl. Delima	SK Kepala BLH No. 188/1/415.43/2012	16-Jan-12
26	Bank Sampah Jombang Beriman	Blok G / 12 Perum Pulo Asri	SK Kepala BLH No. 188/1/415.43/2012	16-Jan-12
27	Bank Sampah Jombang Beriman	Jl. Gatoto subroto	SK Kepala BLH No. 188/1/415.43/2012	16-Jan-12
28	Bank Sampah Jombang Beriman	Jl. A.Yani	SK Kepala BLH No. 188/1/415.43/2012	16-Jan-12
29	Bank Sampah Jombang Beriman	Bandarkedungmulyo Jombang	SK Kepala BLH No. 188/1/415.43/2012	16-Jan-12
30	Bank Sampah Jombang Beriman	Ponpes Rejoso peterongan Jombang	SK Kepala BLH No. 188/1/415.43/2012	16-Jan-12
31	Bank Sampah Jombang Beriman	Jl. KH Hasim Asyari 109 Jombang	SK Kepala BLH No. 188/1/415.43/2012	16-Jan-12
32	Bank Sampah Jombang Beriman	Jl. Wahab Chasbullah	SK Kepala BLH No. 188/1/415.43/2012	16-Jan-12



No.	Nama Bank Sampah	Alamat	Legalitas	Waktu Pendirian
33	Bank Sampah Jombang Beriman	Jl. Imam Bonjol 132 Jombang	SK Kepala BLH No. 188/1/415.43/2012	16-Jan-12
34	Bank Sampah Jombang Beriman	Jl. Raya Mojoagung 25	SK Kepala BLH No. 188/1/415.43/2012	16-Jan-12
35	Bank Sampah Jombang Beriman	Jl. KH Hasyim Asyari	SK Kepala BLH No. 188/1/415.43/2012	16-Jan-12
36	Bank Sampah Jombang Beriman	Desa Keboan Kudu	SK Kepala BLH No. 188/1/415.43/2012	16-Jan-12
37	Bank Sampah Jombang Beriman	Desa Jombok Ngoro	SK Kepala BLH No. 188/1/415.43/2012	16-Jan-12
38	Bank Sampah Jombang Beriman	Desa Mojokrapak Tembelang	SK Kepala BLH No. 188/1/415.43/2012	16-Jan-12
39	Bank Sampah Jombang Beriman	Desa Spanyol Gudo	SK Kepala BLH No. 188/1/415.43/2012	16-Jan-12
40	Bank Sampah Jombang Beriman	Jl Kartini No. 1		16-Jan-12
41	Bank Sampah Jombang Beriman	Desa Karang	SK Kepala Desa Karang No. 188/16/415.72.05/2016	08-Jul-16
42	Bank Sampah Jombang Beriman	Desa Banjaragung	SK Kepala Desa Banjaragung No. 188/23/415.72.13/2016	01-Jun-16



No.	Nama Bank Sampah	Alamat	Legalitas	Waktu Pendirian
43	Bank Sampah Jombang Beriman	Desa Ngampungan	Sk Kepala Desa Ngampungan No : 188/24/415.72.08/2016	02-Okt-16
44	Bank Sampah Jombang Beriman	Desa Ngampungan	Sk Kepala Desa Ngampungan No : 188/24/415.72.08/2016	02-Okt-16
45	Bank Sampah Jombang Beriman	Desa Ngampungan	Sk Kepala Desa Ngampungan No : 188/24/415.72.08/2016	02-Okt-16
46	Bank Sampah Jombang Beriman	Desa Pakel	SK. Kepala Desa Pakel No. : 188/15/415.72.6/2016	03-Okt-16
47	Bank Sampah Jombang Beriman	Jl. Anjasmoro No. 313 Ds. Pulosari	SK. Kepala Desa Pulosari No. : 188/25/415.72.10/2016	07-Jun-16
48	Berkah Recycle	Dsn. Dadirejo Ds. Ngrimbi	SK. Kepala Desa Ngrimbi No. : 188/39/415.72.11/2016	26-Agu-16
49	Arto Moro	Dsn. Mundusewu Ds. Mundusewu	SK. Kepala Desa Mundusewu No. : 188/11/415.72.07/2016	04-Okt-16
50	Lestari Jaya	Dsn. Jlopo Ds. Tebel	SK. Kepala Desa Tebel No. : 188/19/415.72.3/2016	05-Okt-16



No.	Nama Bank Sampah	Alamat	Legalitas	Waktu Pendirian
51	Sumber Rejeki	Desa Mojotengah	SK. Kepala Desa Mojotengah No. : 188/23/415.72.2/2016	
52	Jaya Lestari	Dsn. Jenisgelaran Ds. Jenisgelaran	SK. Kepala Desa Jenisgelaran No. : 188/13/415.72.9/2016	02-Okt-16
53	Bersinar	Dsn. Banjarsari Ds. Bareng	SK. Kepala Desa Bareng No. : 188/23/415.72.1/2016	22-Nov-16
54	Berseri	Dsn. Kedungsuruh Ds. Kebondalem	SK. Kepala Desa Kebondalem No. : 188/9/415.72.4/2016	10-Okt-16
55	Cinta Kasih	Desa Nglebak	SK. Kepala Desa Nglebak No. : 188/9/415.72.12/2016	04-Okt-16
56	Guyub Rukun	Tondowulan	SK. Kepala Desa Tondowulan no. 26 tahun 2016	01-Okt-16
57	Puri Indah	Puri Semanding	Program dari Kabupaten	07-Okt-16
58	Karya Mandiri	Darurejo	SK. Kepala Desa Darurejo No. 188/17/415.61.04/2016	23-Sep-16
59	Harum Jaya	Plabuhan	SK. Kepala Desa No 188/09/415.61.08/08/X/2016	Okt-16
60	Sumber Rezeky	Jatimlerek	SK. Kepala Desa No 188/29/415.61.11/2016	30-Sep-16



No.	Nama Bank Sampah	Alamat	Legalitas	Waktu Pendirian
61	Bangsri Jaya	Bangsri	SK. Kepala Desa No. 07 tahun 2016	05-Okt-16
62	Sumber Asri	Gebang Bunder	SK. Kepala Desa No. 208/415.12/X/2016	05-Okt-16
63	Barokah	Plandaan		
64	Karang Mojo	Karangmojo		
65	Sumber Makmur	Sumberjo		30-Sep-16
66	Bank Sampah Bangkit Jaya	Mojolegi Dukuhmojo	SK. Kepala Desa No. 188/12/415.65.7/9/2016	Sep-16
67	Bank Sampah An- Nadzif	Murukan	SK Kepala Desa No. 188/012/415.65.16/2016	15-Sep-16
68	Bank Sampah abadi	Seketi	SK Kepala Desa No. 188/11/415.65.18/2016	15-Sep-16
69	Bank Sampah Bahagia	Janti	SK. Kepala Desa No 188/415.65/2016	05-Sep-16
70	Bank Sampah Sumber Rejeki	Tanggal Rejo	SK. Kepala Desa No. 188/04/415.65.06/2016	26-Sep-16
71	Bank Sampah Karya Sehat	Kedunglumpang	SK. Kepala Desa No. 188/09/415.65.17/2016	29-Sep-16
72	Bank Sampah Cemerlang	Karangwinongan	SK. Kepala Desa No. 188/415.65/2016	26-Sep-16



No.	Nama Bank Sampah	Alamat	Legalitas	Waktu Pendirian
73	Bank Sampah Mulur	Mancilan	SK. Kepala Desa No. 188/15/415.65.03/2016	04-Okt-16
74	Bank sampah Trisno	Mojotrisno	SK. Kepala Desa No. 188/17/415.65/2016	29-Feb-16
75	Bank Sampah Sugih Sehat	Johowinong	SK. Kepala Desa No. 188/12/415.65.0.7/2016	25-Apr-16
76	Bank Sampah Larva	Betek	SK. Kepala Desa No. 188/14/4/15.65.11/2016	5-Okt-16
77	Bank Sampah Tenteram	Miagan	SK. Kepala Desa No. 188/20/4/15.65.1/2016	5-Okt-16
78	Bank Sampah Sido Mulur	Sidokaton Kec. Kudu	SK. Kepala Desa No. 188/11/415.63.01/2016	7-Okt-16
79	Bank Sampah srikandi	Desa Tapen Kec. Kudu	SK. Kepala Desa No. 188/12/415.63.02/2016	29-Sep-16
80	Bank Sampah Bakalan Rayung Asri	Bakalan Rayung	SK. Kepala Desa No. 141/11/415.63.03/2016	7-Okt-2016
81	Bank Sampah Lingkungan Sehat	Randu Watang	SK. Kepala Desa No. 141/14/415.63.04/2016	5-Okt-16
82	Bank Sampah Dahlia Sumber Teguh	Sumber Teguh	SK. Kepala Desa No. 141/11/415.63.05/216	25-Sep-16



No.	Nama Bank Sampah	Alamat	Legalitas	Waktu Pendirian
83	Bank Sampah Sekar Arum	Kudu Banjar	SK. Kepala Desa No. 24 Tahun 2016	27-Sep-16
84	Bank Sampah Menturus Sae	Menturus	SK. Kepala Desa No. 10 tahun 2016	20-Juli-2016
85	Bank Sampah Made Sejahtera	Made	SK. Kepala Desa No. 141/23/415.63.08/2016	3-Okt-2016
86	Bank Sampah Karya Lestari	Kepuhrejo Kec. Kudu	SK. Kepala Desa No. 141/13/416.63.09/2016	27-Sep-16
87	Bank Sampah Surya Mandiri	Bendungan	SK. Kepala Desa No. 188/12/415.63.10/2016	28-Okt-2016
88	Bank Sampah Sri Rejeki	Katemas	SK. Kepala Desa No. 141/31/415.63.11/2016	7-Okt-2016
89	Bank Sampah Sri Rejeki	Dsn. Kambangan Ds.Ngusikan, Kec. Ngusikan	SK. Kepala Desa No. 188/33/415.64.4/2016	9-Agts-2016
90	Bank Sampah Harapan Baru	Balongbesuk	SK. Kepala Desa No. 29 Th 2016	15-Maret-2016
91	Bank Sampah Barokah	Sambirejo	SK. Kepala Desa No. 10 Th 2016	20-Agts-2016
92	Bank Sampah Sumber Rejeki	Sukosari	SK. Kepala Desa No. 21 Th 2016	20-Agts-2016
93	Bank Sampah Sejahtera	Sumber Mulyo	SK. Kepala Desa No. 09 Th 2016	20-Agts-2016
94	Bank Sampah Berseri	Tambar	SK. Kepala Desa No. 12 Th 2016	1-Okt-2016
95	Bank Sampah Berkah	Sawiji	SK. Kepala Desa No. 20 Th 2016	20-Juli-2016
96	Bank Sampah Sumber Rejeki	Ds. Losari Kec. Ploso	SK. Kepala Desa No. 48 Th 2016	10-Jan-16



No.	Nama Bank Sampah	Alamat	Legalitas	Waktu Pendirian
97	Bank Sampah Guyup Rukun	Pandan Blole Kec. Ploso	SK. Kepala Desa No. 22 Th 2016	30-Okt-2016
98	Bank Sampah Sarwo Asih	Kedung Dowo Kec. Ploso	SK. Kepala Desa No. 26 Th 2016	02-Sep-16
99	Bank Sampah Asri Lestari	Tanjung Kramat Kec. Ploso	SK. Kepala Desa No. 29 Th 2017	31-01-2017
100	Bank Sampah Tanjung Asri	Pager Tanjung Kec. Ploso		9-Okt-2016

Keberadaan Bank Sampah ini diharapkan semakin tahun semakin berkembang untuk tiap Desa di wilayah Kabupaten Jombang mengingat Bank Sampah saat ini adalah salah satu cara yang paling efektif untuk mereduksi timbulan sampah dari sumbernya. Hal ini sesuai dengan program Bupati Jombang yaitu “**1 desa 1 bank sampah**”. Dengan adanya Bank Sampah maka secara tidak langsung akan meningkatkan kesadaran masyarakat untuk merubah pola hidup dan kebiasaan harian menjadi berwawasan lingkungan dan tidak banyak menghasilkan sampah.



Gambar 2.7 Aktivitas Di Bank Sampah Kabupaten Jombang



D. PENANGANAN B3

Kabupaten Jombang khususnya di Kecamatan Sumobito dan Kesamben, telah banyak berkembang usaha rakyat yang sebagian besar adalah usaha kecil (home industry) yang memanfaatkan slag aluminium sebagai bahan baku untuk didaur ulang menjadi batangan/lempengan aluminium yang bernilai ekonomis. Industri daur ulang slag aluminium ini telah ada sejak 30 tahun yang lalu.

Berdasarkan kapasitas produksinya, jenis industri daur ulang slag aluminium di Kabupaten Jombang terbagi menjadi industri besar, industri sedang, dan industri kecil.

Adanya perubahan Undang-Undang Lingkungan Hidup di tahun 2009, yaitu dengan terbitnya Undang-Undang RI No. 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup diikuti Peraturan Pemerintah RI No. 27 tahun 2012 tentang Izin Lingkungan, Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup RI No. 05 tahun 2012 tentang Jenis Rencana Usaha dan/atau Kegiatan yang Wajib Memiliki AMDAL, Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup RI No. 16 tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Dokumen Lingkungan Hidup, Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup RI No. 17 tahun 2012 tentang Pedoman Keterlibatan Masyarakat dalam Proses Analisis Dampak Lingkungan Hidup dan Izin Lingkungan, sebagian besar dari para pengusaha tersebut hampir tidak ada yang memiliki izin lingkungan.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah RI No. 85 tahun 1999 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah No. 18 tahun 1999 tentang Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun, pada lampiran I, slag aluminium termasuk dalam kategori Limbah B3, sehingga bahan baku dalam kegiatan usaha masyarakat tersebut tergolong sebagai Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun atau (LB3). Dalam rangka hal tersebut, maka Pemerintah Kabupaten Jombang menyediakan suatu kawasan khusus untuk industri kecil pemanfaat dan pengolah LB3 khusus slag aluminium, yaitu Lingkungan Industri Kecil (LIK) Daur Ulang Slag Aluminium yang bertempat di Kecamatan Sumobito dan Kecamatan Kesamben Kabupaten Jombang.



Lingkungan Industri Kecil (LIK) daur ulang slag alumunium merupakan suatu kawasan industri khusus dan terbatas daur ulang slag alumunium berskala kecil di Kabupaten Jombang yang meliputi 14 desa di Kecamatan Sumobito dan 5 desa di Kecamatan Kesamben.

Sebagian besar usaha industri daur ulang slag alumunium yang terdapat di Kecamatan Sumobito dan Kecamatan Kesamben Kabupaten Jombang merupakan usaha turun temurun dari generasi sebelumnya, sehingga perizinan dan upaya pengelolaan lingkungan yang dilakukan masih bersifat seadanya. Beberapa langkah telah dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Jombang untuk mengelola keberadaan industri ini, diantaranya adalah :

1. Pada tahun 2009 ditetapkan zonasi wilayah melalui Peraturan Daerah No. 21 tahun 2009 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Jombang, dimana di Wilayah Kecamatan Sumobito dan Kesamben telah ditetapkan sebagai zona khusus untuk sentral kegiatan daur ulang slag aluminium.

Dalam penjelasan RTRW Kabupaten Jombang disebutkan bahwa kedua Kecamatan tersebut dinyatakan sebagai zona khusus terbatas, dengan pengertian adalah sebagai area yang dikhususkan untuk kegiatan daur ulang slag aluminium dan terbatas dalam jumlah usaha/ pengusaha mengingat aktivitas tersebut berkaitan dengan pemanfaatan LB3 yang memiliki tingkat resiko dan biaya yang tinggi dalam pengelolaan terhadap dampak yang ditimbulkan baik ke lingkungan maupun kesehatan makhluk hidup (manusia, hewan dan tumbuhan).

2. Pada tahun 2014 diberikan fasilitas Penyusunan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) Kawasan bagi Kegiatan Lingkungan Industri Kecil (LIK) Daur Ulang Slag Aluminium di Kecamatan Kesamben dan Kecamatan Sumobito, yang memberikan panduan dalam melakukan Rencana Pengelolaan Lingkungan dan Rencana Pemantauan Lingkungan (RKL-RPL).



Selanjutnya AMDAL Kawasan bagi Kegiatan LIK Daur Ulang Slag Aluminium ditindaklanjuti dengan penyusunan UKL-UPL oleh para pelaku usaha dan melakukan proses kelengkapan Perizinan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) serta izin operasional kegiatan penunjang lainnya.

Tabel 2.9 Data Pengusaha LIK di Kecamatan Kesamben

No	Nama Penanggungjawab	Nama Perusahaan	Alamat
1	Jarot Subiyantoro	UD Surya Abadi	Dusun Carang Puspo, Desa Carang Rejo
2	Fatchurahman Yusro SP	UD Restu Ibu Alumunium	Desa Carangrejo No.1
3	Suwardi H.	UD. Logam Mulia	Dusun Carangrejo RT 04 RW 01, Desa Carangrejo
4	Eko Hadi Kuswoyo	UD. Sumber Lancar	Desa Carangrejo No.1 RT 01 RW 04
5	Didik Purwanto	-	Dusun Kandangan, Desa Carangrejo
6	Daman	-	Dusun Carang Puspo RT 01 RW 02, Desa Carang Rejo
7	Nur Said	-	Dusun Carang Puspo, Desa Carang Rejo
8	Masbukhin	-	Dusun Carang Puspo, Desa Carang Rejo
9	Saji	-	Desa Carangrejo
10	Hartono	-	Desa Carangrejo
11	Wagito	-	Dusun Carang Puspo, Desa Carangrejo
12	Ahmat Safari	-	Desa Jombok
13	Mas'ud	Mitra Logam	Desa Jombok
14	Eko Subandi	UD Barokah	Desa Jombok
15	Suwari	UD Fatim Mulya	Desa Jombok
16	Ach. Choiron SA	Barokah	Desa Jombok
17	Suntoro	UD Hamdalah	Desa Jombok
18	Ifa Rudianto	Berkah	Desa Jombok
19	H. Sukarno	-	Dusun Ploso Rejo, RT 01 RW 02, Desa Jombok
20	Masykuri	Anugerah Ilahi	Desa Jombok
21	M. Farhan	-	Dusun Ploso Rejo, Desa Jombok



No	Nama	Nama	Alamat
22	Heru Kiswanto	-	Desa Jombok
23	Abdul Muchid	UD Berkah Ilahi	Desa Jombok
24	Rochim	-	Desa Kedungbetik
25	Nur Wanto	-	Desa Watudakon
26	Slamet	Barokah Logam	Dusun Kedung Sambi RT 03 RW 09

Tabel 2.10 Data Pengusaha LIK di Kecamatan Sumobito

No	Nama Penanggungjawab	Nama Perusahaan	Alamat
1	Indra Dani Aprilian	-	Desa Bakalan
2	Sumantri	-	Desa Bakalan
3	Edi Subkan Al Firdaus	-	Dusun Sedapur, Desa Bakalan
4	H. Rohmatulloh	UD Sabar Subur	Desa Bakalan
5	Kasmuji	Muji Syukur	RT 03/ RW 02 Desa Bakalan
6	Sugiyanto	-	RT 03/ RW 02 Desa Bakalan
7	Eliya Choliliyah	-	Desa Bakalan
8	Mustakim	-	Desa Bakalan
9	Ninik Indrawati	-	Desa Bakalan
10	Andi Suarto	-	Desa Bakalan
11	Nuratem	-	Desa Bakalan
12	Mustofifin	-	Desa Bakalan
13	Janji Setyono	-	Desa Bakalan RT 3 RW 2
14	Sukiyat	-	Desa Bakalan
15	Suwaji	UD Sumber Urip	Desa Bakalan
16	Tamsi	-	Desa Bakalan
17	Hari	UD Maju Jaya	Desa Bakalan
18	Jayadi	-	Desa Bakalan
19	Rendik Irsan Saputra	-	Desa Bakalan
20	Suyetno	-	Desa Bakalan
21	Bambang Setyawan	-	Desa Bakalan
22	M. Sofwan	-	Desa Bakalan
23	Sudibyoy	-	Desa Bakalan
24	Wahyu Wibowo Mego	Makmur Logam	Dusun Sedapur, Desa Bakalan
25	Miftakhul Hudah	UD. Sabar Subur	Desa Bakalan
26	Soleh	-	Desa Bakalan



Informasi Kinerja Pengelolaan Lingkungan Hidup Daerah

Kabupaten Jombang Tahun 2016



No	Nama	Nama	Alamat
27	H. Mulyono	UD Nur Amalia	Dusun Kedung Sari, Desa Kendal Sari
28	Hm. Suyuti/ Suprayitno	CV Logam Abadi	Desa Kendal Sari
29	Tarsan	Sabar-Subur	Desa Kendal Sari
30	H. Sumardi	UD Al-Fais	Dusun Kedung Sari, Desa Kendal Sari
31	H. Achmad Nahru	-	Dusun Kedung Sari, Desa Kendal Sari
32	Mukhamad Maliki	Faris Logam Jaya	Desa Kendal Sari
33	Wahyuki Setiawan	-	Dusun Kedung Sari, Desa Kendal Sari
34	HM. Suhud	UD Bima Jaya	Dusun Kedung Sari, Desa Kendal Sari
35	Irfan	-	Dusun Kedung Sari, Desa Kendal Sari
36	Naksim	Putra Jaya	Dusun Kedung Sari, Desa Kendal Sari
37	Rofifan	-	Dusun Kedung Sari, Desa Kendal Sari
38	Suyatno Effendi	-	Desa Kendal Sari
39	H. Abdullah/ Kaselah	Logam Jawa	Desa Kendal Sari
40	Agus Iwantoro	Berkat Alumunium	Dusun Kedung Sari, Desa Kendal Sari
41	Moch. Ali Mas'ud	-	Dusun Kuripan, Desa Kendalsari
42	Abdul Ghafur	UD Alniukah	Dusun Kedungsari, Desa Kendalsari
43	Abdul Faqih	UD Mekar Jaya Logam	Dusun Sugihwaras, Desa Kendalsari
44	Dedy Kusheru P.	UD. Dua Putra	Dusun Kalimati, Desa Kendalsari
45	Ikhwan Efendy	UD. Surya Logam Abadi	Dusun Kalimati, Desa Kendalsari
46	Danang Ari Wibowo	UD Tunas Logam	Dusun Kalimati, Desa Kendalsari
47	Ainul Yakin	UD. Yakin Jaya	Dusun Kedungsari, Desa Kendalsari
48	Abdul Cholil	UD. Abid Logam Mulia	Dusun Kedungsari, Desa Kendalsari
49	Rahmad Yusfani	UD. Sumber Jaya	Dusun Kalimati, Desa Kendalsari
50	Subari	-	Dusun Kedung Sari, Desa Kendal Sari



No	Nama	Nama	Alamat
51	Sunardi	Sunardi	Dusun Kedung Sari, RT 03 RW 02, Desa Kendal Sari
52	Mahfud	-	Dusun Kedung Sari, Desa Kendal Sari
53	Nursiatin	UD Bagus	Dusun Kedung Sari, Desa Kendal Sari
54	Muliono	-	Dusun Ngerambe RT 02/ RW 02, Desa Kendalsari
55	Kaselim	-	Dusun Kalimati RT 01/ RW 01, Desa Kendalsari
56	Rufiatiningsih	-	Dusun Kedung Sari, Desa Kendal Sari
57	Suyadi	UD Hidayah	Dusun Kuripan, Desa Kendalsari
58	Budi Santoso	UD. Logam Santoso	Dusun Kedungsari, Desa Kendalsari
59	Achmad Endarto	UD. Kefin Putra	Dusun Kedungsari, Desa Kendalsari
60	Sunarno	UD. Elco Jaya	Dusun Kalimati, Desa Kendalsari
61	H. Suwanto	UD. Adi Putra Sari Logam	Dusun Kalimati, Desa Kendalsari
62	Samuji	Susanto Basori	Dusun Kuripan Desa Kendalsari
63	Heri Purwanto	Sumber Asih	Dusun Kalimati, Desa Kendalsari
64	Junari	Elsa Jaya	Dusun Kalimati, Desa Kendalsari
65	M. Iqbal Al Hasani	CV. Mafaza	Dusun Kedungsari, Desa Kendalsari
66	Suri Atmaja	UD. Terang	Dusun Kuripan, Desa Kendalsari
67	H. Sukari	CV. Aneka Logam	Dusun Kalimati, Desa Kendalsari
68	Sumarno	-	Dusun Kuripan, Desa Kendalsari
69	Purwanto	UD. Reza Jaya	Dusun Kedungsari, Desa Kendalsari
70	H. Harmojo	UD. Mulyo	Dusun Kuripan, Desa Kendalsari
71	Ahmad Syaiful	-	Dusun Kedungsari, Desa Kendalsari
72	Achmad Jainudin	-	Dusun Kedungsari, Desa Kendalsari
73	Kusaini	UD. Logam Join	Dusun Kedungsari, Desa Kendalsari
74	Muhamad Kusnan	UD. Asalam	Dusun Kalimati, Desa Kendalsari



Informasi Kinerja Pengelolaan Lingkungan Hidup Daerah

Kabupaten Jombang Tahun 2016



No	Nama	Nama	Alamat
75	Istiono	UD. Jaya Utama	Dusun Kalimati, Desa Kendalsari
76	Supardi	Sido Mulyo	Dusun Kuripan, Desa Kendalsari
77	Denny Effendi	UD. Hafizh Putra	Dusun Kuripan, Desa Kendalsari
78	Frazoni Fuchson	-	Dusun Kedungsari, Desa Kendalsari
79	Sugeng Prayitno	Rizal Jaya Logam	Desa Kendalsari
80	Yoni	-	Desa Kendalsari
81	Sulisno	-	Dusun Gondang RT 2 RW 4, Desa Se bani
82	H. Amin Tohari	-	Gondang Se bani
83	Budiono	-	Dusun Gondang, Desa Se bani
84	Udin Heri Cahyono	-	Dusun Tugu RT 01/ RW 02, Desa Se bani
85	Parno	-	Dusun Tugu, Desa Se bani
86	Agus Pujianto	UD. Sumber Rejeki	Dusun Sedamar, Desa Talun Kidul
87	Yoyok Hadi Kuswoyo	UD. Sumber Alam	Dusun Sedamar, Desa Talun Kidul
88	Heri Arwanto	-	Dusun Sedamar RT 03 RW 02, Desa Talun Kidul
89	Mardiy an	Sumber Rezeki	Dusun Sedamar, Desa Talun Kidul
90	Tri Tunggal Wahyuni Anggaini	-	Desa Jogoloyo
91	Hendri Dwi Zakaria	-	Desa Jogoloyo
92	Dwi Arief Harianto	Dwi Jaya	Dusun Losari, Desa Kedung Papar
93	Eko Bambang Purwanto	Tata Logam	Dusun Losari, Desa Kedung Papar
94	Masrukhin	UD Nabila Jaya Logam	Dusun Medan Bhakti, Desa Sumobito
95	Supriadi	Sinar Logam Jaya	Dusun Ingas Pendowo, Desa Sumobito
96	Isro' Dwi Cahyono	Logam Jaya Abadi	Dusun Ingas Pendowo, Desa Sumobito
97	Aris Sugiantoro	UD Luhur Jaya Abadi	Dusun Klampisan, Desa Segodorejo
98	Yardiono	UD Tiga Putra	Dusun Klampisan, Desa Segodorejo
99	Subagyo	UD Afan Logam	Desa Mlaras
100	Kuwat Lestiono/ Agel	-	Desa Mlaras



No	Nama	Nama	Alamat
101	Sunarti	Barokah	Dusun Mbesuk, Desa Curah Malang
102	Suhariono	-	Dusun Mbesuk, Desa Curah Malang
103	Nanang Suryana	Abu Salamah	Desa Curah Malang
104	Murdianto	UD Daya Mandiri	Desa Curah Malang
105	Muhamad Solikan	Putra Mandiri	Dusun Besuk, Desa Curah Malang
106	Zaini Lubis	UD Fida Jaya Logam	Desa Madiopuro
107	Alimat	-	Desa Madiopuro
108	Sunalis	CV Sarana Logam Makmur	Desa Gedangan RT 01
109	Sahmat	-	Dusun Balongrejo, Desa Badas
110	Mas'ud	-	Dusun Banjarpoh, Desa Palrejo

Sumber: AMDAL LIK, 2013

Saat ini data dasar terkait kualitas lingkungan di wilayah tersebut masih dianggap belum cukup memadai sebagai dasar acuan pengambilan kebijakan selanjutnya Hasil kajian analisi Rebagi Pemerintah Kabupaten Jombang, sehingga Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Jombang melakukan sebuah Kajian Analisis Resiko Lingkungan yang obyektif dan ilmiah terkait **tingkat risiko dan tingkat kerentanan terhadap lingkungan** di wilayah tersebut. Analisis risiko diperlukan supaya potensi dampak negatif yang ada dapat diminimalisir, mengingat aktivitas usaha daur ulang slag aluminium sudah berjalan cukup lama (beberapa puluh tahun yang lalu).

Analisis risiko lingkungan diatur dalam Pasal 47 ayat 1 UU No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, yang berbunyi : “Setiap usaha dan/atau kegiatan yang berpotensi menimbulkan dampak penting terhadap lingkungan hidup, ancaman terhadap ekosistem dan kehidupan dan/atau kesehatan dan keselamatan manusia wajib melakukan analisis risiko lingkungan hidup”. Potensi dampak negatif yang mungkin timbul dari kegiatan ini akan menjadi fokus dalam penyusunan Analisis Risiko Lingkungan di Lingkungan Industri Kecil Daur Ulang Slag Aluminium di Kecamatan Sumobito dan Kecamatan Kesamben Kabupaten Jombang.



Hasil kajian Analisis Resiko Lingkungan secara jelas seperti pada uraian di bawah ini:

Tabel 2.11 Ringkasan Hasil Analisis Laboratorium Data Primer

Parameter	Titik Sampling	Hasil Laboratorium
KECAMATAN		
Uji Kualitas Air Bersih	1. Titik 1 : Di pemukiman penduduk Bapak Suryo sekitar industri di Dusun Kuripan Desa Kendalsari	Tidak memenuhi Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 416 tahun 1990 tentang Syarat-syarat dan Pengawasan Kualitas Air. Kadar Mn melebihi baku mutu
	2. Titik 2 : LIK milik Bu Nursiatin di Dusun Kedungsari Desa Kendalsari	Memenuhi baku mutu Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 416 tahun 1990 tentang Syarat-syarat dan Pengawasan Kualitas Air
Uji Kualitas Air Permukaan	1. Titik 1 : Saluran Irigasi Dusun Kalimati Desa Kendalsari	Memenuhi baku mutu Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 82 Tahun 2001 tentang Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air
	2. Titik 2 : Sungai Kendalsari Kecamatan Sumobito	Memenuhi baku mutu Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 82 Tahun 2001 tentang Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air
Uji Kualitas Tanah	1. Titik 1 : Di pemukiman penduduk Bapak Suryo sekitar industri di Dusun Kuripan Desa Kendalsari	Kadar Aluminium (Al) dan Besi (Fe) sangat tinggi, yaitu sebesar 35.639 mg/kg (Al) dan 21.984 mg/kg (Fe)
	2. Titik 2 : Daerah Sekitar Lokasi Industri Kecil milik CV. Adi Putra Sari Logam Pak Suwantoro Desa Kendalsari	Kadar Aluminium (Al) dan Besi (Fe) sangat tinggi, yaitu sebesar 49.967 mg/kg (Al) dan 17.683 mg/kg (Fe)



Parameter	Titik Sampling	Hasil Laboratorium
Uji Kualitas Udara Ambien	1. Titik 1 : LIK milik Pak Ali Mas'ud Dusun Kuripan Desa Kendalsari	Tidak memenuhi Peraturan Gubernur Jawa Timur No.10 tahun 2009 tentang Baku Mutu Udara Ambien dan Emisi Sumber Tidak Bergerak di Provinsi Jawa Timur. Parameter debu melebihi baku mutu
	2. Titik 2 : LIK CV. Adi Putra Sari Logam milik Pak Suwanto Desa Kendalsari	Tidak memenuhi Peraturan Gubernur Jawa Timur No.10 tahun 2009 tentang Baku Mutu Udara Ambien dan Emisi Sumber Tidak Bergerak di Provinsi Jawa Timur. Parameter debu melebihi baku mutu
KECAMATAN		
Uji Kualitas Air Bersih	1. Titik 1 : LIK CV.Restu Ibu Aluminium milik Pak Fatchurahman Yusro Desa Carangrejo.	Memenuhi baku mutu Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 416 tahun 1990 tentang Syarat-syarat dan Pengawasan Kualitas Air
	2. Titik 2 : LIK CV.Nur Hidayah milik Pak Nur Said Dusun Carangpuspo Desa Carangrejo.	Tidak memenuhi Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 416 tahun 1990 tentang Syarat-syarat dan Pengawasan Kualitas Air. Kadar Mn melebihi baku mutu
Uji Kualitas Air Permukaan	1. Titik 1 : Saluran Irigasi Desa Watudakon Kecamatan Kesamben	Tidak memenuhi baku mutu Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 82 Tahun 2001 tentang Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air. Parameter TDS, fosfat, minyak lemak, seng, surfaktan, BOD dan COD melebihi baku mutu
	2. Titik 2 : Sungai Desa Watudakon Kecamatan Kesamben	Tidak memenuhi baku mutu Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 82 Tahun 2001 tentang Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air. Parameter zat padat tersuspensi, minyak lemak, seng, surfaktan, BOD dan COD melebihi baku mutu
Uji Kualitas Tanah	1. Titik 1 : LIK CV.Restu Ibu Aluminium milik Bapak Fatchurahman Yusro Desa Carangrejo	Kadar Aluminium (Al) dan Besi (Fe) sangat tinggi, yaitu sebesar 32.916 mg/kg (Al) dan 9.177 mg/kg (Fe)



Parameter	Titik Sampling	Hasil Laboratorium
	2. Titik 2 : LIK milik CV.Nur Hidayah Pak Nur Said Dusun Carangpuspo Desa Carangrejo	Kadar Aluminium (Al) dan Besi (Fe) sangat tinggi, yaitu sebesar 23.680 mg/kg (Al) dan 31.412 mg/kg (Fe)
Uji Kualitas Udara Ambien	1. Titik 1 : LIK CV.Surya Abadi milik Pak Jarot Subiyantoro Desa Carangrejo	Tidak memenuhi Peraturan Gubernur Jawa Timur No.10 tahun 2009 tentang Baku Mutu Udara Ambien dan Emisi Sumber Tidak Bergerak di Provinsi Jawa Timur. Parameter debu melebihi baku mutu
	2. Titik 2 : LIK CV.Nur Hidayah milik Pak Nur Said Dusun Carangpuspo Desa Carangrejo	Tidak memenuhi Peraturan Gubernur Jawa Timur No.10 tahun 2009 tentang Baku Mutu Udara Ambien dan Emisi Sumber Tidak Bergerak di Provinsi Jawa Timur. Parameter debu dan kebisingan melebihi baku mutu

Sumber : Analisis Risiko Lingkungan, tahun 2015

Tabel 2.12. Ringkasan Hasil Analisis Laboratorium Data Sekunder

No.	Nama Industri	Penanggung jawab	Hasil Lab. Udara	Hasil Lab. Air	Hasil Lab. Air Permukaan
KECAMATAN					
1	CV. NUR AMALIA	H.MULYONO	Memenuhi baku mutu	Memenuhi baku mutu	Memenuhi baku mutu
2	CV.LOGAM MULIA	MOCH.ALI MAS'UD	Memenuhi baku mutu	Memenuhi baku mutu	Memenuhi baku mutu
3	CV.HAFIZH PUTRA	SUNARDI	Memenuhi baku mutu	Memenuhi baku mutu	Memenuhi baku mutu
4	CV.FAIS JAYA LOGAM	SUMARDI	Memenuhi baku mutu	Memenuhi baku mutu	Memenuhi baku mutu
5	CV.ADI PUTRA SARI	SUWANTORO	Memenuhi baku mutu	Memenuhi baku mutu	Memenuhi baku mutu
6	UD.BAGUS	NURSIATIN	Data belum ada	Data belum ada	Data belum ada
7	CV.MEKAR JAYA	INDRA DANI APRILIAN	Memenuhi baku mutu	Memenuhi baku mutu	TSS >
8	CV.JAYA MANDIRI	SUKIYAT	Data belum ada	Data belum ada	Data belum ada
9	CV.MAJU JAYA	HARI	Memenuhi	Memenuhi	TSS >



Informasi Kinerja Pengelolaan Lingkungan Hidup Daerah

Kabupaten Jombang Tahun 2016



No.	Nama Industri	Penanggung jawab	Hasil Lab. Udara	Hasil Lab. Air	Hasil Lab. Air Permukaan
			baku mutu	baku mutu	
10	CV.SABAR SUBUR 2	H.ROHMATULLOH	Memenuhi baku mutu	Memenuhi baku mutu	TSS >
11	CV.MAJU JAYA SEJAHTERA	JAYADI	Memenuhi baku mutu	Memenuhi baku mutu	TSS >
12	CV.SETYA JAYA	BAMBANG SETYAWAN	Memenuhi baku mutu	Memenuhi baku mutu	TSS >
13	CV. SANTO BASORI	SAMUJI	Memenuhi baku mutu	Memenuhi baku mutu	Memenuhi baku mutu
14	CV. AFAN LOGAM LESTARI	SUBAGYO	Memenuhi baku mutu	Memenuhi baku mutu	Memenuhi baku mutu
15	CV.DIMAS JAYA LOGAM	MAHFUD	Memenuhi baku mutu	Memenuhi baku mutu	Memenuhi baku mutu
16	CV.AZMIL JAYA LOGAM	DIDIK PURWANTO	Memenuhi baku mutu	Memenuhi baku mutu	Memenuhi baku mutu
17	CV.BIMA JAYA LOGAM	MUCHAMAD SUHUD	Memenuhi baku mutu	Memenuhi baku mutu	Memenuhi baku mutu
18	CV.SABAR SUBUR	TARSAN	Memenuhi baku mutu	Memenuhi baku mutu	TSS >
19	CV.FIDA JAYA LOGAM	ZAINI LUBIS	Memenuhi baku mutu	Memenuhi baku mutu	Memenuhi baku mutu
20	CV.ANEKA LOGAM	H.SUKARI	Memenuhi baku mutu	Memenuhi baku mutu	Memenuhi baku mutu
21	CV.SUMBER URIP	SUWAJI	Memenuhi baku mutu	Memenuhi baku mutu	TSS >
22	CV.SABAR SUBUR 3	MUSTOFIFIN	Memenuhi baku mutu	Memenuhi baku mutu	TSS >
23	CV.LUHUR JAYA ABADI	ARIS SUGIANTORO	Memenuhi baku mutu	Memenuhi baku mutu	TSS >
24	CV.MAJU JAYA SENTOSA	SUMANTRI	Memenuhi baku mutu	Memenuhi baku mutu	TSS >
25	CV.BAROKAH JAYA	SUHARIONO	Data belum ada	Data belum ada	Data belum ada
26	CV.SINAR LOGAM JAYA	SUPRIADI	Data belum ada	Data belum ada	Data belum ada
27	CV.PUTRA MANDIRI	M.SOLIKAN	Data belum ada	Data belum ada	Data belum ada



Informasi Kinerja Pengelolaan Lingkungan Hidup Daerah

Kabupaten Jombang Tahun 2016



No.	Nama Industri	Penanggung jawab	Hasil Lab. Udara	Hasil Lab. Air	Hasil Lab. Air Permukaan
KECAMATAN KESAMBEN					
1	UD.RESTU IBU ALUMINIUM	FATCHURAH-MA N YUSRO	Data belum ada	Data belum ada	Data belum ada
2	CV.SURYA ABADI	JAROT S.	Memenuhi baku mutu	Memenuhi baku mutu	Memenuhi baku mutu
3	CV.SURYA ABADI	SAJI	Memenuhi baku mutu	Memenuhi baku mutu	Memenuhi baku mutu
4	CV.NUR HIDAYAH	NUR SAID	Data belum ada	Data belum ada	Data belum ada
5	CV. BAROKAH LOGAM	SLAMET	Memenuhi baku mutu	Memenuhi baku mutu	Memenuhi baku mutu
6	CV.JAYA MAKMUR	WAGITO	Memenuhi baku mutu	Memenuhi baku mutu	TSS >
7	CV. BERKAH ILAHI	Drs. ABDUL MUCHID	Memenuhi baku mutu	Memenuhi baku mutu	Memenuhi baku mutu
8	CV.MITRA LOGAM	MAS'UD	Memenuhi baku mutu	Memenuhi baku mutu	TSS >
9	CV.RAYA ABADI	FATKUR ROKHIM	Data belum ada	Data belum ada	Data belum ada
10	CV. ANEKA ADHI LOGAM	H.SUKARNO	Memenuhi baku mutu	Memenuhi baku mutu	Memenuhi baku mutu
11	CV.NOVA JAYA	AHMAD SAPARI	Data belum ada	Data belum ada	Data belum ada

Sumber : Dokumen UKL-UPL Kegiatan Industri Pemanfaatan Limbah B3, tahun 2015



Pengumpulan data primer dilakukan melalui metode survey lokasi industri dan analisis laboratorium, khususnya di desa dengan kepadatan industri daur ulang slag aluminium tertinggi dari masing-masing kecamatan, yaitu di Desa Kendalsari dan Desa Bakalan Kecamatan Sumobito serta di Desa Carangrejo Kecamatan Kesamben Kabupaten Jombang. Berikut ini ditampilkan kelengkapan dokumen perijinan yang telah dimiliki industri daur ulang slag aluminium yang disurvei.

Tabel 2.13. Daftar Kelengkapan Dokumen Perijinan Industri Daur Ulang Slag Aluminium

No.	Nama Industri	Penanggung jawab	Alamat	Dokumen Perijinan						
				UKL-UPL	AMDAL	SIUP	TDP	HO	IMB	IUI
KECAMATAN										
1	CV Nur Amalia	H. Mulyono	Ds/Kel.Kendalsari Kec.Sumobito Kab.Jombang	√	√	-	-	-	-	-
2	CV. Logam Mulia	Moch. Ali Mas'ud	Ds/Kel.Kendalsari Kec.Sumobito Kab.Jombang	√	√	-	-	-	-	-
3	CV.Hafizh Putra Logam	Sunardi	Ds/Kel.Kendalsari Kec.Sumobito Kab.Jombang	√	√	-	-	-	-	-
4	CV Al-Fais	Sumardi	Ds/Kel.Kendalsari Kec.Sumobito Kab.Jombang	√	√	-	-	-	-	-

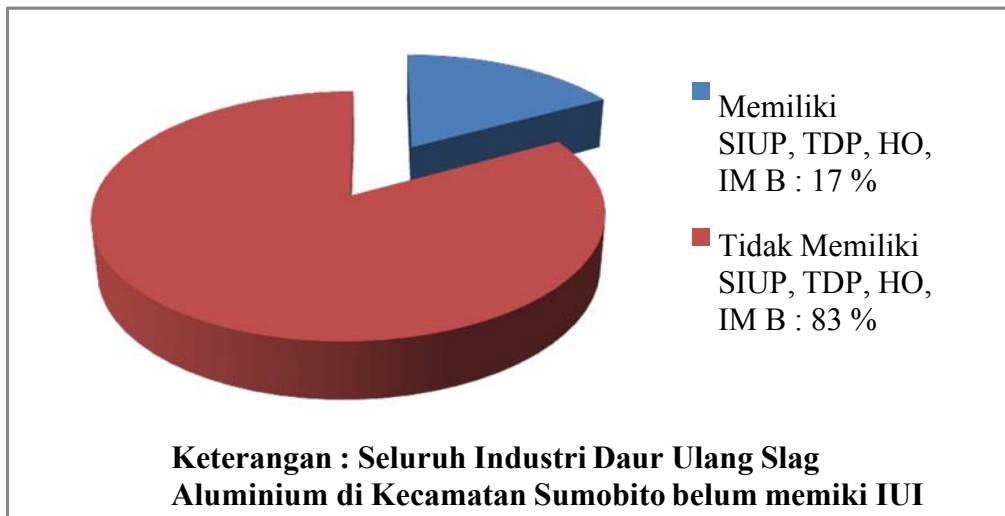


Informasi Kinerja Pengelolaan Lingkungan Hidup Daerah
Kabupaten Jombang Tahun 2016

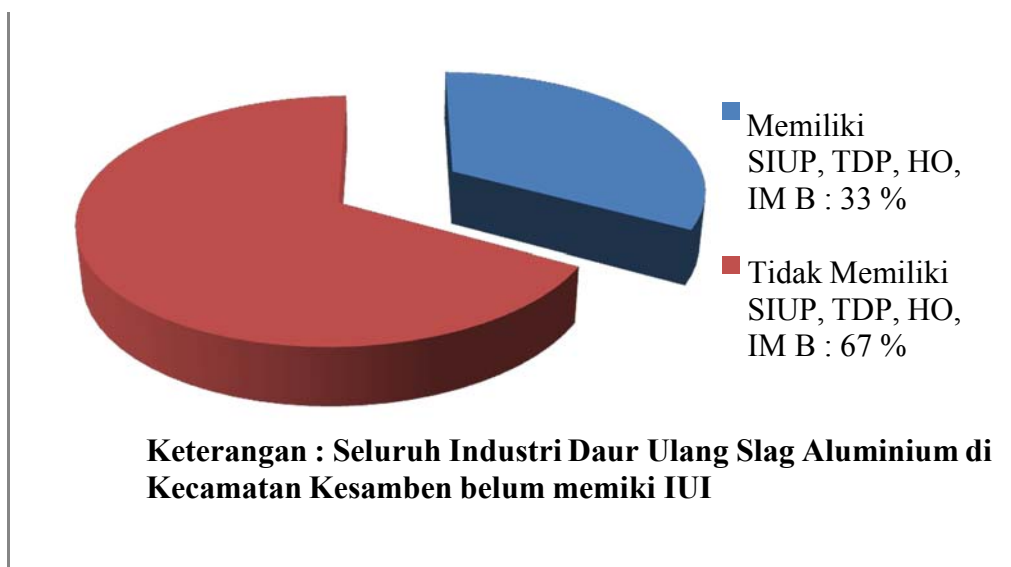


No.	Nama Industri	Penanggung jawab	Alamat	Dokumen Perijinan						
				UKL-UPL	AMDAL	SIUP	TDP	HO	IMB	IUI
5	CV. Aneka Logam	Suwantoro	Ds/Kel.Kendalsari Kec.Sumobito Kab.Jombang	√	√	-	-	-	-	-
6	CV. Bagus	Nursiatin	Ds/Kel.Kendalsari Kec.Sumobito Kab.Jombang	√	√	-	-	-	-	-
7	CV. Mekar Jaya	Indra Dani A.	Ds/Kel.Bakalan Kec.Sumobito Kab.Jombang	√	√	-	-	-	-	-
8	CV. Jaya Mandiri	Sukiyat	Ds/Kel.Bakalan Kec.Sumobito Kab.Jombang	√	√	-	-	-	-	-
9	CV Maju Jaya	Hari	Ds/Kel.Bakalan Kec.Sumobito Kab.Jombang	√	√	√	√	√	√	-
10	UD Sabar Subur	H. Rohmatulloh	Ds/Kel.Bakalan Kec.Sumobito Kab.Jombang	√	√	√	√	√	√	-
11	CV.Maju Jaya Sejahtera	Jayadi	Ds/Kel.Bakalan Kec.Sumobito Kab.Jombang	√	√	-	-	-	-	-
12	CV. Setya Jaya	Bambang Setyawan	Ds/Kel.Bakalan Kec.Sumobito Kab.Jombang	√	√	-	-	-	-	-
KECAMATAN										
1	UD Surya Abadi	Jarot Subiyantoro	Ds/Kel.Carangrejo Kec.Kesamben Kab.Jombang	√	√	√	√	√	√	-
2	UD Surya Abadi	Saji	Ds/Kel.Carangrejo Kec.Kesamben Kab.Jombang	√	√	√	√	√	√	-
3	CV.Nur Hidayah	Nur Said	Ds/Kel.Carangpuspo Kec.Kesamben Kab.Jombang	√	√	-	-	-	-	-
4	UD Restu Ibu Alumunium	Fatchurahman Y.	Ds/Kel.Carangrejo Kec.Kesamben Kab.Jombang	√	√	-	-	-	-	-
5	CV.Jaya Makmur	Wagito	Ds/Kel.Carangrejo Kec.Kesamben Kab.Jombang	√	√	-	-	-	-	-
6	CV.Barokah Logam	Slamet	Ds/Kel.Kesamben Kec.Kesamben Kab.Jombang	√	√	-	-	-	-	-

Sumber : Analisis Resiko Lingkungan, tahun 2015



Gambar 2.8. Persentase Kepemilikan Dokumen Perijinan Industri Daur Ulang Slag Aluminium (Obyek Studi) di Kecamatan Sumobito



Gambar 2.9. Persentase Kepemilikan Dokumen Perijinan Industri Daur Ulang Slag Aluminium (Obyek Studi) di Kecamatan Kesamben

Dalam penilaian tingkat risiko lingkungan juga diperlukan data sekunder untuk memenuhi data yang belum dicakup melalui pengumpulan data primer. Selanjutnya akan diuraikan hasil pengumpulan data primer dan sekunder yang terkait dengan dampak lingkungan akibat aktivitas kegiatan/ usaha daur ulang slag aluminium.



Tabel 2.14. Hasil Pengumpulan Data Primer dan Sekunder terkait Dampak Lingkungan

No.	Nama Industri	Penanggung jawab	Frekuensi Produksi Peleburan	Kegiatan sekitar Lokasi	Jumlah Tenaga Kerja	Kapasitas Produksi (kg/hari)	Pengendalian Operasional terhadap Kualitas Udara	Hasil Lab. Udara Ambien	Pengendalian Operasional terhadap Limbah B3	Hasil Lab. Air Bersih	Volume Limbah Abu (kg/hari)
KECAMATAN SUMOBITO											
1	CV. Nur Amalia	H. Mulyono	Setiap hari	Pemukiman	5	1500	Belum sesuai UKL-UPL	Memenuhi baku mutu	Belum sesuai UKL-UPL	Memenuhi baku mutu	500
2	CV. Logam Mulia	Moch. Ali Mas'ud	Setiap hari	Pemukiman	10	1000	Belum sesuai UKL-UPL	Tidak Memenuhi baku mutu	Belum sesuai UKL-UPL	Memenuhi baku mutu	500
3	CV. Hafizh Putra Logam	Sunardi	Setiap hari	Persawahan	7	500	Belum sesuai UKL-UPL	Memenuhi baku mutu	Belum sesuai UKL-UPL	Memenuhi baku mutu	50
4	CV. Al-Fais	Sumardi	Sebulan sekali	Persawahan	5	100	Belum sesuai UKL-UPL	Memenuhi baku mutu	Belum sesuai UKL-UPL	Memenuhi baku mutu	200
5	CV. Aneka Logam	Suwantoro	Setiap hari	Pemukiman	12	1000	Belum sesuai	Tidak Memenuhi baku mutu	Belum sesuai	Memenuhi baku mutu	500
6	CV. Bagus	Nursiatin	Setiap hari	Persawahan	6	200	Belum sesuai	Data belum ada	Belum sesuai	Memenuhi baku mutu	100
7	CV. Mekar Jaya	Indra Dani A.	Setiap hari	Persawahan	4	1000	Belum sesuai UKL-UPL	Memenuhi baku mutu	Belum sesuai UKL-UPL	Memenuhi baku mutu	500
8	CV. Jaya Mandiri	Sukiyat	Sebulan sekali	Pemukiman	5	300	Belum sesuai	Data belum ada	Belum sesuai	Data belum ada	200
9	CV. Maju Jaya	Hari	Setiap hari	Persawahan	6	1000	Belum sesuai UKL-UPL	Memenuhi baku mutu	Belum sesuai UKL-UPL	Memenuhi baku mutu	500
10	UD. Sabar Subur	H. Rohmatulloh	Setiap hari	Persawahan	17	1000	Belum sesuai UKL-UPL	Memenuhi baku mutu	Belum sesuai UKL-UPL	Memenuhi baku mutu	500
11	CV. Maju Jaya Sejahtera	Jayadi	Setiap hari	Persawahan	12	400	Belum sesuai UKL-UPL	Memenuhi baku mutu	Belum sesuai UKL-UPL	Memenuhi baku mutu	100
12	CV. Setya Jaya	Bambang Setyawan	Setiap hari	Persawahan	18	200	Belum sesuai UKL-UPL	Memenuhi baku mutu	Belum sesuai UKL-UPL	Memenuhi baku mutu	250



Laporan Kinerja Pengelolaan Lingkungan Hidup Daerah
Kabupaten Jombang Tahun 2016



No.	Nama Industri	Penanggung jawab	Frekuensi Produksi Peleburan	Kegiatan sekitar Lokasi	Jumlah Tenaga Kerja	Kapasitas Produksi (kg/hari)	Pengendalian Operasional terhadap Kualitas Udara	Hasil Lab. Udara Ambien	Pengendalian Operasional terhadap Limbah B3	Hasil Lab. Air Bersih	Volume Limbah Abu (kg/hari)
KECAMATAN KESAMBEN											
1	UD. Surya	Jarot	Setiap hari	Persawahan	23	2000	Belum sesuai UKL-UPL	Memenuhi baku mutu	Belum sesuai UKL-UPL	Memenuhi baku mutu	500
2	UD. Surya Abadi	Saji	Setiap hari	Persawahan	23	2000	Belum sesuai UKL-UPL	Memenuhi baku mutu	Belum sesuai UKL-UPL	Memenuhi baku mutu	500
3	CV.Nur Hidayah	Nur Said	Setiap hari	Persawahan	9	200	Belum sesuai	Tidak Memenuhi baku mutu	Belum sesuai	Tidak Memenuhi baku mutu	100
4	UD. Restu Ibu Alumunium	Fatchurahman Y.	Sebulan sekali	Pemukiman	4	300	Belum sesuai	Data belum ada	Belum sesuai	Memenuhi baku mutu	30
5	CV.Jaya Makmur	Wagito	Setiap hari	Persawahan	5	1000	Belum sesuai UKL-UPL	Memenuhi baku mutu	Belum sesuai UKL-UPL	Memenuhi baku mutu	500
6	CV.Barokah Logam	Slamet	Sebulan sekali	Persawahan	3	300	Belum sesuai UKL-UPL	Memenuhi baku mutu	Belum sesuai UKL-UPL	Memenuhi baku mutu	200

Sumber : Analisis Resiko Lingkungan, tahun 2015 dan Dokumen UKL-UPL Kegiatan Industri Pemanfaatan Limbah B3 (Dross/Slag/Ash/Scrap/Aluminium), tahun 2015



Beberapa industri daur ulang slag aluminium sudah tidak beroperasi lagi berdasarkan keterangan yang diperoleh dari kantor Kecamatan Kesamben, sebagaimana ditunjukkan pada tabel di bawah ini :

Tabel 2.15. Data Perusahaan Daur Ulang Slag Aluminium Kecamatan Kesamben

Desa	Nama Pengusaha	Keterangan
Jombok	Abdul Muchid	Beroperasi
	H.Sukarno	Beroperasi
	H.Wari	Beroperasi
	H.Suntoro	Beroperasi
	H.Ahmad Sapari	Beroperasi
	Heru Kiswanto	Beroperasi
	Iva Rudianto	Beroperasi
	Abdul Kalim/Maskuri	Beroperasi
	Mas'ud	Beroperasi
	Ach.Choiron Samsul A	Beroperasi
Carangrejo	Jarot Subiyantoro	Beroperasi
	Saji	Beroperasi
	Eko Hadi Kuswoyo	Beroperasi
	Suwardi	Beroperasi
	Masbukin	Tidak Beroperasi
	Hartono	Tidak Beroperasi
	Nur Said	Beroperasi
	Daman	Tidak Beroperasi
Kedungbetik	Rochim	Beroperasi
Watudakon	Nur Wanto	Tidak Beroperasi
Kesamben	Slamet	Beroperasi

Sumber : Kantor Kecamatan Kesamben Kabupaten Jombang



Penilaian risiko lingkungan dilakukan terhadap industri daur ulang slag aluminium yang terletak di desa dengan kepadatan industri daur ulang slag aluminium tertinggi dari masing-masing kecamatan, yaitu di Desa Kendalsari dan Desa Bakalan Kecamatan Sumobito serta di Desa Carangrejo Kecamatan Kesamben Kabupaten Jombang. Jumlah industri yang dinilai sebanyak 6 industri dari masing-masing desa tersebut, sehingga jumlah totalnya menjadi 18 industri. Hasil penilaian risiko adalah sebagai berikut :



Tabel 2.16. Hasil Penilaian Bahaya Dampak Lingkungan Potensial Industri Daur Ulang Slag Aluminium

No.	Nama Industri	Penanggung jawab	LIKELIHOOD		SEVERITY							
			Peluang Terjadinya Risiko	Ket.	Dampak terhadap Kegiatan sekitar Lokasi	Peningkatan Kebutuhan Air Bersih	Timbulan Bahan Baku Tergolong LB3	Pencemaran Udara	Pencemaran Air Tanah/ Air Bersih	Timbulan dan Ceceran LB3	Total	Ket.
KECAMATAN												
1	CV. Nur Amalia	H. Mulyono	10	Sering Terjadi	10	1	10	5	5	10	41	Sangat Berbahaya
2	CV. Logam Mulia	Moch. Ali Mas'ud	10	Sering Terjadi	10	5	5	10	5	10	45	Sangat Berbahaya
3	CV. Hafizh Putra Logam	Sunardi	10	Sering Terjadi	5	1	5	5	5	1	22	Berbahaya
4	CV. Al-Fais	Sumardi	5	Medium	5	1	1	5	5	5	22	Berbahaya
5	CV. Aneka Logam	Suwantoro	10	Sering Terjadi	10	5	5	10	5	10	45	Sangat Berbahaya
6	CV. Bagus	Nursiatin	10	Sering Terjadi	5	1	1	5	5	1	18	Sedikit Berbahaya
7	CV. Mekar Jaya	Indra Dani A.	10	Sering Terjadi	5	1	5	5	5	10	31	Berbahaya
8	CV. Jaya Mandiri	Sukiyat	5	Medium	10	1	5	5	5	5	31	Berbahaya
9	CV. Maju Jaya	Hari	10	Sering Terjadi	5	1	5	5	5	10	31	Berbahaya
10	UD. Sabar Subur	H. Rohmatulloh	10	Sering Terjadi	5	5	5	5	5	10	35	Berbahaya
11	CV. Maju Jaya Sejahtera	Jayadi	10	Sering Terjadi	5	5	5	5	5	1	26	Berbahaya
12	CV. Setya Jaya	Bambang Setyawan	10	Sering Terjadi	5	5	1	5	5	5	26	Berbahaya



Laporan Kinerja Pengelolaan Lingkungan Hidup Daerah
Kabupaten Jombang Tahun 2016



No.	Nama Industri	Penanggung jawab	LIKELIHOOD		SEVERITY							
			Peluang Terjadinya Risiko	Ket.	Dampak terhadap Kegiatan sekitar Lokasi	Peningkatan Kebutuhan Air Bersih	Timbulan Bahan Baku Tergolong LB3	Pencemaran Udara	Pencemaran Air Tanah/ Air Bersih	Timbulan dan Ceceran LB3	Total	Ket.
KECAMATAN KESAMBEN												
1	UD. Surya Abadi	Jarot Subiyantoro	10	Sering Terjadi	5	10	10	10	5	10	50	Sangat Berbahaya
2	UD. Surya	Saji	10	Sering	5	10	10	5	5	10	45	Sangat
3	CV.Nur Hidayah	Nur Said	10	Sering Terjadi	5	1	1	10	10	1	28	Berbahaya
4	UD. Restu Ibu Alumunium	Fatchurahman Y.	5	Medium	10	1	5	5	5	1	27	Berbahaya
5	CV. Jaya Makmur	Wagito	10	Sering Terjadi	5	1	5	5	5	10	31	Berbahaya
6	CV. Barokah Logam	Slamet	5	Medium	5	1	5	5	5	5	26	Berbahaya

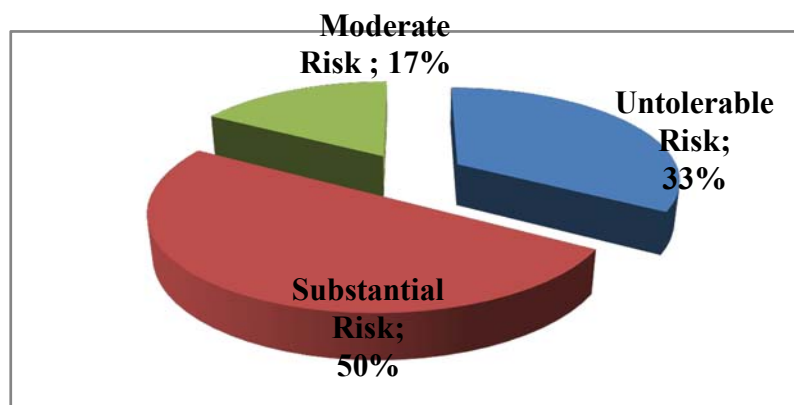
Sumber : Analisis Risiko Lingkungan, tahun 2015



Tabel 2.17. Hasil Penilaian Tingkat Risiko Lingkungan Industri Daur Ulang Slag Aluminium

No.	Nama Industri	Penanggung jawab	<i>LIKELIHOOD</i>	<i>SEVERITY</i>	Tingkat Risiko
KECAMATAN					
1	CV. Nur Amalia	H. Mulyono	Sering Terjadi	Sangat Berbahaya	<i>Untolerable Risk</i>
2	CV. Logam Mulia	Moch. Ali Mas'ud	Sering Terjadi	Sangat Berbahaya	<i>Untolerable Risk</i>
3	CV. Hafizh Putra Logam	Sunardi	Sering Terjadi	Berbahaya	<i>Substantial Risk</i>
4	CV. Al-Fais	Sumardi	Medium	Berbahaya	<i>Moderate Risk</i>
5	CV. Aneka Logam	Suwantoro	Sering Terjadi	Sangat Berbahaya	<i>Untolerable Risk</i>
6	CV. Bagus	Nursiatin	Sering Terjadi	Sedikit Berbahaya	<i>Untolerable Risk</i>
7	CV. Mekar Jaya	Indra Dani A.	Sering Terjadi	Berbahaya	<i>Substantial Risk</i>
8	CV. Jaya Mandiri	Sukiyat	Medium	Berbahaya	<i>Moderate Risk</i>
9	CV. Maju Jaya	Hari	Sering Terjadi	Berbahaya	<i>Substantial Risk</i>
10	UD. Sabar Subur	H. Rohmatulloh	Sering Terjadi	Berbahaya	<i>Substantial Risk</i>
11	CV. Maju Jaya Sejahtera	Jayadi	Sering Terjadi	Berbahaya	<i>Substantial Risk</i>
12	CV. Setya Jaya	Bambang Setyawan	Sering Terjadi	Berbahaya	<i>Substantial Risk</i>
KECAMATAN					
1	UD. Surya Abadi	Jarot Subiyantoro	Sering Terjadi	Sangat Berbahaya	<i>Untolerable Risk</i>
2	UD. Surya Abadi	Saji	Sering Terjadi	Sangat Berbahaya	<i>Untolerable Risk</i>
3	CV. Nur Hidayah	Nur Said	Sering Terjadi	Berbahaya	<i>Substantial Risk</i>
4	UD. Restu Ibu Aluminium	Fatchurahman Y.	Medium	Berbahaya	<i>Moderate Risk</i>
5	CV. Jaya Makmur	Wagito	Sering Terjadi	Berbahaya	<i>Substantial Risk</i>
6	CV. Barokah Logam	Slamet	Medium	Berbahaya	<i>Moderate Risk</i>

Sumber : Analisis Risiko Lingkungan, tahun 2015



Gambar 2.10. Persentase Hasil Penilaian Tingkat Resiko Lingkungan Lingkungan Industri Daur Ulang Slag Aluminium Kecamatan Sumobito



Wilayah Lingkungan Industri Kecil (LIK) Daur Ulang Slag Aluminium memiliki risiko mengalami pencemaran air bersih/ air tanah, air permukaan, tanah maupun udara. Hal ini berdasarkan hasil analisis laboratorium dan survey lokasi industri daur ulang slag aluminium yang menunjukkan kondisi sebagai berikut :

1. Hasil pengujian air bersih/ air tanah di Desa Kendalsari Kecamatan Sumobito dan Desa Carangrejo Kecamatan Kesamben, khususnya di titik lokasi yang berdekatan dengan/ atau merupakan bekas tempat penimbunan limbah B3 abu, menunjukkan adanya parameter yang melebihi baku mutu, yaitu kadar Mangan (Mn).
2. Hasil pengujian air permukaan di Desa Watudakon Kecamatan Kesamben, dimana pada keadaan hulu sungai menjadi tempat penumpukan limbah B3 abu, menunjukkan adanya parameter yang melebihi baku mutu, yaitu kadar TDS, zat padat tersuspensi, fosfat, minyak lemak, seng, surfaktan, BOD dan COD.
3. Hasil pengujian tanah di Desa Kendalsari Kecamatan Sumobito dan Desa Carangrejo Kecamatan Kesamben, yaitu dari masing-masing lokasi sampling yang berdekatan dengan/ atau merupakan bekas tempat penimbunan limbah B3 abu, menunjukkan tingginya kandungan Aluminium (Al), Besi (Fe) dan Mangan (Mn) dalam tanah, serta adanya Tembaga (Cu) dan Seng (Zn).
4. Hasil pengujian udara ambien di Desa Kendalsari Kecamatan Sumobito dan Desa Carangrejo Kecamatan Kesamben, yaitu di lokasi industri daur ulang slag aluminium yang termasuk skala besar menunjukkan adanya parameter yang melebihi baku mutu, khususnya kadar debu.
5. Survey lokasi menunjukkan bahwa industri daur ulang slag aluminium di Desa Kendalsari Kecamatan Sumobito dan Desa Carangrejo Kecamatan Kesamben belum melakukan pengelolaan lingkungan atau pengendalian operasional terhadap kualitas udara dan limbah B3 sesuai dokumen UKL-UPL atau persyaratan peraturan lingkungan terkait.



6. Survey lokasi menunjukkan bahwa industri daur ulang slag aluminium di Desa Kendalsari Kecamatan Sumobito dan Desa Carangrejo Kecamatan Kesamben belum memiliki izin lingkungan untuk pemanfaatan limbah B3.
7. Adanya parameter logam yang melebihi baku mutu baik pada kualitas air bersih/ air tanah, air permukaan, tanah berpotensi masuk ke makhluk hidup di sekitarnya baik manusia, hewan maupun tumbuhan, sehingga juga berpotensi menjadi racun jika konsentrasi dalam tubuh berlebih akibat terjadinya bioakumulasi, yaitu peningkatan konsentrasi unsur kimia dalam tubuh makhluk hidup.
8. Adanya parameter debu yang melebihi baku mutu pada kualitas udara ambien berpotensi menimbulkan gangguan kesehatan. Partikulat debu yang berukuran sekitar 5 mikron dapat langsung masuk kedalam paru-paru dan mengendap di alveoli, sedangkan partikulat debu yang lebih besar dapat mengganggu saluran pernafasan bagian atas dan menyebabkan iritasi.

Pada umumnya udara yang tercemar hanya mengandung logam berbahaya sekitar 0,01% sampai 3% dari seluruh partikulat debu di udara, akan tetapi logam tersebut dapat bersifat akumulatif dan kemungkinan dapat terjadi reaksi sinergistik pada jaringan tubuh. Logam yang terkandung di udara yang dihirup juga mempunyai pengaruh yang lebih besar dibandingkan dengan dosis sama yang berasal dari makanan atau air minum.

Dengan terjadinya kondisi tersebut di atas maka perlu adanya pengendalian risiko lingkungan di wilayah LIK Daur Ulang Slag Aluminium Kecamatan Sumobito dan Kecamatan Kesamben Kabupaten Jombang. Rekomendasi untuk pengendalian risiko lingkungan tersebut, antara lain :

1. Melakukan *updating*/ pembaharuan data analisis risiko lingkungan setidaknya selama 5 tahun ke depan untuk mencakup tingkat risiko seluruh industri yang ada di Kecamatan Sumobito dan Kesamben, mencakup *updating* :



- a. kualitas air bersih, air permukaan, tanah dan udara ambien untuk mengetahui potensi terjadinya pencemaran yang menyeluruh setiap tahun, yaitu pada lokasi :
 - lokasi yang sama dengan analisis risiko lingkungan sebelumnya, untuk mengetahui apakah terjadi perubahan kualitas lingkungan (misal 1 titik dari setiap parameter dari masing-masing Kecamatan Sumobito dan Kesamben)
 - ditambah dengan lokasi industri daur ulang slag aluminium yang berbeda dari analisis risiko lingkungan sebelumnya, untuk menambah data kualitas lingkungan (misal 2 titik dari setiap parameter dari masing-masing Kecamatan Sumobito dan Kesamben)
 - ditambah dengan lokasi dimana tidak terdapat industri daur ulang slag aluminium, sebagai data pembandingan (misal 1 titik dari setiap parameter dari masing-masing Kecamatan Sumobito dan Kesamben).

- b. Pengujian kualitas tanah sebaiknya mencakup parameter-parameter sebagai berikut :
 - Parameter yang sama dengan sebelumnya, yaitu : Aluminium (Al), Besi (Fe), Mangan (Mn), Tembaga (Cu), Seng (Zn)
 - Ditambah dengan parameter logam berat yang lain, yaitu Arsenic (As), Cadmium (Cd), Chromium (Cr), Merkuri (Hg) karena logam-logam berat tersebut juga terkandung dalam limbah B3 abu.

- c. kualitas limbah B3 abu setiap tahun, melalui uji **TCLP** (*Toxicity Characteristic Leaching Procedure*) untuk memantau perkembangan kualitas limbah B3 yang ada, misal :
 - 1 titik dari industri yang menggunakan bahan baku *dross*/ abu
 - 1 titik dari industri yang menggunakan bahan baku *scrap*/ gram.



- d. Pengujian kualitas limbah B3 abu sebaiknya mencakup parameter-parameter sebagai berikut :
- Parameter uji TCLP
 - Ditambah dengan parameter logam Aluminium (Al), Besi (Fe) dan Mangan (Mn), karena logam-logam tersebut belum tercakup dalam uji TCLP namun terkandung dalam limbah B3 abu daur ulang slag aluminium dan pada konsentrasi yang tinggi di lingkungan dapat membahayakan.
- e. Survey industri daur ulang slag aluminium, yaitu pada lokasi :
- Industri yang sama dengan analisis risiko lingkungan sebelumnya, untuk mengetahui apakah terjadi perubahan pengelolaan lingkungan (misal 2 industri dari masing-masing desa yang telah disurvei sebelumnya di Kecamatan Sumobito dan Kesamben)
 - Ditambah dengan industri daur ulang slag aluminium yang berbeda dari analisis risiko lingkungan sebelumnya, untuk menambah data pengelolaan lingkungan (misal 6 industri yang terletak di masing-masing Kecamatan Sumobito dan Kesamben).
2. Menindaklanjuti adanya pencemaran air bersih maka perlu adanya pengolahan air bersih dari dinas terkait Pemkab Jombang.
 3. Memelihara dan meningkatkan penghijauan untuk membantu penyerapan sumber polusi udara, terutama di wilayah yang terdeteksi pencemaran udara.
 4. Mengadakan studi lebih lanjut mengenai kadar logam yang terkandung pada hasil pertanian/ perkebunan terutama di wilayah yang tanahnya terdeteksi mengandung kadar logam tinggi untuk memastikan keamanan sayuran/ buah yang dikonsumsi agar tidak menimbulkan gangguan kesehatan.



5. Mengkorelasikan hasil analisis risiko lingkungan dengan studi yang dilakukan Dinas Kesehatan (bila ada) terkait dampak terhadap kesehatan masyarakat, agar pengelolaan lingkungan lebih tepat sasaran.
6. Melakukan penataan Lingkungan Industri Kecil (LIK) dengan membuat *Buffer Zone* dimana industri daur ulang slag aluminium ditempatkan dalam sebuah kawasan secara terpusat, menjauh dari pemukiman dan persawahan/ peternakan atau kegiatan sejenis. Pemilihan lokasi *Buffer Zone* sebaiknya didahului dengan studi geolistrik untuk mengetahui peta geohidrologi, sehingga dapat dipilih lokasi yang berada di hilir sumber mata air.
7. Memantau pengelolaan lingkungan yang dilakukan industri daur ulang slag aluminium khususnya terhadap kualitas udara dan limbah B3 untuk memastikan pengelolaan lingkungan tersebut sesuai persyaratan peraturan lingkungan terkait atau dokumen UKL-UPL yang telah ditetapkan.
8. Melakukan pengendalian risiko sesuai Kriteria Skala Prioritas Pengelolaan Risiko Lingkungan :



Tabel 2.18. Pengelolaan Risiko

Skala Prioritas	Pengelolaan/ Pengendalian Risiko
1	<p>Ditetapkan sebagai Tujuan/ Sasaran/ Program Manajemen Risiko, antara lain untuk menurunkan faktor-faktor yang meningkatkan risiko terhadap lingkungan, seperti :</p> <ul style="list-style-type: none">- Menjauhkan dari pemukiman, persawahan, peternakan dan kegiatan sejenis- Mengendalikan kapasitas produksi agar peningkatan kapasitas harus sejalan dengan peningkatan pengelolaan lingkungan- Memberi batas waktu penerapan pengelolaan lingkungan sesuai dokumen persyaratan peraturan lingkungan terkait atau dokumen UKL-UPL yang telah ditetapkan, agar dapat segera dilaksanakan. Pengelolaan lingkungan khususnya pengendalian operasional terhadap kualitas udara dengan penggunaan sistem pengelolaan udara berupa exhaust fan dan penangkap debu/ dust collector. Serta pengendalian operasional terhadap limbah B3 dengan penempatan limbah B3 secara khusus di TPS Limbah B3 yang berijin dan pengangkutan limbah B3 menggunakan transportir yang berijin. Pengelolaan juga harus mencakup adanya prosedur yang jelas dalam pengendalian operasional. <p>Program Manajemen Risiko dievaluasi secara periodik kemajuannya dan bila melebihi target waktu yang ditentukan perlu diambil tindakan lebih lanjut, mengacu pada Undang-Undang No. 32 Tahun 2009.</p>
2	<p>Peningkatan sarana/ prasarana dan penggunaan prosedur yang jelas dari industri yang termasuk prioritas 2 perlu dilakukan, khususnya dalam pengendalian operasional terhadap kualitas udara dan limbah B3 sesuai persyaratan peraturan lingkungan terkait atau dokumen UKL- UPL yang telah ditetapkan. Peningkatan ini harus dipantau secara periodik.</p>
3	<p>Peningkatan pengendalian risiko bagi industri yang tergolong prioritas 3 dapat dilakukan setidaknya dengan penggunaan prosedur dalam melaksanakan pekerjaan, khususnya terkait pengaruh terhadap kualitas udara dan timbulan/ ceceran limbah B3. Efektifitas penggunaan prosedur ini dipantau secara periodik.</p>

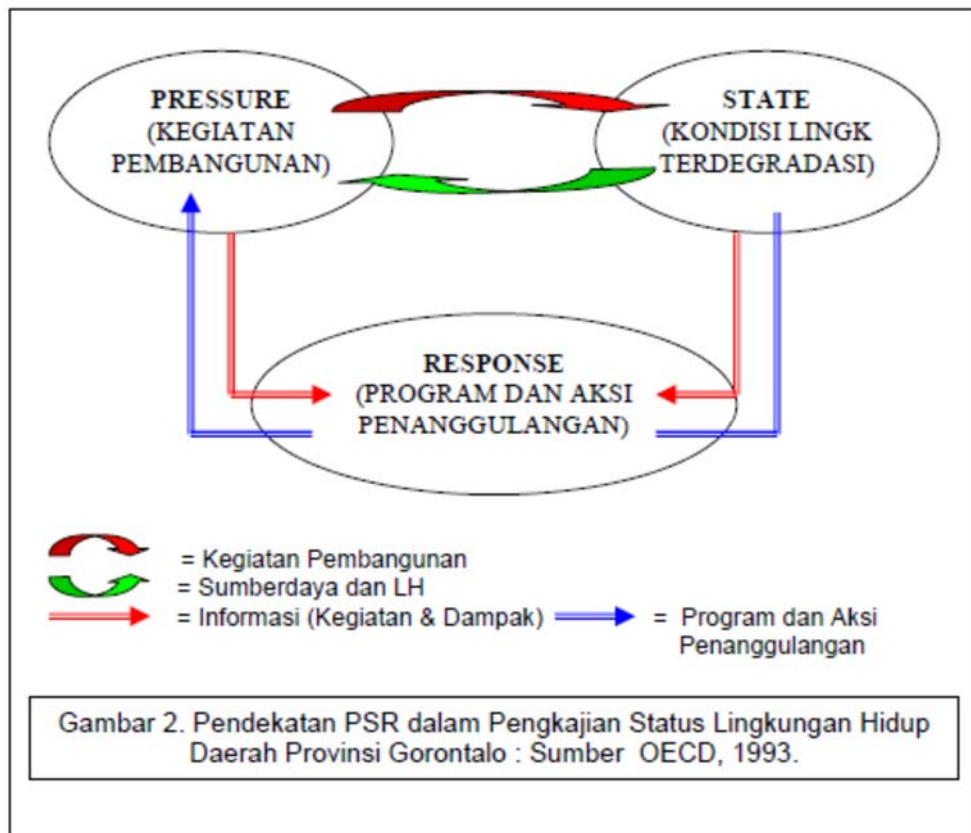
Sumber: Analisis Resiko Lingkungan, 2015



Bab 3

ANALISIS PRESSURE, STATE, DAN RESPONSE ISU LINGKUNGAN HIDUP DAERAH

Analisis isu lingkungan dan evaluasi kebijakan dilakukan dengan menggunakan pendekatan **PSR (Pressure – State – Response)**. Pendekatan ini menekankan pentingnya terlebih dahulu mengungkapkan pressure (penyebab atau tekanan) yang menekankan terjadinya perubahan komponen lingkungan. **Pressure** ini ditafsirkan ke dalam kegiatan pembangunan yang selama berlangsungnya memberi beban atau merusak komponen lingkungan hidup. Seiring dengan itu **State** (kondisi lingkungan abiotic-biotic-culture) yang terdegradasi dengan segala impact (dampak) yang ditimbulkan oleh keseluruhan kegiatan pembangunan yang dimaksud juga perlu diidentifikasi dan dirumuskan. Bertalian dengan itu pula **Response** (program dan aksi penanggulangan dampak) baik yang dilakukan oleh instansi terkait secara sektoral maupun yang dilakukan oleh sejumlah instansi terkait dalam bentuk program dan aksi lintas sektoral, termasuk yang dilakukan oleh lembaga swadaya masyarakat (LSM) dan masyarakat pada umumnya, juga perlu dievaluasi dan dianalisis sampai berapa jauh response tersebut relevan dengan penanganan dampak kegiatan pembangunan, tingkat keberhasilannya, beserta hambatan-hambatan yang dialaminya. Secara sederhana pendekatan PSR ini dapat divisualisasikan melalui gambar dibawah ini.



Gambar 3.1. Pendekatan PSR dalam Pengkajian Informasi Kinerja Pengelolaan Lingkungan Hidup Daerah Kabupaten Jombang



Tabel 3.1. Matrik Pressure-Status-Response

No	PSR	Uraian	Indikator	Contoh	Keterangan
A	Pressure	I. Kegiatan Manusia			
		1. Pertambangan	Beban pencemaran	<ul style="list-style-type: none">Total luas areal pertambangan yang telah berizin sebesar 40,66 Ha dengan volume adalah 438.461 ton/tahun dan 631.686 m³/tahun.Terdapat pertambangan liar di 65 lokasi dengan total luas areal sebesar 73,316 Ha tersebar di Kecamatan Kabuh, Kecamatan Kesamben, Kecamatan Perak, Kecamatan Bandar Kedungmulyo, Kecamatan Ngoro, dan Kecamatan Bareng	<ul style="list-style-type: none">Keadaan pertambangan yang telah berizin masih aktif.Keadaan pertambangan liar 21 lokasi diantaranya masih aktif dan 44 lokasi sudah tidak aktif.
			Pembukaan lahan	Luas pertambangan rakyat menurut jenis galian: <ul style="list-style-type: none">Luas pertambangan tanah urug 26,927 HaLuas pertambangan Sirtu 6,23 HaLuas pertambangan tanah Padas 7,5 Ha	Pembukaan lahan pertambangan ini yang telah memiliki izin, sedangkan lahan pertambangan secara ilegal belum diketahui luas dan kapasitas tambangnya.
		2. Pertanian	Beban pencemaran	<ul style="list-style-type: none">Kebutuhan pupuk untuk padi dan palawija sebanyak 2.605 TonKebutuhan pupuk untuk perkebunan sebanyak 1.585 Ton	
	3. Perindustrian	Beban pencemaran	<ul style="list-style-type: none">Jumlah industri kecil di Kabupaten Jombang sebanyak 542 industri.Jumlah industri Menengah di Kabupaten Jombang sebanyak 25 industri.Jumlah industri besar di Kabupaten Jombang	Kualitas udara ambien di sekitar pabrik tercemar. Dimana kadar masing-masing senyawa tersebut melebihi baku mutu.	



No	PSR	Uraian	Indikator	Contoh	Keterangan
				sebanyak 8 industri	
		4. Transportasi	Konsumsi BBM	<ul style="list-style-type: none">• Jumlah kendaraan yang menggunakan bahan bakar bensin saja sebanyak 327.222 buah kendaraan• Jumlah kendaraan yang menggunakan bahan bakar solar saja sebanyak 17.500 buah kendaraan• Jumlah kendaraan beban yang menggunakan bensin dan solar sebanyak 34.054 buah kendaraan• Jumlah kendaraan penumpang pribadi menggunakan bensin dan solar sebanyak 24.739 buah kendaraan• Jumlah kendaraan penumpang umum menggunakan bensin dan solar sebanyak 514 buah kendaraan• Jumlah kendaraan bus besar pribadi hanya menggunakan solar sebanyak 641 buah kendaraan• Jumlah kendaraan bus besar umum hanya menggunakan solar sebanyak 268 buah kendaraan	
				<ul style="list-style-type: none">• Jumlah kendaraan bus kecil pribadi hanya menggunakan solar sebanyak 144 buah kendaraan• Jumlah kendaraan bus kecil umum hanya menggunakan solar sebanyak 52 buah kendaraan• Jumlah kendaraan truk besar hanya menggunakan solar sebanyak 332 buah kendaraan• Jumlah kendaraan truk kecil menggunakan bensin dan solar sebanyak 8.801 buah kendaraan• Jumlah kendaraan roda dua hanya menggunakan bensin sebanyak 309.231 buah kendaraan	



No	PSR	Uraian	Indikator	Contoh	Keterangan
		5. Peternakan	Emisi	<ul style="list-style-type: none"> Jumlah ternak 343.470 ekor yang terdiri dari 4.663 ekor sapi perah, 115.852 ekor sapi potong, 323 ekor kerbau, 14 ekor kuda, 128.939 ekor kambing, 89.016 ekor domba, dan 4.663 ekor babi. Jumlah unggas 8.002.654 ekor yang terdiri dari 1.513.956 ekor ayam kampung, 1.398.536 ekor ayam petelur, 4.913.600 ekor ayam pedaging, dan 176.562 ekor itik. 	
		6. Permukiman	Limbah domestik	Timbulan sampah permukiman sebanyak 4.795,81 ton/hari	
			Limbah cair	Jumlah limbah cair yang diasumsikan dari rumah tangga sebanyak 164.427 m ³ /hari	
		II. Alam			
		1. Banjir	Kerugian	Total area terendam seluas 807 Ha Jumlah korban mengungsi sebanyak 1.069 jiwa Prakiraan kerugian material sebesar Rp. 5.602.080.000,00	
		2. Kekeringan	Kerugian	Total area yang mengalami kekeringan seluas 279 Ha Prakiraan kerugian material sebesar Rp. 1.045.500.000,00	
		3. Kebakaran Hutan	Kerugian	Total hutan yang terbakar seluas 19,10 Ha Prakiraan kerugian material sebesar Rp. 60.825.000,00	
		III. Demografi			
		1. Penduduk	Laju pertumbuhan	Pertumbuhan penduduk rata-rata Kabupaten Jombang 1,35 %	
			Jumlah penduduk	<ul style="list-style-type: none"> Jumlah penduduk laki-laki sebesar 691.392 jiwa 	



No	PSR	Uraian	Indikator	Contoh	Keterangan
				<ul style="list-style-type: none"> Jumlah penduduk perempuan sebesar 678.835 jiwa 	
B	State	Lahan	Kawasan hutan	<ul style="list-style-type: none"> Luas hutan lindung sebesar 934,9 Ha Luas hutan produksi sebesar 14.464,8 Ha 	
			Lahan kritis	Luas lahan kritis sebesar 97.074,1Ha	Lahan kritis ini bukan disebabkan pencemaran tanah
			Kerusakan hutan	Prakiraan luas kerusakan hutan adalah sebesar 427,10 Ha	Kerusakan hutan sebesar 19,10 Ha karena kebakaran hutan dan 408 Ha karena penebangan liar
		Air	Kualitas air sungai	Semua lokasi memenuhi baku mutu air badan air dengan parameter: pH, TDS, BOD, COD Beberapa lokasi tidak memenuhi baku mutu air badan air dengan parameter: TSS	Baku mutu disesuaikan dengan Peraturan Pemerintah No. 82 tahun 2001 kelas II
			Kualitas air sumur	Semua lokasi memenuhi baku mutu air bersih dengan parameter: Temperatur, pH, TDS, Nitrat, Nitrit, Sulfat, Detergen	Baku mutu disesuaikan dengan Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No. 416 tahun 1990 untuk baku mutu air bersih
			Kualitas air danau/situ/embung	Semua lokasi memenuhi baku mutu air bersih dengan parameter: Temperatur, pH, TDS, Nitrat, Nitrit, Sulfat, Detergen	Baku mutu disesuaikan dengan Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No. 416 tahun 1990 untuk baku mutu air bersih
			Kualitas air limbah domestik	Beberapa lokasi tidak memenuhi baku mutu air badan air dengan parameter: COD, TSS	Baku mutu disesuaikan dengan Keputusan Menteri Lingkungan Hidup No. 112 tahun 2003 untuk baku mutu



Informasi Kinerja Pengelolaan Lingkungan Hidup Daerah
Kabupaten Jombang Tahun 2016



No	PSR	Uraian	Indikator	Contoh	Keterangan
					air limbah domestik
		Udara	Kualitas udara ambien	Kualitas udara ambien di semua lokasi sekitar permukiman memenuhi baku mutu dengan parameter: SO ₂ , CO, NO ₂ , O ₃ , HC, TSP, Pb, H ₂ S, NH ₃	Baku mutu disesuaikan dengan Peraturan Gubernur Jatim No. 10 tahun 2009
		Kehati	Jumlah spesies	<ul style="list-style-type: none">Keadaan Flora sebanyak 1 spesies berstatus epidemikKeadaan fauna:<ul style="list-style-type: none">✓ golongan hewan menyusui sebanyak 1 spesies berstatus terancam dan 2 spesies berstatus berlimpah✓ golongan burung sebanyak 3 spesies terancam, dimana 2 spesies diantaranya berstatus dilindungi✓ golongan reptil sebanyak 1 spesies✓ golongan amphibi, golongan ikan, golongan keong, dan golongan serangga yang bebas	
C	Response	Lembaga: lembaga yang mengelola LH	Jumlah lembaga	<ul style="list-style-type: none">Terdapat 37 LSM L di Kabupaten Jombang	
		Kebijakan	Peraturan	Sampai tahun 2016 Kabupaten Jombang telah memiliki 11 buah Peraturan Daerah,	
		Anggaran	Alokasi anggaran bidang Lingkungan Hidup	Alokasi anggaran APBD Kabupaten Jombang untuk fungsi Lingkungan tahun 2016 adalah: <ul style="list-style-type: none">Pelayanan pencegahan pencemaran air sebesar Rp. 11.734.000,00Pelayanan pencegahan pencemaran udara sumber tidak bergerak sebesar Rp. 17.000.000,00	



Informasi Kinerja Pengelolaan Lingkungan Hidup Daerah
Kabupaten Jombang Tahun 2016



No	PSR	Uraian	Indikator	Contoh	Keterangan
				<ul style="list-style-type: none">• Pelayanan informasi kerusakan status kerusakan lahan dan/atau tanah untuk produksi biomass sebesar Rp. 800.000,00• Pelayanan tindak lanjut pengaduan masyarakat akibat adanya dugaan pencemaran dan/atau kerusakan Lingkungan Hidup sebesar Rp. 52.853.000,00	
		Program/Kegiatan	Rehabilitasi lingkungan	<ul style="list-style-type: none">• Melakukan penghijauan di lahan 610,60 Ha dengan 799.862 pohon• Rehabilitasi/Pemeliharaan Drainase/Trotoar Jalan• Pembangunan digester biogas pada areal unit pengolahan pupuk organik	
			Pengawasan amdal	Pada tahun 2016, jumlah rekomendasi UKL/UPL sebanyak 46 kegiatan dan rekomendasi SPPL sebanyak 290 kegiatan	
			Penegakan hukum	Pada tahun 2016 terdapat 18 pengaduan	
			Peran serta masyarakat	Beberapa penerima penghargaan yang diterima Kabupten Jombang: <ul style="list-style-type: none">• Sekolah Adiwiyata tingkat Propinsi ada 7 sekolah tahun 2016• Sekolah Adiwiyata tingkat Nasional ada 2 sekolah tahun 2016• Sekolah Adiwiyata tingkat Mandiri ada 3 sekolah tahun 2016• Desa Berseri Tingkat Mandiri ada 1 desa tahun 2016• Desa Berseri Tingkat Pratama ada 2 desa tahun	



Informasi Kinerja Pengelolaan Lingkungan Hidup Daerah
Kabupaten Jombang Tahun 2016



No	PSR	Uraian	Indikator	Contoh	Keterangan
				2016	
		Sumber daya manusia	tingkat pendidikan SDM	Pendidikan formal dari personil institusi lingkungan dari Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Jombang dan Badan Pembangunan Daerah Kabupaten Jombang terdapat 9 orang dengan tingkat pendidikan Master, 3 orang tingkat pendidikan sarjana, 4 orang tingkat pendidikan SLTA.	



3.1 Tataguna lahan

3.1.1 Pemanfaatan Sumber Daya Alam

Sumber daya alam yang merupakan modal penting dalam menggerakkan roda pembangunan di suatu daerah, baik dalam konteks negara, propinsi ataupun kabupaten. Oleh karena aspek pemanfaatan sumber daya alam merupakan suatu yang sangat strategis dalam menentukan jumlah penerimaan atau tingkat kontribusinya dalam pembentukan modal pembangunan. Pengelolaan SDA dalam perspektif otonomi daerah pada dasarnya adalah *power sharing* kewenangan pengelolaan SDA antara pemerintah dengan propinsi dan kabupaten/kota.

Menurut Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, kewenangan pengelolaan sumber daya alam tertuang dalam Bab 3 Pasal 17 dan 18. Untuk menghindari timbulnya dampak lingkungan dan pelestarian sumber daya alam Pemerintah Kabupaten Jombang telah meluncurkan Perda Nomor 8 Tahun 2008 tentang Pembentukan Badan Lingkungan Hidup.

Secara logika setiap kegiatan pembangunan dalam rangka peningkatan kesejahteraan masyarakatnya harus mendapatkan perhatian secara seksama, tentunya dalam pelaksanaannya diperlukan SDM dan sarana prasarana yang memadai. Oleh karenanya agar lingkungan hidup dapat dipertahankan melalui sistem pengelolaan lingkungan hidup diperlukan evaluasi dan identifikasi terhadap setiap kegiatan pembangunan yang potensial dan penting berpengaruh terhadap kondisi lingkungannya.

Kriteria dampak penting ditentukan oleh faktor-faktor sebagai berikut :

- Jumlah manusia yang terkena dampak
- Luas wilayah penyebaran dampak
- Lamanya dampak berlangsung
- Intensitas dampak
- Banyaknya komponen lingkungan lainnya yang akan terkena dampak
- Sifat komulatif dampak
- Berbalik atau tidak berbaliknya dampak (Sumber : Kep Men LH No.056 Tahun 1994)



Pembangunan yang seimbang dan terpadu antara aspek ekonomi, sosial dan lingkungan hidup adalah prinsip pembangunan yang senantiasa menjadi dasar pertimbangan utama guna menjamin keberlanjutan proses pembangunan itu sendiri. Untuk itu secara nasional kebijakan pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) yang menekankan perbaikan pengelolaan sumberdaya alam dan pelestarian fungsi lingkungan hidup dengan arah kebijakan untuk memperbaiki sistem pengelolaan sumberdaya alam agar mampu memberikan manfaat ekonomi.

Kebijakan umum pembangunan lingkungan hidup diarahkan pada :

- a. Meningkatkan pengendalian pencemaran lingkungan untuk mendorong sumber pencemar memenuhi baku mutu, menggunakan bahan baku yang ramah lingkungan dan meningkatkan kapasitas daerah di bidang pengendalian pencemaran.
- b. Meningkatkan konservasi sumberdaya alam dan pengendalian kerusakan lingkungan melalui kebijakan insentif dan disinsentif dan pembangunan income generating masyarakat dalam menunjang keberhasilan konservasi dan pemulihan kerusakan lingkungan
- c. Melaksanakan upaya-upaya terintegrasi dan terkoordinasi dalam pelaksanaan mitigasi dan adaptasi perubahan iklim
- d. Meningkatkan pentaatan lingkungan melalui pendekatan penataan ruang dan pengkajian dampak lingkungan
- e. Memperkuat akses masyarakat terhadap informasi lingkungan hidup
- f. Meningkatkan upaya penegakan hukum lingkungan secara konsisten terhadap pencemar dan perusak lingkungan
- g. Mendayagunakan potensi kerjasama luar negeri bidang lingkungan hidup
- h. Meningkatkan kapasitas kelembagaan pengelola lingkungan hidup di pusat maupun di daerah.

Sumberdaya alam dan lingkungan hidup sejak lama telah memberikan keuntungan yang besar bagi masyarakat dan Pemerintah Kabupaten Jombang. Namun keuntungan yang saat ini telah dicapai oleh pemerintah dan masyarakat



Kabupaten Jombang sedikit demi sedikit telah mengalami penurunan akibat terjadinya pemanfaatan sumberdaya alam tersebut karena pemanfaatannya melebihi daya dukungnya. Kabupaten Jombang mempunyai kawasan yang memiliki nilai strategis fungsi dan daya dukung lingkungan hidup.

Kebijakan dan strategi penataan ruang wilayah di Kabupaten Jombang berdasarkan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Jombang tahun 2009-2029 :

- a. Konservasi Sungai Brantas;
- b. Penetapan zona pengelolaan sumberdaya air sesuai dengan keberadaan wilayah sungai, cekungan air tanah dan mata air pada zona kawasan lindung, tidak diijinkan pemanfaatan sumberdaya air untuk fungsi budidaya termasuk juga untuk penambangan;
- c. Kerjasama antar wilayah dalam hal pengelolaan dan penanggulangan masalah sampah terutama di wilayah perkotaan;
- d. Pengalokasian tempat pembuangan akhir sesuai dengan persyaratan teknis;
- e. Pengendalian volume persampahan, yang dapat dilakukan melalui daur ulang dan komposting pada skala kawasan atau TPS dan rumah tangga dengan sistem 3R (recycle, reduce dan reuse);
- f. Penataan sistem drainase perkotaan;
- g. Pengembangan sistem pengolahan limbah terpadu di kawasan industri;
- h. Penataan sistem pengolahan air limbah domestik secara terpusat di kawasan perkotaan;
- i. Penataan sistem pengelolaan limbah di kawasan industri kecil yang menghasilkan limbah;
- j. Pemanfaatan limbah kegiatan peternakan dan pertanian sebagai sumber energi alternatif atau input kegiatan lain;
- k. Pengembangan kawasan cagar budaya dan ilmu pengetahuan lingkungan bangunan non gedung dan lingkungan bangunan gedung yang ada di Kabupaten Jombang. Pengembangan kawasan cagar budaya dan ilmu pengetahuan lingkungan bangunan non gedung antara lain :



1. Makam KH. Hasyim Asy'ari
Merupakan salah satu pendiri Nahdatul Ulama (NU) dan pendiri Pondok Pesantren Tebu Ireng, serta pernah menjabat sebagai ketua MIAI dan Masyumi.
2. Makam KH. Wachid Hasyim
Putra dari KH. Hasyim Asy'ari yang merupakan salah satu anggota BPUPKI termuda, serta pernah menjabat sebagai Menteri Agama RI yang pertama.
3. Makam KH. Abdurrahman Wahid
Putra dari KH. Wachid Hasyim yang merupakan mantan presiden RI ke 4 (empat), pernah menjabat sebagai ketua PB NU dan merupakan pendiri PKB.
4. Makam Sayyid Sulaiman
Merupakan salah satu penyebar agama Islam di Kabupaten Jombang pada era pasca runtuhnya Kerajaan Majapahit.
5. Sendang Made
Kawasan ini merupakan peninggalan sejarah petilasan Raja Airlangga yang berada di Kecamatan Kudu.
6. Candi Arimbi
Merupakan salah satu peninggalan Kerajaan Majapahit yang berada di Desa Ngrimbi Kecamatan Bareng yang merupakan gerbang atau gapura sebelah selatan Kerajaan Majapahit.
7. Goa Sigolo-golo
Terletak di Dusun Kranten, Desa Panglungan, Kecamatan Wonosalam, dimana keberadaan Goa ini dapat diarahkan menjadi satu kesatuan dengan wisata perkebunan Panglungan.
8. Situs Peninggalan Kerajaan Mojopahit
Kawasan Situs Ibukota Mojopahit yang lebih dikenal dengan Situs Trowulan merupakan satu-satunya situs perkotaan masa klasik di Indonesia. Situs yang luasnya 10 Km x 11 Km, cakupannya meliputi wilayah Kabupaten Mojokerto dan Kabupaten Jombang. Situs Mojoaphit



yang terdapat di Kabupaten Jombang meliputi Kecamatan Mojoagung, Kecamatan Mojowarno dan Kecamatan Sumobito. Di Situs Trowulan dapat dijumpai ratusan ribu artefak dan ekofak serta fitur yang berada di bawah maupun di permukaan tanah. Luas Ibukota Kerajaan Mojopahit seluas 10 x 11 Km, perlu dilakukan penelitian lebih lanjut untuk ditetapkan Tata Ruangnya, selanjutnya ditetapkan sebagai “Kawasan Cagar Budaya Nasional”. Melalui pengembangan Kawasan Mojopahit di Trowulan dengan potensi kulturalnya, dan nilai historis yang eksotis diharapkan mampu membangun brand image pariwisata budaya di Jawa Timur.

Untuk cagar budaya dan ilmu pengetahuan yang berupa lingkungan bangunan gedung dan halamannya di Kabupaten Jombang, antara lain berupa :

1. Kelenteng Hok San Kiong

Dikenal sebagai tempat ibadah Tridarma (Agama Taoisme, Budha, dan Konghucu) dan sebagai tempat berobat yang berada di Kecamatan Gudo. Setiap menjelang Tahun Baru Imlek, kelenteng ini mengadakan acara hajatan yang cukup meriah, seperti Wayang Potehi maupun Pagelaran Barongsay.

2. Gereja Mojowarno

Merupakan gereja tertua serta dulunya pernah menjadi pusat salah satu aliran Kristen Protestan pada jaman Belanda. Setiap setahun sekali, gereja ini mengadakan upacara kebetan dan unduh-unduh, yang sarat akan kultur lokal. Perubahan lingkungan yang telah terjadi sering masih dapat ditoleransi oleh masyarakat dan penentu kebijakan karena dianggap tidak menimbulkan kerugian padanya secara jelas dan berarti. Tetapi perubahan yang makin besar berujung pada nilai kerugian yang cenderung semakin besar bagi masyarakat dan bahkan pengambil kebijakan. Melalui inventarisasi kegiatan pembangunan dan aktivitas masyarakat di Kabupaten Jombang, perlu dilakukan identifikasi sumber pencemar dan dampak (*impact*) yang ditimbulkan, selanjutnya digeneralisasikan untuk menentukan status lingkungan saat ini (*present state*).



3.2. Luas Kawasan Lindung Berdasarkan RTRW dan Tutupan Lahan

Kawasan lindung merupakan kawasan yang ditetapkan dengan fungsi utama melindungi kelestarian lingkungan hidup yang mencakup sumber alam, sumber daya buatan, dan nilai sejarah serta budaya bangsa guna kepentingan pembangunan berkelanjutan (KEPPRES Nomor 32 Tahun 1990). Kawasan lindung di Kabupaten Jombang mempunyai fungsi utama untuk perlindungan sumber daya untuk kawasan setempat dan atau kawasan pengaruhnya. Pemantapan kelestarian kawasan lindung dapat dilakukan melalui pemanfaatan fungsi tanah baik pada kawasan lindung mutlak maupun kawasan lindung bawahannya.

Strategi pemantapan kawasan lindung pada dasarnya harus dikaitkan dengan konteks keseimbangan ekosistem dalam arti yang seluas-luasnya. Hal ini berarti bahwa pemantapan kawasan lindung harus memperhatikan faktor-faktor lainnya, yaitu :

- ❑ Keseimbangan hidro orologis
- ❑ Keseimbangan flora dan fauna
- ❑ Keseimbangan cagar budaya
- ❑ Perlindungan terhadap dampak lingkungan lainnya

Berdasarkan hasil kajian yang telah dilakukan, jenis kawasan lindung di wilayah Kabupaten Jombang meliputi :

- A. kawasan perlindungan terhadap kawasan bawahannya, meliputi : kawasan hutan lindung, kawasan bergambut, kawasan resapan air.
- B. kawasan perlindungan setempat, meliputi: sempadan sungai, sempadan pantai, kawasan sekitar danau atau waduk, ruang terbuka hijau.
- C. Kawasan Suaka Alam, Pelestarian Alam dan Cagar Budaya, meliputi : suaka alam, laut dan perairan, marga satwa dan marga satwa laut, cagar alam dan cagar alam laut, pantai berhutan bakau, taman nasional dan taman nasional laut, taman hutan raya, taman wisata alam dan taman wisata laut, kawasan cagar budaya dan ilmu pengetahuan alam.



- D. Kawasan rawan bencana, meliputi : rawan tanah longsor, rawan gelombang pasang, rawan banjir.
- E. Kawasan perlindungan geologi, yaitu kawasan yang memberikan perlindungan terhadap air tanah, meliputi cagar alam geologi, rawan bencana alam geologi, kawasan perlindungan terhadap air tanah, cagar alam biosfer.
- F. Kawasan lindung lainnya, meliputi Ramsar, taman burung, perlindungan plasma nutfah, pengungsian satwa, terumbu karang, koridor bagi jenis satwa dan biota laut yang dilindungi.

Hutan–hutan tersebut tersebar di tujuh kecamatan di Kabupaten Jombang. Tujuh kecamatan yang memiliki hutan tersebut adalah Bareng, Kabuh, Mojoagung, Mojowarno, Ngoro, Plandan, dan Wonosalam.

Sesuai dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2016 - 2018 yang menjelaskan bahwa kawasan hutan di tujuh kecamatan di Kabupaten Jombang ini sangat berperan penting dalam fungsi perlindungan sistem penyangga kehidupan dalam upaya mengatur tata air, mencegah banjir, mengendalikan erosi, dan memelihara kesuburan tanah.

3.3. Penggunaan Lahan Utama

Kabupaten Jombang mempunyai luas wilayah seluas 115.950 Ha yang terbagi atas 21 kecamatan. Seiring dengan pertumbuhan ekonomi, permintaan terhadap penggunaan lahan di Kabupaten Jombang akan terus berkembang untuk pembangunan sarana pendidikan, kemajuan teknologi, fasilitas umum kabupaten, transportasi, permukiman penduduk, industri, dan sebagainya. Tingginya permintaan pemenuhan kebutuhan lahan oleh berbagai sektor tersebut menyebabkan terjadinya perubahan penggunaan lahan pertanian dan ruang terbuka hijau. Oleh karena itu, Pemerintah Kabupaten Jombang perlu menetapkan konsep tata ruang yang saling berkesinambungan dengan melakukan berbagai pendekatan dari segi lingkungan dalam perencanaan dan pembangunannya.

Pemanfaatan lahan eksisting di Kabupaten Jombang terdiri dari lahan sawah, lahan kering, dan lahan hutan. Dari beragam pemanfaatan lahan tersebut, sebagian



besar didominasi oleh lahan sawah, namun ada pula yang didominasi oleh kawasan hutan (baik kawasan hutan lindung maupun kawasan hutan produksi). Luas lahan sawah terbesar yaitu di Kecamatan Mojowarno seluas 3.848 Ha, sedangkan luas sawah terkecil yaitu di Kecamatan Wonosalam seluas 488 Ha. Berdasarkan data yang diperoleh dari Perhutani KPH Kabupaten Jombang, luas kawasan hutan yang ada di Kabupaten Jombang pada tahun 2016 secara keseluruhan mencapai 15795,8 Ha atau sekitar 13,62 % dari luas wilayah Kabupaten Jombang, sedangkan luas lahan kering mencapai 22.045 Ha. Kawasan hutan menurut fungsi di Kabupaten Jombang terdiri dari Kawasan hutan lindung mencapai 871,20 Ha dan kawasan hutan produksi mencapai 15.924,60 Ha.

3.4. Lahan Kritis

Lahan Kritis merupakan lahan yang keadaan fisiknya demikian rupa sehingga lahan tersebut tidak dapat berfungsi secara baik sesuai dengan peruntukannya sebagai media produksi maupun sebagai media tata air. Akibat lahan kritis mengakibatkan daya resap tanah terhadap air menurun sehingga kandungan air tanah berkurang yang mengakibatkan kekeringan pada waktu musim kemarau, terjadinya arus permukaan tanah pada waktu musim hujan yang mengakibatkan bahaya banjir dan longsor menurunnya kesuburan tanah, dan daya dukung lahan serta keanekaragaman hayati. Apabila kondisi tersebut diatas dibiarkan terus berlangsung maka pada akhirnya akan menyebabkan produktifitas lahan dan produksi pertanian menurun sehingga pada akhirnya akan menyebabkan kemiskinan masyarakat, khususnya masyarakat tani.

Berdasarkan data dari Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Jombang tahun 2016, di Kabupaten Jombang terdapat lahan kritis dengan luas \pm 9040,4 Ha. Lahan kritis ini terdapat di beberapa Kecamatan di Kabupaten Jombang antara lain Kecamatan Bareng, Kecamatan Mojoagung, Kecamatan Mojowarno, Kecamatan Ngusikan, Kecamatan Plandaan, dan Kecamatan Wonosalam. Luas lahan kritis pada masing-masing kecamatan tersebut dapat dilihat pada **Tabel-4 (Lampiran)**.



Lahan kritis terluas ditemukan di Kecamatan wonosalam dengan luas 7.754,9 Ha atau sebesar 85,78 % dari total luas lahan kritis. Lahan kritis ini terbagi menjadi beberapa kelompok yaitu sangat ringan, ringan, sedang, berat, dan sangat berat. Di kecamatan Ngusikan memiliki lahan kritis dengan kategori sangat ringan sebesar 11,9 Ha dan kategori berat seluas 0,3 Ha. Sedangkan di Kecamatan Wonosalam terdapat lahan kritis dengan kategori sangat berat yaitu seluas 145,5 Ha. Data mengenai Luas lahan berdasarkan kategori lahan kritis secara lengkap tersaji pada **Tabel-4A** pada Lampiran.

3.5. Kerusakan Lahan Kering

Lahan kering merupakan sumberdaya lahan yang mempunyai potensi besar untuk menunjang pembangunan pertanian di Indonesia. Namun demikian, optimalisasi pemanfaatan lahan kering di Indonesia masih dihadapkan pada berbagai tantangan, yaitu penanggulangan degradasi lahan. Upaya penanggulangan degradasi lahan, dilakukan dengan mengadakan evaluasi kerusakan lahan tersebut. Dengan diketahui keadaan suatu lahan tersebut maka akan lebih mudah untuk menentukan langkah apa yang harus di ambil untuk mengatasi kerusakan lahan tersebut.

Untuk mengetahui kondisi lahan kering yang ada di Kabupaten Jombang, maka Pemda Kab Jombang mengadakan evaluasi kerusakan lahan kering. Evaluasi ini dilakukan di 31 titik sampel yang tersebar di beberapa kecamatan yang ada di Kabupaten Jombang.

Dari uji hasil yang dilakukan di 30 titik sampel (Jombang 1-30) didapatkan bahwa dari 10 parameter yang di uji hanya parameter redoks, pH (H₂O) 1 : 2,5, Derajat Pelulusan air, dan Komposisi Fraksi yang memenuhi baku mutu yang diprasyaratkan. Sedangkan untuk satu titik sampel (Petak 30A) didapatkan bahwa parameter Komponen Fraksi, Derajat pelulusan air, dan Redoks yang memenuhi baku mutu yang diprasyaratkan. Hasil lengkap dari evaluasi kerusakan lahan kering di Kabupaten Jombang dapat dilihat pada **Tabel-6 (Lampiran)**.



3.6. Perubahan Penggunaan Lahan

Berdasarkan data dari Dinas Pertanian Kabupaten Jombang tahun 2016, lahan pertanian yang telah beralih fungsi adalah seluas 634 hektar, yaitu menjadi lahan permukiman, industri, perkebunan, dan perairan/kolam. Luas masing-masing lahan tersebut dapat dilihat pada **Tabel-11 (Lampiran)**. Lahan pertanian yang beralih fungsi menjadi lahan permukiman merupakan perubahan penggunaan yang terbesar dibandingkan yang lain, yaitu 10.416 hektar. Hal ini menunjukkan bahwa kebutuhan penduduk Kabupaten Jombang akan permukiman sangat besar. Sedangkan terbesar kedua adalah untuk lahan industri, yaitu sebesar 400 hektar. Peralihan fungsi lahan pertanian menjadi lahan industri ini menunjukkan bahwa semakin banyak investor yang tertarik menanamkan modalnya, sehingga memungkinkan terjadi perputaran dan peningkatan perekonomian penduduk di Kabupaten Jombang. Peralihan fungsi terkecil adalah untuk lahan perairan/kolam, yaitu 14 hektar.

3.7. Pertambangan

Masalah pertambangan di Kabupaten Jombang menjadi perhatian yang cukup penting dari Pemerintah Kabupaten Jombang. Kegiatan sektor pertambangan di Kabupaten Jombang dikembangkan secara terkendali yang diarahkan untuk eksploitasi potensi tambang migas yang termasuk dalam Blok Gunting. Pengembangan kegiatan di sektor pertambangan diatur lebih lanjut dalam perencanaan yang lebih rinci untuk menghindari dampak negatif di wilayah Kabupaten Jombang. Sedangkan kegiatan pertambangan galian C tidak diarahkan untuk dikembangkan terutama di wilayah yang menjadi Wilayah Aliran Sungai Brantas dan/atau kawasan lindung.

Berdasarkan data dari Badan Lingkungan Hidup, pada tahun 2016 telah terdapat 7 lokasi tambang bahan galian yang telah berizin dan kurang-lebih 65 lokasi pertambangan galian yang ilegal. Tambang yang telah berizin ini terdiri dari 5 lokasi tambang Tanah Urug, 1 lokasi tambang Tanah Padas, 1 lokasi tambang Batu Andesit, dan 1 lokasi tambang sirtu. Berdasarkan **Tabel-13 (Lampiran)**,



luas areal tambang galian terbesar adalah tambang Tanah Padas yang dikelola oleh CV Wahyu karya, yaitu seluas 7,5 hektar. Luas areal tambang galian terkecil adalah tambang tanah urug yang dikelola oleh CV. Amarta Bumi, yaitu seluas 5,01 hektar.

3.8. Penghijauan dan Reboisasi

Semakin banyak pohon yang ditebangi untuk keperluan manusia, semakin banyak pula polusi dan akibat lain yang lebih parah akibat tindakan manusia yang sering merusak alam.

Reboisasi dilakukan untuk mengembalikan alam yang hijau, misalnya dalam satu lokasi hutan yang sudah kehilangan banyak pohon dilakukan penanaman kembali sehingga membuat pohon di hutan kembali normal dan berfungsi sebagai pelindung manusia dalam menyediakan udara, air dan mencegah banjir. Adapun manfaat reboisasi adalah untuk menjaga keseimbangan alam karena alam butuh penyeimbang agar manusia hidup dengan baik, selain itu reboisasi bermanfaat untuk mencegah terjadinya banjir, akar dari pohon akan melindungi tanah dan menahan air agar tidak turun kebawah dan menyebabkan banjir. Serta mampu mencegah adanya global warming.

Sedangkan penghijauan yaitu menanam pohon dan tumbuhan di tempat yang dianggap bisa menjadi tumbuh kembang tumbuhan tersebut. Ada banyak manfaat penghijauan yang kita peroleh diantaranya adalah sebagai berikut.

1. Manfaat secara hidrologis

Manfaat penghijauan yang pertama adalah mampu menjaga keseimbangan sistem air dialam, dengan adanya banyak pohon yang ditanam itu berarti kita sedang mencegah terjadinya banjir dan tanah longsor. Akar pohon sangat bermanfaat dalam menjaga kestabilan air dalam tanah.



2. Manfaat secara orologis
Penghijauan sangat bermanfaat untuk mencegah terjadinya erosi dan pengikisan tanah yang dapat menimbulkan bencana alam tanah longsor.
3. Manfaat secara ekologis
Dan penghijauan mampu menjaga lingkungan menjadi lebih asri, nyaman serta menjadi tempat tinggal yang layak bagi tanaman dan hewan didalamnya. Dengan begitu alam pun akan selaras dan menghasilkan apa yang dibutuhkan oleh manusia.
4. Manfaat secara klimatologis
Yang terakhir adalah manfaat klimatologis dimana penghijauan bisa berguna untuk mencegah polusi dan pemanasan global yang sudah terjadi di dunia ini. Tingkat karbondioksida yang cukup tinggi dalam dunia ini mengurangi jumlah oksigen. Sedangkan pohon atau tumbuhan menghasilkan oksigen yang berguna untuk kehidupan dibumi.

Pada tahun 2016, kegiatan penghijauan dan reboisasi di lakukan di beberapa kecamatan, antara lain Kecamatan Kabuh, Mojoagung, Mojowarno, Plandaan, dan Wonosalam. Rata-rata realisasi yang dilakukan baik luasan area dan jumlah pohon untuk penghijauan dan reboisasi lebih besar dari rencana. Luas area terbesar dan jumlah pohon terbanyak berada di Kecamatan Mojowarno, masing-masing 44,90 Ha dan 54.329 pohon. Secara rinci penghijauan dan reboisasi yang dilakukan di beberapa kecamatan di Kabupaten Jombang pada Tahun 2016 dapat dilihat pada **Tabel-14 (Lampiran)**.

3.9 Kualitas Air

Sumber daya air memiliki fungsi sangat penting bagi kehidupan manusia dan makhluk hidup lainnya karena merupakan kebutuhan utama seluruh makhluk hidup. Bagi manusia selain untuk minum, mandi dan mencuci, air juga bermanfaat sebagai sarana transportasi, sarana wisata/rekreasi, sarana irigasi/pengairan, Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA), dan lain-lain.



Pentingnya air bagi kesejahteraan umum, maka informasi mengenai ketersediaan sumber-sumber air dan kualitas air sangatlah diperlukan dalam mewujudkan pembangunan berkelanjutan di suatu wilayah. Untuk menjaga kualitas air yang dibutuhkan untuk kesejahteraan umum maka perlu dilakukan pengelolaan kualitas air dan pengendalian pencemaran air secara bijaksana. Kualitas air sangat tergantung pada karakteristik fisik, kimia dan biologinya. Adapun syarat-syarat kualitas air secara fisik, kimia dan biologi adalah sebagai berikut :

- Persyaratan fisik, meliputi warna, bau, rasa, kekeruhan, temperatur, dan daya hantar listrik.
- Persyaratan kimia, meliputi pH, kesadahan, besi, mangan, seng, krom cadmium, nitrat, chlor, sulfat, klorida, dan lain-lain.
- Persyaratan radioaktif, meliputi sinar alpha dan sinar betha. - Persyaratan mikroorganisme, meliputi total koliform dan koli tinja.

3.10 Sungai

Sungai adalah aliran air yang besar dan memanjang yang mengalir secara terus-menerus dari hulu (sumber) menuju hilir (muara), sedangkan menurut Kementerian PU, sungai didefinisikan sebagai sistem pengaliran air mulai dari mata air sampai muara dengan dibatasi pada kanan kirinya serta sepanjang pengalirannya oleh garis sempadan. Berdasarkan data dari Dinas PU Bina Marga dan Pengairan Kabupaten Jombang, Kabupaten Jombang memiliki 42 sungai. 42 nama sungai yang ada di kabupaten Jombang terdapat pada tabel dibawah ini.

Tabel 3.4. Nama Sungai yang Ada Di Kabupaten Jombang

No.	Nama Sungai	No.	Nama Sungai
1.	Kali Brantas	22.	Kali Gembyang
2.	Kali Konto Kediri	23.	Kali Kabuh
3.	Kali Pait Tengah	24.	Kali Kulak
4.	Kali Bening	25.	Kali Peleman
5.	Kali Sembung	26.	Kali Katemas
6.	Kali Jarak	27.	Kali Made



No.	Nama Sungai	No.	Nama Sungai
7.	Kali Pakel	28.	Kali Kromong
8.	Kali Jiken	29.	Kali Door
9.	Kali Krisik	30.	Kali Beng
10.	Kali Gogor	31.	Kali Pelabuhan
11.	Kali Bengawan	32.	Ngotok Ring Kanal
12.	Kali Putih	33.	Kali Jombang
13.	Kali Catak Banteng	34.	Kali Jombang Wetan
14.	Kali Gunting	35.	Kali Jombang Kulon
15.	Kali Jurang Jero	36.	Kali kuwik
16.	Kali Sumber aren	37.	Kali Sumber Pangkat
17.	Kali Pasinan	38.	Kali Langkap
18.	Kali Mangir	39.	Kali Maling
19.	Kali gondang	40.	Kali Wungu
20.	Kali Marmoyo	41.	Kali Seloatep
21.	Kali Bancang	42.	Kali Pancir



Sungai Rejoagung



Sungai Brantas

Gambar 3.3. Sungai Rejoagung di Kabupaten Jombang

Dari 42 sungai yang ada, Kali Brantas merupakan sungai terpanjang di Kabupaten Jombang dengan panjang 44.261 m, sedangkan Kali Gembyang merupakan sungai yang terpendek dengan panjang 1.500 m. Berdasarkan debit alirannya Kali Brantas memiliki debit yang paling besar yaitu 439,33 m³/detik, sedangkan Kali Maling memiliki debit aliran yang paling kecil yaitu 6,23 m³/detik. Nama, panjang, lebar dan debit sungai yang ada di Kabupaten Jombang secara lengkap dapat dilihat pada **Tabel-15** pada Lampiran.



➤ **Kualitas Air Sungai**

Untuk menjaga sekaligus mengembalikan fungsi saluran sungai diperlukan usaha pengelolaan dari berbagai pihak. Salah satu usaha untuk menjaga sekaligus mengembalikan fungsi saluran sungai, Dinas PU Bina Marga dan Pengairan menggelar kerja bakti membersihkan sejumlah saluran sungai dan daerah sempadan sungai.

Sasaran utama kegiatan ini adalah selain membersihkan tanaman liar yang tumbuh di sekitar area saluran juga membersihkan sampah yang menyangkut di sungai. Sampah dan tanaman liar yang mengganggu saluran dibersihkan sehingga saluran kembali normal. Selain itu Dinas PU Bina Marga Kabupaten Jombang juga menetapkan gari sempadan sungai.

Selain pengelolaan diperlukan pula pemantauan kualitas air sungai. Pemantauan kualitas air sungai bertujuan untuk mengetahui status kualitas air sungai di Kabupaten Jombang agar pengelolaannya dapat dilakukan dengan baik, dan sungai dapat berfungsi dengan baik sesuai peruntukannya. Kualitas air sungai di Kabupaten Jombang dipantau berdasarkan standar baku mutu Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 2 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Kualitas Air Dan Pengendalian Pencemaran Air di Provinsi Jawa Timur. Untuk menjaga kualitas sungai yang ada didaerahnya, Pemerintah Kabupaten Jombang melalui Badan Lingkungan Hidup melakukan pemantauan rutin dengan melakukan pengujian laboratorium. Pemantauan air sungai dilakukan di 18 titik pengambilan sampel pada bulan Januari sampai Juni, dan 21 titik pada bulan Juli sampai Desember, hal ini dikarenakan pengambilan sampel uji air sungai dan lokasi pengambilan air sungai menentukan kualitas air sungai yang ada. Adapun Lokasi pemantauan kualitas air sungai di Kabupaten Jombang untuk bulan Januari sampai dengan Juni adalah seperti berikut:

- Lokasi 1 : Sungai Gude Ploso (Sebelum PG Djombang Baru)
- Lokasi 2 : Sungai Gude Ploso (Depan PG Djombang Baru)
- Lokasi 3 : Sungai Gude Ploso (DAM Tambakberas)



- Lokasi 4 : Sungai Jombang Kulon (Rel KA Jabon)
- Lokasi 5 : Sungai Jombang Kulon (Samping Toko Anies)
- Lokasi 6 : Sungai Jombang Kulon (DAM Sambong)
- Lokasi 7 : Sungai Jombang Wetan (Setelah DAM Cokenongo)
- Lokasi 8 : Sungai Jombang Wetan (Samping Pegadaian)
- Lokasi 9 : Sungai Jombang Wetan (DAM Pancasila)
- Lokasi 10 : Avour Mojongapit (Pojoy Timur Pasar Pon)
- Lokasi 11 : Avour Mojongapit (Samping SPBU Mojongapit)
- Lokasi 12 : Avour Pandan (Depan SMEA Negeri)
- Lokasi 13 : Avour Pandan (Jembatan Rel KA)
- Lokasi 14 : Sungai Rejoagung IV A (Depan Balai Desa Kaliwungu)
- Lokasi 15 : Sungai Rejoagung IV A (Perempatan Jalan Pahlawan)
- Lokasi 16 : Sungai Gude (Belakang PT Seng Fong)
- Lokasi 17 : Sungai Gude (Depan Perum Denanyar Indah)
- Lokasi 18 : Sungai Rejoagung IV B (Samping Tirta Wisata)



Saluran Gude Ploso sebelum PG. Djombang Baru



Saluran Gude Ploso Dam Tambakberas



Kali Jombang Kulon Dam Sambong

Gambar 3.5. Pengambilan Sampel Untuk Analisi Laboratorium

Sedangkan untuk semester II yaitu bulan Juli-Desember uji kualitas air sungai diadakan dilokasi:

- Lokasi 1 : Sungai Gude Ploso (Sebelum PG Djombang Baru)
- Lokasi 2 : Sungai Gude Ploso (Depan PG Djombang Baru)
- Lokasi 3 : Sungai Gude Ploso (DAM Tambakberas)
- Lokasi 4 : Sungai Jombang Kulon (Rel KA Jabon)
- Lokasi 5 : Sungai Jombang Kulon (Samping Toko Anies)
- Lokasi 6 : Sungai Jombang Kulon (DAM Sambong)
- Lokasi 7 : Sungai Jombang Wetan (Setelah DAM Cokenongo)
- Lokasi 8 : Sungai Jombang Wetan (Samping Pegadaian)
- Lokasi 9 : Sungai Jombang Wetan (DAM Pancasila)



- Lokasi 10 : Afvour Mojongapit (Pojoyok Timur Pasar Pon)
- Lokasi 11 : Afvour Mojongapit (Samping SPBU Mojongapit)
- Lokasi 12 : Afvour Pandan (Depan SMEA Negeri)
- Lokasi 13 : Afvour Pandan (Jembatan Rel KA)
- Lokasi 14 : Sungai Rejoagung IV A (Depan Balai Desa Kaliwungu)
- Lokasi 15 : Sungai Rejoagung IV A (Perempatan Jalan Pahlawan)
- Lokasi 16 : Sungai Gude (Belakang PT Seng Fong)
- Lokasi 17 : Sungai Gude Denanyar (Depan Perum Denanyar Indah)
- Lokasi 18 : Sungai Rejoagung IV B (Samping Tirta Wisata)
- Lokasi 19 : Sungai Rejoagung IV (Depan PG. Tjoekir)
- Lokasi 20 : Sungai Sebelum Masuk Ngotok Ring Kanal (Ngotok Ring Kanal)
- Lokasi 21 : Sungai Jombang Wetan (Samping BLH)

Hasil dari pemantauan melalui analisis uji laboratorium akan uraikan sebagai berikut:

1. Hasil Pemantauan Parameter pH

Hasil pengujian parameter pH yang dilakukan pada 18 titik dan 21 titik lokasi pemantauan menunjukkan bahwa nilai pH air sungai masih memenuhi baku mutu sesuai ditetapkan oleh Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 82 Tahun 2001, hal seperti yang nampak pada tabel dibawah ini. Hasil analisis laboratorium menunjukkan bahwa pH rata-rata pada titik lokasi sampel adalah antara 6-7.



Tabel 3.5. Hasil Uji analisis Laboratorium Untuk Parameter pH (Januari-Juni)

Bulan	Hasil Pengujian pH di Lokasi																		Baku Mutu
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
Januari	7,6	7,3	7,2 8	7,0 2	7,5 5	7,27	7,68	7,07	7,5	7,06	7,45	7,59	7,08	7,53	7,2	7,35	7,28	7,63	6 - 9
Feb	7,72	7,22	7,6 6	7,5 7	7,6 8	7,72	7,07	7,7	7,7	7,53	7,3	7,63	7,34	7,65	7,67	7,16	7,72	7,66	6 - 9
Maret	7,85	6,84	7,4 4	7,4 3	7,3 9	7,31	7,63	6,85	7,29	Tidak ada air	7,39	7,75	6,8	6,71	7,08	7,76	7,42	7,2	6 - 9
April	7,46	7,5	7,7 8	7,2 4	7,7 8	7,82	7,45	7,41	7,56	7,01	7,87	7,2	7,23	7,14	7,34	7,44	7,73	7,42	6 - 9
Mei	7,65	7,66	7,7 3	7,2 8	7,4	7,46	7,61	7,38	7,26	Tidak ada air	7,25	7,31	7,22	Tida k ada air	7,68	7,31	7,51	7,28	6 - 9
Juni	6,88	6,97	7,7 6	7,7 1	7,8 1	7,76	7,21	7,48	7,66	Tidak ada air	7,88	7,43	7,51	Tida k ada air	7,93	7,43	7,91	7,24	6 - 9

Sumber: UPT Laboratorium Lingkungan BLH Kabupaten Jombang 2016



Tabel 3.6. Hasil Uji analisis Laboratorium Untuk Parameter pH (Juli -Desember)

Bulan	Hasil Pengujian pH di Lokasi																				Baku Mutu	
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20		21
Juli	-	7,39	7,24	7,16	7,34	7,43	-	-	7,19	Tidak ada air	7,86	7,36	7,36	7,13	7,16	7,1	7,2	7,36	7,39	7,46	7,27	6 - 9
Agst	-	7,55	7,34	7,7	7,6	7,67	7,02	6,96	7,39	Tidak ada air	7,38	7,57	7,63	6,69	7,06	7,91	Tidak ada air	7,61	7,13	7,61	7,9	6 - 9
Sept	7,1	7,27	7,23	7,12	7,28	30,6	7,37	7,18	7,35	Tidak ada air	7,7	7,53	7,31	7,18	7,22	8,31	Tidak ada air	7,08	7,3	7,76	7,34	6 - 9
Okt	Tidak ada air	7,43	7,18	7,22	7,33	7,47	7	7	7,89	7,1	7,18	7,29	7,28	7,3	7,2	7,21	Tidak ada air	7,11	7,32	7,81	7,27	6 - 9
Nov	7,4	7,43	7,32	7,46	7,01	7,54	7,39	7,7	7,39	Tidak ada air	7,93	7,03	7,13	6,76	6,8	7,5	7,25	6,98	6,83	6,32	6,84	6 - 9
Des	7,23	7,46	7,66	7,41	7,37	7,65	7,2	7,19	7,66	7,24	7,29	7,23	7,27	7,25	7,25	7,45	7,7	7,34	7,25	7,6	7,39	6 - 9

Sumber : UPT Laboratorium Lingkungan BLH Kabupaten Jombang 2016



2. Hasil Pemantauan Parameter TDS

Baku mutu konsentrasi *Total Dissolve Solid* (TDS) untuk kelas air II, III, dan IV berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 82 Tahun 2001 berturut-turut adalah sebesar 1.000 mg/L, 1.000 mg/L, 1.000 mg/L dan 2.000 mg/L. Nilai ini menunjukkan konsentrasi maksimum TDS yang seharusnya terkandung pada masing-masing badan air sesuai dengan kelasnya. Air sungai yang disampling dari 18 titik dan 21 titik uji menunjukkan hasil TDS memenuhi baku mutu. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 82 Tahun 2001 menentukan baku mutu air kelas II untuk parameter TDS sebesar 1000 mg/L.

3. Hasil Pemantauan Parameter TSS

Baku mutu konsentrasi *Total Suspended Solid* (TSS) untuk kelas air II, III, dan IV berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 82 Tahun 2001 berturut-turut adalah sebesar 50 mg/L, 50 mg/L, 400 mg/L dan 400 mg/L. Nilai ini menunjukkan konsentrasi maksimum TSS yang seharusnya terkandung pada masing-masing badan air sesuai dengan kelasnya.

Hasil analisis laboratorium untuk parameter TSS menunjukkan bahwa kualitas air sungai dari bulan Januari sampai Desember menunjukkan hasil TSS memenuhi baku mutu Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 82 Tahun 2001 kelas IV yaitu 400 mg/L.

4. Hasil Pemantauan Parameter DO (*Dissolved Oxygen*)

Parameter selanjutnya yang dipantau pada kualitas air sungai adalah konsentrasi oksigen terlarut (DO). Oksigen terlarut dibutuhkan oleh semua jasad hidup untuk pernapasan, proses metabolisme atau pertukaran zat yang kemudian menghasilkan energi untuk pertumbuhan dan pembiakan. Disamping itu, oksigen juga dibutuhkan untuk oksidasi bahan-bahan organik dan anorganik dalam proses aerobik.

Baku mutu konsentrasi *Dissolved Oxygen* (DO) untuk kelas air II, III, dan IV berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 82 Tahun 2001 berturut-turut adalah sebesar 4 mg/L, 3 mg/L, dan 0 mg/L. Nilai ini menunjukkan konsentrasi minimum DO yang seharusnya terkandung pada masing-masing badan air sesuai dengan kelasnya.



Hasil pemantauan parameter DO menunjukkan bahwa konsentrasi DO di semua lokasi titik sampel pada semester I di 18 titik memenuhi baku mutu kualitas air kelas IV, tetapi yang tidak memenuhi baku mutu kelas II (kurang dari 4 mg/L) adalah Avour Mojongapit (Samping SPBU Mojongapit), Avour Pandan (Jembatan Rel KA), Avour Mojongapit (Pojoek Timur Pasar Pon), Avour Pandan (Depan SMEA Negeri), Sungai Rejoagung IV A (Perempatan Jalan Pahlawan), Sungai Gude Ploso (DAM Tambakberas), Sungai Jombang Wetan (Samping Pegadaian), Sungai Gude Denanyar (Depan Perum Denanyar Indah), dan Sungai Jombang Kulon (DAM Sambong).

Untuk hasil uji kualitas air sungai semester II di 21 titik diketahui bahwa Sungai Rejoagung IV B (Samping Tirta Wisata), Sungai Sebelum Masuk Ngotok Ring Kanal (Ngotok Ring Kanal), Sungai Gude Ploso (DAM Tambakberas), Sungai Jombang Wetan (DAM Pancasila), Avour Mojongapit (Samping SPBU Mojongapit), Avour Pandan (Jembatan Rel KA), Sungai Rejoagung IV A (Depan Balai Desa Kaliwungu), Sungai Jombang Kulon (Rel KA Jabon), Sungai Jombang Kulon (Samping Tokoh Anis), Sungai Jombang Kulon (DAM Sambong), Avour Pandan (Depan SMEA Negeri), Sungai Rejoagung IV A (Perempatan Jalan Pahlawan), Sungai Rejoagung IV (Depan PG. Tjoekir), Sungai Jombang Wetan (Samping BLH), dan Avour Mojongapit (Pojoek Timur Pasar Pon) **menunjukkan angka di bawah 4mg/L.**

5. Hasil Pemantauan Parameter Biological Oxygen Demand (BOD)

Hasil uji analisis laboratorium yang dilakukan memperlihatkan bahwa 18 titik lokasi pantau menunjukkan rata-rata nilai BOD pada bulan Januari dan Febuari menunjukkan nilai melebihi baku mutu yang telah ditentukan yaitu lebih besar dari 3 mg/l (Sesuai dengan Kriteria Mutu Air Kelas II Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 82 Tahun 2001 Tentang Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air).

Sedangkan hasil uji kualitas air sungai dari bulan Juli hingga bulan Desember menunjukkan rata-rata terdapat nilai BOD yang melebihi baku mutu yang ditetapkan (kelas II: 3 mg/L).



6. Hasil Pemantauan Parameter Chemical Oxygen Demand (COD)

Dari hasil uji laboratorium yang dilakukan memperlihatkan bahwa pada bulan Maret di lokasi Sungai Jombang Kulon (Rel KA Jabon), Sungai Rejoagung IV A (Depan Balai Desa Kaliwungu), dan Sungai Rejoagung IV B (Samping Tirta Wisata) dimana nilai COD nya melebihi baku mutu yang telah ditentukan yaitu sebesar 25 mg/l (Sesuai dengan Kriteria Mutu Air Kelas II Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 82 Tahun 2001 Tentang Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air). Selain itu di bulan April pada lokasi Avour Pandan (Jembatan Rel KA) dan Sungai Jombang Kulon (Samping Tokoh Anis), di bulan September pada lokasi Sungai Jombang Wetan (Setelah Dam Cokenongo), dan di bulan November serta Desember di Beberapa sungai terdapat nilai COD yang melebihi baku mutu yang telah ditentukan yaitu sebesar 25 mg/l. COD Tertinggi berada dilokasi Sungai Gude Ploso (Depan PG Djombang Baru) yang tidak memenuhi baku mutu kelas II ataupun kelas IV.

7. Hasil Pemantauan Parameter NO₂, NO₃, Klorin Bebas

Dari hasil uji laboratorium yang dilakukan pada Bulan Januari, Februari, Maret, April, Mei, Juli, dan Desember untuk parameter NO₂, NO₃, dan Klorin Bebas didapatkan hasil analisis yang memenuhi baku mutu Sesuai dengan Kriteria Mutu Air Kelas IV Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 82 Tahun 2001 Tentang Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air). Sedangkan pada pengujian Parameter NO₃ di **bulan Juni** lokasi Sungai Rejoagung IV A (Perempatan Jalan Pahlawan) dan Avour Pandan (Depan SMEA Negeri), **bulan Agustus** lokasi Sungai Jombang Wetan (DAM Pancasila), S. Rejoagung IV (Depan PG. Tjoekir), Sungai Rejoagung IV B (Samping Tirta Wisata), **bulan September** lokasi Avour Mojongapit (Samping SPBU Mojongapit), **bulan Oktober** lokasi Sungai Jombang Kulon (Samping Tokoh Anis), Avour Mojongapit (Pojoek Timur Pasar Pon), Sungai Rejoagung IV A (Perempatan Jalan Pahlawan), dan **bulan November** lokasi Sungai Rejoagung IV A (Perempatan Jalan Pahlawan) didapatkan hasil analisis yang melebihi baku mutu Sesuai dengan Kriteria Mutu Air Kelas IV.



Hasil pemantauan kualitas air Sungai di Kabupaten Jombang selengkapnya dapat dilihat pada Tabel-17 di Lampiran.

3.11. Danau/Waduk/Situ/Embung

Waduk adalah danau alam atau danau buatan, kolam penyimpan atau pembendungan sungai yang bertujuan untuk menyimpan air merupakan tampungan air hujan yang pada saat musim kemarau air yang dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan penduduk di sekitarnya.



Gambar 3.6 Salah Satu Embung di Kecamatan Kabuh

Kabupaten Jombang melalui Dinas Pekerjaan Umum Pengairan Kabupaten Jombang mengelola 19 embung. Sebagian besar waduk sudah dimanfaatkan baik untuk sumber air irigasi, sumber air bersih, pembangkit tenaga listrik serta pariwisata. Mengingat berbagai kepentingan dalam pemanfaatan waduk maka perlu dipertegas batas lapangan kawasan perlindungan. Maka bila ada aktifitas lain di luar fungsi tersebut harus berada di luar batas sempadan kawasan waduk. Inventarisai waduk/embung di Kabupaten Jombang dapat dilihat pada **Tabel 3.7.** sedangkan Inventarisasi Mata Air di Kabupaten Jombang dapat dilihat **Tabel 3.8**



Tabel 3.7. Inventarisasi Danau/ Waduk/ Embung di Kabupaten Jombang

No.	Nama Danau/Waduk/Situ/Embung	Luas (Ha)	Volume (m ³)
1	Embung Kepuhrejo I Kudu	2,00	40.000
2	Embung Kepuhrejo II Kudu	4,00	100.000
3	Embung Wadung Kabuh	1,25	25.000
4	Embung Mangunan Kabuh	5,00	30.000
5	Embung Brumbung Kabuh	1,50	30.000
6	Embung Sempal Kabuh	1,50	90.000
7	Embung Karangjati Kabuh	1,10	22.000
8	Embung Karangpakis Kabuh	1,50	30.000
9	Embung Kradenan Kabuh	1,50	30.000
10	Embung Grogol Kudu	1,93	38.600
11	Embung Ngabar Kabuh	0,85	25.000
12	Embung Bangsri Plandaan	3,05	31.000
13	Embung Plabuhan Plandaan	3,48	17.700
14	Embung Sidowayah Bareng	1,00	15.000
15	Embung Grojogan Plandaan	5,00	234.500
16	Embung Banjardowo Kabuh	2,50	75.000
17	Embung Sumbergondang Kabuh	4,00	60.000
18	Embung Banjaragung Bareng	0,70	24.000
19	Embung Kalak Ngoro	0,30	12.000

Sumber : Dinas PU Bina Marga dan Pengairan Kab. Jombang, 2016

Tabel 3.8. Inventarisasi Mata Air di Kabupaten Jombang

No	Nama	Nama Lokasi
1	Mata Air Sumberboto	Ds.Sumberboto Mojowarno
2	Mata Air Kayu Puthul	Ds.Galengdowo-Wonosalam
3	Mata Air Sendang Kidang	Ds. Mutersari-Wonosalam
4	Mata Air Ubalan	Ds.Nagmpunan Bareng
5	Mata Air Apus	Ds.Carangwu-lung Wonosalam
6	Mata Air Sumberboto	Ds.Sumberboto Mojowarno
7	Mata Air Kayu Puthul	Ds.Galengdowo Wonosalam
8	Mata Air Sendang Kidang	Ds. Mutersari Wonosalam
9	Mata Air Ubalan	Ds. Nagmpunan Bareng
10	Mata Air Apus	Ds.Carangwu-lung-Wonosalam

Sumber : Dinas PU Bina Marga dan Pengairan Kab. Jombang, 2016



Untuk mengetahui kualitas air yang berasal dari mata air yang ada di Kabupaten Jombang maka Pemerintah Kabupaten Jombang melalui Badan Lingkungan Hidup mengadakan uji kualitas air melalui analisis laboratorium. Hasil analisis laboratorium tersebut tersaji dalam tabel dibawah ini.



Tabel 3.9. Hasil Analisis Laboratorium Kualitas Mata Air

Nama	pH	TDS (mg/L)	TSS (mg/L)	DO (mg/L)	BOD (mg/L)	COD (mg/L)	NO ₂ (mg/L)	Klorin bebas (mg/L)	Minyak dan Lemak (µg/L)	Detergen (µg/L)	Fecal coliform (jmh/1000ml)	Total coliform (jmh/1000ml)
Mata Air Sumberboto	8	207	22,3	6	0,67	8	0,062	0,04	349	48	120	250
Mata Air Kayu Puthul	6,98	175	20	5,5	1,02	6	0,05	0,067	235	67	285	312
Mata Air Sendang Kidang	7,6	200	19,3	6,3	0,98	5,7	0,065	0,09	397	50	310	277
Mata Air Ubalan	8,1	110	23,1	6,4	0,6	6,2	0,045	0,013	409	59	298	342
Mata Air Apus	7,5	182	14,5	5,5	0,76	6	0,06	0,024	341	78	316	256
Mata Air Sumberboto	7,5	267	12,8	5,1	0,59	9,7	0,05	0,01	546	58	123	300
Mata Air Kayu Puthul	7,3	202	22	5	0,97	5,98	0,067	0,045	301	70	250	310
Mata Air Sendang Kidang	7,5	210	18,9	6,1	1,23	5,5	0,09	0,086	300	49,5	298	275
Mata Air Ubalan	7,9	132	20	6	0,76	6,79	0,05	0,02	423	63	290	340
Mata Air Apus	7,1	174	16,7	6	0,62	6,5	0,051	0,031	312	70	311	278

Dari Tabel 3.9 terlihat hasil analisis laboratorium pada lokasi mata air yang dipilih menunjukkan bahwa semua parameter memenuhi baku mutu Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 416 Tahun 1990.



3.12. Air Sumur

Air sumur merupakan air tanah, terdapat dalam pori-pori tanah atau pada celah-celah batuan. Air tanah terbentuk dari air hujan. Air hujan yang masuk yang masuk itu yang menjadi ladangan air tanah. Untuk memperoleh air tanah harus dilakukan pengeboran.

Kebutuhan air semakin lama semakin meningkat sejalan dengan meningkatnya kebutuhan hidup manusia dan penambahan penduduk, peningkatan ini harus teramati baik dari sisi kualitas dan kuantitas. Di Kabupaten Jombang rata-rata penduduk masih menggunakan air sumur sebagai air minum dan untuk kebutuhan sehari-hari. Potensi air tanah bervariasi antara tempat yang satu dengan tempat yang lain, sehingga kualitas dan kuantitas air yang satu dan yang lain pun tidak sama. Salah satu jenis sumber air bersih yang banyak digunakan adalah sumur gali.

Berbagai penyebab adanya pencemaran air di Kabupaten Jombang seperti kegiatan pembangunan fasilitas pariwisata, rumah sakit, infrastruktur, dan industri. Menanggapi fenomena tersebut Bidang Pengendalian Pencemaran BLH Kabupaten Jombang memeriksa 24 air sumur yang tersebar di Kabupaten Jombang. Sesuai dengan Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 416/MENKES/PER/IX/1990 tentang syarat-syarat dan pengawasan kualitas air, parameter yang diuji meliputi parameter fisika, kimia dan biologi.

Berdasarkan hasil pemantauan di 20 titik lokasi seperti pada **Tabel-19 (Lampiran)** melalui analisis uji laboratorium akan uraikan sebagai berikut, terdapat beberapa parameter uji yang melebihi baku mutu menurut Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 416/MENKES/PER/IX/1990, yaitu Mangan dan Total Coliform. Lokasi sumur pantau yang parameternya melebihi baku mutu, yaitu sebagai berikut.



1. Parameter Mangan

- Dsn. Tebu ireng RT. 05 RW. 09
- Ds. Jombang Kec. Jombang (Sumur bor Bpk. Saiful)
- Dsn. Bapang Ds. Sumber mulyo Kec. Pogoroto
- Ds. Tugu sumberejo Kec. Peterongan (Ibu Nur wayan)
- Ds. Ngrobokan Kec. Mojowarno (Bpk. Sareh)
- Dsn. Simawau Ds. Ketapang kuning Kec. Ngusikan

2. Parameter Total Coliform

- Dsn. Ngeledok Ds. Mojokropak Kec. Tambolang
- Dsn. Kedungsari Desa Balongsari Kec. Megaluh
- Dsn. Cangkring Malang Ds. Pucangro
- Dsn. Tebu ireng RT. 05 RW. 09
- Dsn. Bapang Ds. Sumber mulyo Kec. Pogoroto
- Ds. Murukan Kec. Mojoagung (Bpk. Khoqiyul)
- Ds. Pelabuhan Kec. Plandaan
- Dsn. Carang puspo Ds. Carang rejo Kec. Kesamben
- Ds. Bangkalan RT. 02 RW. 01 Kec. Sumobito
- Dsn. Simawau Ds. Ketapang kuning Kec. Ngusikan
- Ds. Kabuh Kec. Kabuh (Sumur Bpk. Suwono)
- Ds. Tapen Kec. Kudu (Sumur Bpk. Sudarto)
- Ds. Genukwatu Kec. Ngoro (Sumur Bpk. Miftahul Huda)
- Ds. Bareng Kec. Bareng (Sumur ibu ida)
- Ds. Tinggar Kec. Bandarkedungmulyo (Sumur Bpk. Mashuda)
- Dsn. Tondowulan RT. 03 RW. 01 Ds. Temuwulan Kec. Perak

Berdasarkan hasil pemantauan yang telah dilakukan terlihat bahwa kondisi air sumur masyarakat tercemar ringan karena semua parameter yang diamati menunjukkan hasil diatas ambang baku mutu kelas air. Disamping itu juga terdapat kecendrungan makin meningkatnya tekanan terhadap kuantitas dan kualitas air, baik air permukaan maupun air tanah akibat kerusakan daerah tangkapan air dan pelanggaran sumberdaya air.



3.13 Kualitas Udara

Udara merupakan sumber daya alam yang paling berpengaruh bagi kehidupan makhluk hidup di bumi, sehingga harus dijaga dan dipelihara kelestarian karena tanpa udara, makhluk hidup bisa kehilangan kehidupannya. Dengan semakin meningkatnya ilmu pengetahuan dan teknologi (iptek), semakin tinggi pula aktivitas kegiatan ekonomi manusia, di antaranya dengan semakin pesatnya perkembangan proses industrialisasi dan sistem transportasi. Sebagai konsekuensi logis, maka semakin meningkat pula zat-zat polutan yang dikeluarkan kegiatan industri maupun transportasi tersebut. Keberadaan zat-zat polutan di udara ini tentu akan berpengaruh terhadap proses-proses fisik dan kimia yang terjadi di udara.

3.13.1. Kualitas Udara Ambien

Bentuk upaya pemantauan dari pengelolaan udara ambien adalah dengan melakukan uji laboratorium udara ambien di beberapa titik lokasi. Menurut sumber polutannya maka pengambilan sampel ini diperoleh dari lokasi yang dapat mewakili lokasi di Kabupaten Jombang. Lokasi pengambilan sampel yaitu sebagai berikut:

1. Sekitar PR Sumber Agung
2. Sekitar MPS Perak
3. Sekitar MPS Ngoro
4. Sekitar PR Ainur Jaya
5. Sekitar MPS Ploso
6. Transportasi Jl. Basuki Rahmat No. 1 Jombang
7. Industri PT. Seng Fong Jl. Yos Sudarso No. 173 Tunggorono
8. Perkantoran Area PEMDA Jl. Wahid Hasyim No. 137
9. Perumahan Perum Jombang Permai Jl. Hayam Wuruk

Hasil Pengujian Udara ambien secara analisis laboratorium dapat dilihat pada **Tabel-30**. Hasil analisis laboratorium tersebut selanjutnya dibandingkan dengan Baku Mutu Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 10 Tahun 2009 tentang baku



mutu udara ambien dan emisi sumber tidak bergerak di Jawa Timur. Dari tabel tersebut diketahui bahwa terdapat parameter yang tidak memenuhi baku mutu, yaitu Parameter NO₂ di lokasi Sekitar MPS Perak dan Sekitar PR Ainur Jaya, Sedangkan parameter O₃ di lokasi Sekitar PR Sumber Agung dan Sekitar PR Ainur Jaya.

3.13.2. Penggunaan Bahan Bakar

Sektor transportasi mempunyai ketergantungan yang tinggi terhadap sumber energi. Seperti diketahui penggunaan energi inilah yang terutama menimbulkan dampak terhadap lingkungan. Hampir semua produk energi konvensional dan rancangan motor bakar yang digunakan dalam sektor transportasi masih menyebabkan dikeluarkannya emisi pencemar ke udara. Penggunaan BBM (Bahan Bakar Minyak) bensin dalam motor bakar akan selalu mengeluarkan senyawa-senyawa seperti CO (karbon monoksida), THC (total hidro karbon), TSP (debu), NO_x (oksida-oksida nitrogen) dan SO_x (oksida-oksida sulfur). Premium yang dibubuhi TEL, akan mengeluarkan timbal. Solar dalam motor diesel akan mengeluarkan beberapa senyawa tambahan di samping senyawa tersebut di atas, yang terutama adalah fraksi-fraksi organik seperti aldehida, PAH (Poli Alifatik Hidrokarbon), yang mempunyai dampak kesehatan yang lebih besar (karsinogenik), dibandingkan dengan senyawa-senyawa lainnya.

Berdasarkan data dari Dinas Perhubungan Kabupaten Jombang seperti yang dirinci pada **Tabel-31 (Lampiran)**, penggunaan bahan bakar pada kendaraan bermotor terlihat bahwa jumlah kendaraan yang menggunakan bensin lebih banyak daripada solar. Pemakaian bensin terbanyak yaitu pada kendaraan roda dua sebanyak 309.231 unit kendaraan, sedangkan pemakaian bahan bakar solar lebih banyak digunakan oleh mobil barang sebanyak 12.358 unit.

3.13.3. Jumlah Kendaraan Bermotor

Tingginya laju pertumbuhan penduduk berdampak pada peningkatan jumlah transportasi sebagai sarana aktivitas dalam pemenuhan kebutuhan hidupnya. Banyak orang terdorong untuk menggunakan kendaraan pribadi terutama sepeda



motor karena ketiadaan transportasi umum yang aman, nyaman, dan tepat waktu. Pembangunan dalam bidang transportasi tidak hanya membawa perubahan yang positif, namun juga menimbulkan terjadinya peningkatan jumlah kendaraan bermotor yang sangat pesat. Semakin bertambahnya jumlah kendaraan bermotor telah menimbulkan peningkatan pencemaran udara yang semakin terasa di kota besar. Pembakaran bensin yang tidak sempurna dalam mesin kendaraan bermotor merupakan salah satu penyumbang terbesar polusi udara di kota. Polusi udara yang dikeluarkan bisa berupa karbon monoksida, nitrogen oksida, belerang oksida, partikel padatan seperti timbal. Senyawa-senyawa tersebut bisa dijumpai dalam bahan bakar kendaraan bermotor dan minyak pelumas mesin.

Berdasarkan data yang diperoleh dari Dinas Perhubungan Kabupaten tentang Penjualan Kendaraan Bermotor, dapat diketahui penjualan kendaraan bermotor paling banyak yaitu roda dua. Data dari tahun 2014 hingga 2016, jumlah penjualan kendaraan roda dua meningkat. Begitu hal nya dengan penjualan kendaraan roda empat dan bus/truck.

3.13.4. Kondisi Jalan

Jalan merupakan salah satu prasarana transportasi yang penting guna memperlancar kegiatan perekonomian selain untuk memudahkan mobilitas penduduk dari satu daerah menuju daerah lainnya. Panjang jalan kelas IIIB yang ada diseluruh wilayah Kabupaten Jombang mencapai 665.654 km.

Meningkatnya volume lalu lintas di ruas jalan Wilayah Kabupaten Jombang seiring berjalannya waktu menuntut adanya peningkatan kapasitas ruas jalan tersebut. Adanya perubahan penambahan ruas jalan karena harus membebaskan lahan yang semula digunakan untuk media tanaman, terjadi pengurangan penyerapan karbon monoksida untuk setiap panjang 1 meter ruas jalan yang mengakibatkan polusi udara akan meningkat. Selain itu, ada dampak positif adanya perbaikan infrastruktur memiliki kontribusi dalam meningkatkan produktivitas dan diharapkan mampu mendukung pertumbuhan ekonomi dalam jangka panjang.



3.14 Resiko Bencana

Dengan adanya perubahan iklim yang saat ini yang tidak menentu akan sedikit perlahan akan menimbulkan beberapa peristiwa kecil dan besar di muka bumi. Penelitian yang telah dilakukan para ahli selama beberapa dekade terakhir ini menunjukkan bahwa ternyata makin panasnya planet bumi dan berubahnya sistem iklim di bumi terkait langsung dengan gas-gas rumah kaca yang dihasilkan oleh aktifitas manusia. Dengan tidak menentunya suhu bumi tentunya akan menimbulkan beberapa peristiwa alam atau bencana alam. Selama tahun 2016 Kabupaten Jombang mengalami bencana alam banjir, kekeringan, dan kebakaran hutan. Berikut data daerah rawan bencana di Kabupaten Jombang pada Tahun 2016.

Tabel 3.10. Daerah Rawan Bencana Di Kabupaten Jombang

NO	KECAMATAN	JUMLAH DS/KEL.	BANJIR/ GENANGAN	TANAH LONGSOR	PUTING BELIUNG	KEKERINGAN
1	PERAK	13	7	0	10	0
2	GUDDO	18	2	0	1	0
3	NGORO	13	4	0	0	0
4	BARENG	13	3	6	1	4
5	WONOSALAM	9	3	8	2	3
6	MOJOAGUNG	18	8	3	2	0
7	MOJOWARNO	19	9	0	7	0
8	DIWEK	20	1	0	7	0
9	JOMBANG	20	14	0	1	0
10	PETERONGAN	14	5	0	1	0
11	SUMOBITO	21	13	0	0	0
12	KESAMBEN	14	10	0	4	0
13	TEMBELANG	15	4	0	0	0
14	PLOSO	13	7	0	0	1
15	PLANDAAN	13	10	3	0	1
16	KABUH	16	4	0	10	7
17	KUDU	11	7	0	2	1
18	BANDAR KDM.	11	5	0	2	1
19	JOGOROTO	11	4	0	3	0
20	MEGALUH	13	4	0	2	0
21	NGUSIKAN	11	8	0	0	4
	JUMLAH	306	132	20	55	22



3.14.1 Bencana Banjir

Banjir merupakan fenomena alam yang biasa terjadi di suatu kawasan yang banyak dialiri oleh aliran sungai. Secara sederhana banjir dapat didefinisikan sebagaimana hadirnya air di suatu kawasan luas sehingga menutupi permukaan bumi kawasan tersebut. Banjir terjadi karena luapan air yang sungai dan jebolnya tanggul sungai akibat hujan deras dan kiriman air dari hulu, berikut data jumlah kejadian banjir di Kabupaten Jombang dari tahun 2012 s/d 2016 :

Tabel 3.11. Data Jumlah Kejadian Banjir di Kabupaten Jombang
dari Tahun 2012 s/d 2016

2012	2013	2014	2015	2016	2017
15	24	8	35	20	102



Gambar 3.7. Bencana Banjir di Kabupaten Jombang Tahun 2012 s/d 2016

Perubahan iklim yang menyebabkan pola hujan berubah dimana saat ini hujan yang terjadi mempunyai waktu yang pendek tetapi intensitasnya tinggi. Akibat keadaan ini saluran-saluran yang ada tidak mampu lagi menampung besarnya aliran permukaan dan tanah-tanah cepat mengalami penjenruhan.

Menurut data yang diperoleh dari Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Jombang tahun 2016, bencana banjir terjadi di sepuluh kecamatan yang ada di Kabupaten Jombang dengan total area terendam seluas 1430 Ha yang



menyebabkan 1.069 KK mengungsi dan kerugian yang disebabkan mencapai Rp. 170.000.000,00. Bencana banjir terparah berada di Kecamatan Bandar Kedung Mulyo. Pemda Kabupaten Jombang memiliki program upaya pencegahan dan penanganan bencana banjir, upaya tersebut meliputi :

- ✓ Merekomendasikan upaya perbaikan atas prasarana dan sarana pengendalian banjir sehingga dapat berfungsi sebagaimana direncanakan.
- ✓ Memonitor dan mengevaluasi data curah hujan, banjir, daerah genangan dan informasi lain yang diperlukan untuk meramalkan kejadian banjir, daerah yang diidentifikasi terkena banjir serta daerah yang rawan banjir.
- ✓ Menyiapkan peta daerah rawan banjir dan lokasi pos pengamat debit banjir/ketinggian muka air banjir di sungai penyebab banjir.
- ✓ Pembangunan tembok penahan dan tanggul disepanjang sungai, akan sangat membantu untuk mengurangi bencana banjir pada tingkat debit banjir yang direncanakan.

3.14.2. Bencana Kekeringan



Gambar 3.8. Bencana Kekeringan di Kabupaten Jombang

Bencana kekeringan juga melanda Kabupaten Jombang di musim kemarau. Bencana kekeringan ini melanda 279 Ha Lahan di Kabupaten Jombang. Kekeringan ini melanda di beberapa kecamatan, di Kecamatan Bareng sekitar 145 hektar mengalami kekeringan terparah di Kecamatan Bareng.



Selain di Kecamatan Bareng, kecamatan Plandan dan Mojowarno juga mengalami kekeringan. Kerugian bencana kekeringan ini diperkirakan sebesar Rp. 1.045.500.000,00.

3.14.3. Bencana Kebakaran Hutan

Kebakaran hutan hampir setiap tahunnya di Kabupaten Jombang, baik secara langsung maupun tidak langsung, yang mana dampak dari kebakaran hutan telah menimbulkan pemanasan global. Pada tahun 2016 di Kabupaten Jombang tidak ada bencana kebakaran hutan, sehingga tidak kerugian.

3.14.4. Bencana Alam Tanah Longsor dan Gempa Bumi

Bencana Alam Tanah Longsor dan Gempa Bumi juga melanda Kabupaten Jombang tahun 2016. Longsor adalah proses pergerakan material yang besar dari satu tempat ke tempat lain yang lebih rendah akibat pengaruh gravitasi baik cepat maupun lambat (Zuidam, 1986). Berikut data jumlah kejadian longsor di Kabupaten Jombang dari tahun 2012-2016 :

Tabel 3.12. Data Jumlah Kejadian Longsor di Kabupaten Jombang dari Tahun 2012 s/d 2016

2012	2013	2014	2015	2016	Total
2	1	1	6	6	16



Gambar 3.9. Bencana Longsor di Kabupaten Jombang Tahun 2012 s/d 2016

Bencana tanah longsor di tahun 2016 melanda Kecamatan Bandar Kedung Mulyo dengan jumlah perkiraan kerugian mencapai Rp. 5.000.000,00 dan Wonosalam kerugian mencapai Rp. 25.000.000,00.

3.14.5. Bencana Angin Kencang dan Angin Putting Beliung

Puting Beliung adalah Angin yang berputar dengan kecepatan lebih dari 63 km/jam yang **Bergerak Secara Garis Lurus** dengan lama kejadian maksimum 5 menit dan terjadi pada siang atau sore hari pada musim pancaroba, berikut data jumlah kejadian Angin putting beliung di Kabupaten Jombang dari tahun 2012-2016 :

Tabel 3.13. Data Jumlah Kejadian Angin Puting Beliung di Kabupaten Jombang dari Tahun 2012 s/d 2016

2012	2013	2014	2015	2016	Total
23	8	7	4	1	43



Gambar 3.10. Bencana Angin Kencang dan Puting Beliung di Kabupaten Jombang Tahun 2012 s/d 2016

3.14.6. Bencana Kekeringan

Kekeringan adalah ketersediaan air yang jauh di bawah dari kebutuhan air untuk kebutuhan hidup, pertanian, kegiatan ekonomi dan lingkungan, berikut jumlah data kekeringan di Kabupaten Jombang dari tahun 2012-2016 :

2012	2013	2014	2015	Total
11	4	8	6	30



Gambar 3.11. Bencana Kekeringan di Kabupaten Jombang Tahun 2012 s/d 2016

3.14.7. Bencana Paling Parah Terjadi d Kabupaten Jombang

Pada tahun 2014 Kabupaten Jombang mengalami bencana **TANAH LONGSOR** tepatnya pada tanggal 28 JANUARI 2014 **DI DSN. KOPEN DS. NGRIMBI KEC. BARENG** yang mengakibatkan 14 Orang meninggal dunia dan 4 Rumah tertimbun tanah dan **BANJIR BANDANG DI KECAMATAN WONOSALAM PADA TAHUN 2006** yang merusak pemukiman penduduk, infrastruktur dan fasum.



Gambar 3.12. Bencana Paling Parah di Kabupaten Jombang

FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI KERENTANAN KABUPATEN JOMBANG TERHADAP BENCANA

1. Kemiskinan

Kemiskinan pada umumnya membuat orang semakin rentan terhadap dampak bencana.

2. Peningkatan jumlah populasi

Pertumbuhan populasi memicu lebih banyak orang yang akan terpaksa hidup dan bekerja di daerah-daerah yang tidak aman dan lebih banyak orang yang bersaing untuk suatu jumlah sumber yang terbatas yang mungkin menuju pada konflik.



3. Urbanisasi yang tinggi

Perpindahan penduduk ke kawasan terkait dengan akses lapangan kerja.

4. Kurangnya kesadaran dan informasi

Masyarakat akan semakin rentan karena tidak mengakses informasi dan memperoleh pengetahuan untuk menghadapi bencana.

KAPASITAS KABUPATEN JOMBANG MENGHADAPI BENCANA

1. Pendidikan dan pelatihan peningkatan kapasitas aparatur pemerintah terkait dengan API-PRB;
2. Kerjasama lintas sektoral antar SKPD, dunia Usaha dan Masyarakat untuk meningkatkan pengetahuan dan kapasitas API-PRB;
3. Terlaksananya berbagai program untuk meningkatkan kapasitas masyarakat terhadap bencana;
4. Penambahan dan optimalisasi Early Warning System (EWS);
5. Pengembangan Pusdalops berbasis internet dan server sebagai Pusat Data dan Informasi untuk diseminasi informasi penanggulangan bencana.

3.15 Perkotaan

3.15.1 Permukiman



Menurut Undang-Undang No.1 tahun 2011, permukiman adalah bagian dari lingkungan hunian yang terdiri atas lebih dari satu satuan perumahan yang mempunyai prasarana, sarana, utilitas umum, serta mempunyai penunjang kegiatan fungsi lain di kawasan perkotaan atau kawasan perdesaan. Adanya permukiman dapat ditandai dengan fasilitas yang mendukung keberlangsungan kehidupan dari suatu penduduk setempat. Sehingga permukiman dikembangkan untuk mewujudkan kondisi daerah yang layak huni, aman, nyaman, damai dan sejahtera serta berkelanjutan.



Konsep Pengembangan Kawasan Permukiman

Konsep makro pengembangan kawasan permukiman adalah menata kawasan permukiman informal agar lebih tertata dan mengembangkan kawasan permukiman baru dengan intensitas yang lebih rendah. Konsep makro kawasan adalah sebagai berikut:

➤ Permukiman Kampung (Informal)

- Mengikuti pola permukiman kampung yang sudah ada dengan tetap mempertahankan fungsi kawasan.
- Menciptakan nilai estetika pada kawasan permukiman kampung dengan pengaturan tata hijau untuk menambah kelestarian dan menjaga keasrian disekitar lingkungan permukiman tersebut.
- Pengembangan resapan air secara individu atau kolektif, antara lain berupa sumur resapan. Resapan air diupayakan untuk permukiman privat maupun publik.
- Penyediaan fasilitas dan utilitas yang memadai, baik berupa penyediaan maupun pelayanannya.
- Peningkatan sarana dan prasarana transportasi.

➤ Permukiman Terencana.

Kawasan permukiman terencana merupakan kawasan permukiman yang direncanakan lebih tertata dan dilengkapi dengan sarana dan prasarana permukiman yang lebih memadai dibandingkan dengan kawasan permukiman informal. Pengembangan sarana dan prasarana lingkungan di kawasan permukiman terencana diarahkan dapat digunakan secara bersama-sama penduduk permukiman informal dan penduduk di kawasan permukiman terencana.

- Permukiman terencana diarahkan menyediakan ruang terbuka hijau minimal 20% dan menyediakan infrastuktur sesuai dengan kebutuhan standart yang telah ditetapkan.



- Pengembangan kawasan permukiman terencana diarahkan tidak berada di kawasan lindung.
- Pengembangan kawasan permukiman terencana diarahkan sekaligus menyiapkan lahan makam sesuai dengan penduduk yang akan ditampung, yang penempatannya dapat secara tersendiri atau digabungkan dengan makam penduduk setempat.
- Kawasan pemukiman terencana baru memberikan kemudahan-kemudahan bagi masyarakat yang berminat untuk membeli perumahan.
- Pengembangan permukiman oleh developer.
- Pengembangan pemukiman didasarkan pada kapling rumah yang arahan lokasinya disesuaikan dengan fungsi kawasan lainnya.

Konsep pengembangan berdasarkan penilaian terhadap kondisi bangunan dan lingkungannya. Konsep ini bertujuan untuk meningkatkan kenyamanan dan kualitas lingkungan. Selain itu juga dapat dilihat tingkat kesejahteraan penduduk berdasarkan jenis bangunannya.

Elemen-elemen terkait konsep ini antara lain:

1. Jenis bangunan (permanen, non permanen, temporer)
2. Kondisi fisik bangunan.
3. Material eksterior yang digunakan.
4. Kondisi land use disekitarnya.
5. Pengaturan tingkat kepadatan antar bangunan.

Pada wilayah Kabupaten Jombang, perkembangannya difasilitasi oleh Pemerintah dan instansi swasta melalui pembangunan perumahan untuk masyarakat. Pada **Gambar 3.6** menunjukkan contoh permukiman di dua daerah di Kabupaten Jombang.



Gambar 3.13 Keadaan Pemukiman di Kabupaten Jombang

3.15.2. Jumlah Rumah Tangga Miskin

Salah satu indikasi keberhasilan pembangunan di suatu daerah adalah menurunnya angka kemiskinan. Indikasi angka kemiskinan dapat diketahui dengan jumlah rumah tangga miskin. Kriteria suatu rumah tangga dinyatakan miskin menurut standar Badan Pusat Statistik, yaitu:

- 1) Luas lantai bangunan tempat tinggal kurang dari 8 m² per orang
- 2) Jenis lantai tempat tinggal terbuat dari tanah/bambu/kayu murahan
- 3) Jenis dinding tempat tinggal dari bambu/ rumbia/ kayu berkualitas rendah/tembok tanpa diplester.
- 4) Tidak memiliki fasilitas buang air besar/ bersama-sama dengan rumah tangga lain.
- 5) Sumber penerangan rumah tangga tidak menggunakan listrik.
- 6) Sumber air minum berasal dari sumur/ mata air tidak terlindung/ sungai/ air hujan.
- 7) Bahan bakar untuk memasak sehari-hari adalah kayu bakar/ arang/ minyak tanah
- 8) Hanya mengonsumsi daging/susu/ayam dalam satu kali seminggu.
- 9) Hanya membeli satu stel pakaian baru dalam setahun
- 10) Hanya sanggup makan sebanyak satu/ dua kali dalam sehari



- 11) Tidak sanggup membayar biaya pengobatan di puskesmas/ poliklinik
- 12) Sumber penghasilan kepala rumah tangga adalah: petani dengan luas lahan 500m², buruh tani, nelayan, buruh bangunan, buruh perkebunan dan atau pekerjaan lainnya dengan pendapatan dibawah Rp. 600.000,- per bulan
- 13) Pendidikan tertinggi kepala rumah tangga: tidak sekolah/tidak tamat SD/tamat SD.
- 14) Tidak memiliki tabungan/barang yang mudah dijual dengan minimal Rp. 500.000,- seperti sepeda motor kredit/non kredit, emas, ternak, kapal motor, atau barang modal lainnya.

Rumah tangga yang memiliki minimal sembilan kriteria dari empat belas kriteria di atas dapat dikategorikan sebagai rumah tangga miskin.

Menurut data Badan Pusat Statistik tahun 2016, di Kabupaten Jombang terdapat 74.340 rumah tangga miskin. Angka ini merupakan 23,10% dari rumah tangga di Kabupaten Jombang di tahun yang sama. Secara lebih lengkap uraian jumlah rumah tangga miskin tiap-tiap kecamatan di Kabupaten Jombang dapat dilihat pada **Tabel-26 Lampiran**. Dari tabel tersebut menunjukkan bahwa Kecamatan Mojowarno merupakan kecamatan dengan jumlah rumah tangga miskin terbanyak, yaitu ada 6.252 rumah tangga, sedangkan jumlah rumah tangga miskin terkecil terdapat di Kecamatan Kudu, yaitu ada 1.893 rumah tangga. Secara keseluruhan, rata-rata jumlah rumah tangga miskin di Kabupaten Jombang adalah sebesar 3.540 rumah tangga per kecamatan.

3.15.3. Sumber Air Minum

Selain dari jumlah rumah tangga miskin, indikasi keberhasilan pembangunan di suatu daerah adalah kualitas hidup penduduk di daerah tersebut. Kualitas hidup penduduk dapat dilihat dari sumber air minum sebagai kebutuhan primer penduduk, keadaan sanitasi penduduk, dan jumlah timbulan sampah yang dihasilkan dari kegiatan penduduk.



Menurut Badan Pembangunan Daerah Kabupaten Jombang tahun 2016, penggunaan air sumur sebagai sumber air minum merupakan sumber terbanyak yang digunakan rumah tangga di Kabupaten Jombang, yaitu sebanyak 346.575 rumah tangga. Sedangkan rumah tangga lainnya menggunakan sumber air minum yang lain, diantara air ledeng sebagai sumber air minumannya sebanyak 18.914 rumah tangga, 35 rumah tangga menggunakan air sungai, 45.467 rumah tangga menggunakan air minum dalam kemasan, dan 14.611 rumah tangga menggunakan sumber lainnya.

Jumlah rumah tangga dengan menggunakan sumber air minum untuk tiap kecamatan dapat dilihat pada **Tabel-22 Lampiran**. Pada gambar ini menunjukkan pengguna air sumur terbesar terjadi di Kecamatan Jombang sebesar 34.574 rumah tangga, sedang pengguna air sumur terkecil terjadi di Kecamatan Wonosalam sebesar 5 rumah tangga.

3.15.4. Sanitasi

Kondisi sanitasi di suatu daerah dapat dilihat dari budaya penduduk di daerah itu terhadap perilaku hidup bersih dan sehat. Salah satu perilaku hidup bersih dan sehat ini ditunjukkan dengan cara pembuangan buang air besar. Di Kabupaten Jombang, cara buang air besar dilakukan dengan menyediakan jamban sendiri di dalam rumah, menyediakan jamban bersama untuk beberapa kepala keluarga, dan tidak menyediakan jamban. Berdasarkan **Tabel-23 Lampiran** menunjukkan bahwa terdapat 275.247 KK atau sebesar 75% di Kabupaten Jombang telah menyediakan sendiri fasilitas tempat buang air besar di dalam rumah. Sedangkan rumah tangga menggunakan jamban bersama sebanyak 49.682 KK atau 13,49% dan tidak menyediakan jamban atau buang air besar pada sungai yaitu sebesar 11,75% dari seluruh jumlah KK di Kabupaten Jombang.

Jumlah Rumah tangga yang telah menyediakan jamban sendiri di dalam rumah terbanyak terdapat di Kecamatan Jombang, yaitu sebesar 39.360 rumah tangga. Jumlah rumah tangga menggunakan jamban bersama terbanyak juga dilakukan oleh penduduk Kecamatan Jombang, yaitu terdapat 7.018 rumah tangga.



Sedangkan jumlah rumah tangga yang tidak menggunakan jamban atau di sungai, terbanyak dilakukan di Kecamatan Mojowarno, yaitu terdapat 6.284 rumah tangga.

3.15.5. Pengelolaan Sampah

Sampah merupakan salah satu sumber pencemaran lingkungan. Timbulan sampah yang dihasilkan dari suatu kegiatan sebanding dengan jumlah penduduk di daerah tersebut. Dari olahan data Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Jombang tahun 2016, menunjukkan bahwa timbulan sampah Kecamatan Jombang adalah timbulan terbanyak, yaitu sebesar 512,27 ton/hari, sedangkan di Kecamatan Peterongan menghasilkan timbulan sampah paling sedikit, yaitu 0,25 ton/hari.

Untuk meminimalkan dampak yang ditimbulkan, maka sampah perlu dikelola. Salah satu pengelolaannya adalah cara pembuangan sampah. Ada beberapa kemungkinan cara penduduk dalam membuang sampah. Pembuangan sampah dapat dilakukan dengan mengangkut sampah ke tempat pembuangan akhir, dengan menimbunnya, dengan membakar, dan lain sebagainya. Cara pembuangan ini tentunya disesuaikan dengan jenis sampah yang dihasilkan dari aktivitas penduduk. Dalam hal pembuangan sampah, yang terpenting adalah pemisahan sampah berdasarkan sifat organik dan anorganik dari sampah.

Gambaran sistem pengolahan persampahan Kabupaten Jombang ditinjau dari komposisi dan timbulan sampah, dimana sampah yang dihasilkan dikelompokkan menjadi dua yaitu:

a. Sampah organik

Sampah organik dapat dikelompokkan atas sampah organik mudah membusuk dan sampah organik tidak membusuk/mudah terbakar. Yang termasuk sampah organik mudah membusuk adalah sampah sisa dapur, sisa makanan, sampah sisa sayur, dan kulit buah-buahan. Sedangkan sampah organik yang tidak membusuk/mudah terbakar adalah kertas, kain karet, tekstile, kayu dan kulit.

b. Sampah anorganik



Sampah anorganik adalah sampah yang tidak dapat terdekomposisi. Jenis sampah anorganik adalah logam, besi, kaca, tembikar, plastik, dan debu.

Daerah kegiatan layanan kebersihan di ruas-ruas dalam kota Kabupaten Jombang dilaksanakan dalam tiga waktu, yaitu:

- a. Penyapuan pagi dimulai jam 04.30 s/d 07.30 wib
- b. Penyapuan siang dimulai jam 14.00 s/d 17.00 wib
- c. Penyapuan malam dimulai jam 18.30 s/d selesai

Waktu di antara jam yang sudah dipastikan tersebut tetap diadakan kegiatan penyapuan pada lokasi yang ditentukan dan beberapa lokasi yang dianggap timbulan sampahnya cukup tinggi (tidak menentu) sedang lokasi yang ditentukan dan harus tetap dijaga kebersihannya adalah :

1. Jln. Kh.Wachid Hasyim
2. Jln.Dr.Sutomo , Jln.Kh.Ahmad Dahlan, Jln.Arif Rahman Hakim
3. Jln. Seputran Alon-alon

✚ Permasalahan Daerah Pelayanan Kebersihan

Beberapa permasalahan yang masih dihadapi dalam daerah pelayanan kebersihan adalah :

1. Belum ada zonasi (wilayah-wilayah kecil) terhadap wilayah penghasil sampah sehingga mempermudah monitoring.
2. Pelayanan kebersihan belum mencakup seluruh daerah Kabupaten Jombang, sehingga beberapa masyarakat merasa walaupun sudah membayar retribusi kebersihan tapi tidak mendapatkan pelayanan kebersihan.
3. Pelayanan kebersihan hanya mencakup pengangkutan sampah dari TPS ke TPA.
4. Sampai saat ini, belum ada data mengenai pelanggan kebersihan. Hal ini penting digunakan untuk menganalisa potensi-potensi yang bisa dikembangkan dalam peningkatan dan perluasan pelayanan kebersihan Kabupaten Jombang serta peningkatan retribusi.



5. Sebanyak 85,84% wilayah Kabupaten Jombang belum terlayani oleh pelayanan kebersihan. Bila permasalahan ini terus berlangsung akan menimbulkan konflik dan masalah lingkungan.

✚ Kondisi Sumber Sampah, Timbulan, dan Komposisi Sampah

Sumber sampah Kabupaten Jombang umumnya didominasi oleh sampah yang berasal dari kegiatan rumah tangga (pemukiman) yang merupakan sampah basah, selain juga dari kegiatan lain (non pemukiman) seperti pasar, industri, perkantoran, jalan, fasilitas umum, pusat perdagangan, dan lain-lain.

Timbulan sampah merupakan volume sampah atau berat sampah yang dihasilkan dari jenis sumber sampah di wilayah tertentu per satuan waktu. Banyaknya sampah yang dihasilkan di Kabupaten Jombang, tidaklah semuanya masuk ke TPA, hal ini setelah dilakukan pengamatan ternyata sampah-sampah tersebut telah berkurang secara volume yang disebabkan oleh adanya beberapa hal yaitu;

- a. Pengurangan sampah nonorganik di transfer depo atau kontainer oleh pemulung.
- b. Pemilahan sampah oleh sebagian kecil masyarakat.
- c. Pengolahan sampah menjadi kompos oleh Dinas PU. Cipta Karya, Tata Ruang, Kebersihan dan Pertamanan Kabupaten Jombang
- d. Pembuangan sampah oleh masyarakat ke pinggiran sungai, sungai/ saluran air/drainase.
- e. Penimbunan dan pembakaran sampah di halaman rumah/ lahan terbuka.
- f. Pengomposan sampah organik secara individual dan komunal.
- g. Penggunaan sampah untuk kepentingan pengurugan lahan.

Berdasarkan hasil penelitian dan pengamatan terhadap tempat penampungan sampah di TPA, maka diketahui komposisi sampah Kabupaten Jombang didominasi oleh sampah organik, baru setelah itu sampah anorganik, seperti logam, plastic, tekstil (kain), kertas, bahan beracun dan berbahaya, keramik, kaca, dan lain-lain.



✚ Analisa Permasalahan Kondisi Sumber Sampah, Timbulan, dan Komposisi Sampah

Besarnya jumlah timbulan sampah Kabupaten Jombang oleh beberapa faktor, yaitu :

1. Jumlah penduduk yang banyak menimbulkan jumlah sampah yang banyak pula.
2. Belum adanya kepedulian masyarakat sebagai penghasil sampah untuk mengurangi sampah dan memanfaatkan sampah yang masih bisa digunakan.
3. Belum adanya/kurangnya upaya masyarakat untuk mereduksi sampah melalui program 3R.
4. Kemasan produk untuk bahan konsumtif banyak yang tidak dapat didaur ulang sehingga menambah jumlah sampah.
5. Komposisi sampah yang masih didominasi oleh sampah organik.
6. Karena sampah organik lebih cepat membusuk, maka dibutuhkan pengelolaan sampah yang cepat dan tepat sehingga tidak sampai menimbulkan pengaruh buruk bagi masyarakat di sekitarnya, seperti timbulnya bau yang tidak sedap dan kerumunan lalat.
7. Masih tingginya prosentase sampah plastik merupakan sampah yang berpotensi menghasilkan nilai ekonomi.
8. Tingginya jumlah sampah yang belum terangkut ke TPA atau dikelola merupakan potensi masalah lingkungan yang serius.
9. Dari pengamatan dilapangan tampak adanya Bahan Beracun dan Berbahaya (B3) yang berasal dari obat-obatan kadaluarsa, pembalut bekas, battery dll. Hal ini memerlukan penanganan secara khusus.
10. Dari hasil data yang ada jumlah timbulan sampah, kecamatan Jombang adalah penghasil sampah terbesar, diikuti kecamatan Mojoagung dan kecamatan Ploso.



✚ Pewadahan Sampah

Berdasar pengamatan di lapangan sistem pewadahan yang digunakan penduduk Kabupaten Jombang dilakukan dengan sistem tercampur (tanpa ada pemisahan sampah basah dan kering). Hasil dari pengamatan di beberapa perumahan, menunjukkan sarana pewadahan yang digunakan penduduk Kabupaten Jombang bermacam-macam seperti kantong plastik, pasangan bata/semen, karung, keranjang bambu dan karet ban yang disediakan oleh masyarakat baik untuk pewadahan individu maupun komunal. Sedangkan pewadahan yang berada di tepi jalan dan tempat-tempat umum disediakan oleh Dinas PU, Cipta Karya, Tata Ruang, Kebersihan dan Pertamanan Kabupaten Jombang.

Jenis pewadahan yang paling banyak dijumpai masih bersifat pewadahan tetap dan terbuka dari pasangan batu bata/ semen khususnya di kawasan perumahan kompleks. Pada umumnya, wadah sampah ditempatkan di luar pagar rumah atau luar rumah. Wadah dari pasangan batu bata/ semen ini tidak efisien bagi gerobak pengumpul sampah yang melakukan kegiatan pengumpulan secara individual langsung, karena ketika petugas mengambil sampah dari bak sampah biasanya banyak sampah yang tercecer sehingga petugas harus mengumpulkan sampah-sampah yang tercecer tersebut.

Sedangkan di perumahan non kompleks banyak ditemui pewadahan menggunakan keranjang bambu dan karet ban dalam keadaan terbuka. Kedua wadah ini memiliki kelemahan karena mudah terkena air hujan sehingga berpotensi menimbulkan lalat dan bau, mudah di acak-acak oleh pemulung dan hewan yang ada disekitarnya, mudah tumpah dan mudah hilang.

Beberapa permasalahan yang masih dihadapi dalam pengelolaan dan penanganan sampah Kabupaten Jombang, khususnya yang berkaitan dengan masalah pewadahan :



1. Proses pemilahan sampah basah dan kering di lokasi sumber sampah (pewadahan) belum dilakukan, sehingga sampah tercampur dan menyulitkan proses pemilahan.
2. Keterbatasan bak sampah yang mengakibatkan warga terpaksa untuk mencampur sampah. Bak sampah yang ada tidak ada penyekat untuk tempat sampah basah dan kering. Sebagian warga ada yang memilah sampah dari rumah menggunakan kantong plastik, namun ketika dibuang di bak sampah, sampah tersebut tidak dapat dibedakan karena berada dalam 1 bak sampah.
3. Kurangnya informasi terhadap manfaat pemilahan sampah kepada pelaku terutama ibu rumah tangga dan pembantu rumah tangga.
4. Belum ada kegiatan sosialisasi untuk melakukan pemilahan sampah basah maupun sampah kering baik secara individu, keluarga, organisasi dan komunitas kawasan yang luas lagi, maupun belum diberlakukan ketentuan penyediaan pewadahan sampah yang memilah antara sampah basah dan sampah kering. Sehingga masyarakat belum mengetahui pentingnya pemilahan sampah baik bagi lingkungan sekitar maupun petugas pengelola sampah.
5. Kurangnya informasi tentang kendala pengolahan sampah bila tidak dipilah.
6. Adanya pemulung yang memungut sampah daur ulang di bak sampah yang tidak dipilah, akan membuat sampah makin bercampur karena sampah dibongkar dan diacak-acak untuk mencari sampah daur ulang. Hal ini mengakibatkan sampah berserakan dan mengundang kerumuman lalat serta bau yang tidak sedap. Apabila sampah sudah dipilah, maka sampah yang akan dibongkar pemulung hanya sampah kering.
7. Masih banyak masyarakat yang menggunakan model pewadahan permanen, khususnya di pemukiman kompleks. Hal ini menyulitkan petugas pengumpul dalam memindahkan sampah ke gerobak serta membutuhkan waktu lebih banyak untuk memindahkan sampah ke gerobak.



8. Sebagian warga enggan untuk menyediakan pewadahan sampah yang layak dan membuang sampah di sembarang tempat, sementara terdapat lahan terbuka seperti sungai yang siap untuk menampung sampah. Disamping itu, kurangnya kesadaran masyarakat terhadap akibat yang ditimbulkan oleh ulah masyarakat yang membuang sampah sembarangan.
9. Pengumpulan sampah dari sumber sampah menuju transfer depo atau kontainer tidak semuanya dilakukan setiap hari sehingga mengakibatkan penumpukan pada wadah sampah yang berpotensi menimbulkan bau serta berserakan karena diacak-acak kucing, anjing dan tikus.
10. Kurangnya informasi pewadahan dan cara untuk komposting di rumah tangga, sehingga masyarakat tidak mengetahui cara membuat komposting dan desain wadah komposting, sehingga masyarakat enggan dan menganggap proses komposting menimbulkan bau dan kotor.

Permasalahan pada Sistem Pengumpulan Sampah

Beberapa permasalahan yang sering dihadapi dalam permasalahan sistem pengumpulan sampah Kabupaten Jombang, adalah sebagai berikut :

1. Belum tercukupinya alat pengumpul sampah seperti gerobak sampah. Kondisi ini salah satunya juga merupakan akibat dari tanggung jawab pengumpulan sampah yang dibebankan kepada masyarakat, sehingga pengaturan gerobak dan pekerja kurang memadai.
2. Beberapa wilayah yang mempunyai tingkat sosial ekonomi rendah (tidak mampu) ataupun tidak mau membayar petugas pengumpul sampah dan beberapa pemukiman yang berada di sepanjang/ sekitar sungai, sal. drainase berpotensi membuang sampah di sembarang tempat.
3. Pengumpulan sampah di jalan-jalan umum belum optimal dilakukan sehingga masih adanya pembuangan sampah secara liar.
4. Tidak tersedianya bak sampah yang memadai di tepi jalan akibatnya sampah dibuang di sembarang tempat atau di jalan.



5. Petugas pengumpul, terutama petugas pengumpul sampah yang berasal dari KSM belum memiliki pakaian dan perlengkapan yang higienis.
6. Beberapa masyarakat membuang sampahnya secara individual langsung ke TPS secara sembarangan, tanpa menghiraukan sampahnya masuk ke kontainer atau transfer depo.
7. Pada beberapa kondisi pengumpulan sampah tidak dilakukan setiap hari (Misal hari raya besar) karena terbatasnya petugas atau sedang libur dan tidak ada jadwal pengumpulan.

✚ Tempat Penampungan Sementara (TPS) dan Sebarannya

Kontainer dan transfer depo yang ada pada saat ini belum seimbang dengan jumlah sampah yang dihasilkan penduduk, sehingga perlunya peningkatan jumlah dan penyebaran TPS, terutama daerah di luar pelayanan kebersihan.

Tidak ada pembagian secara jelas atau cakupan pelayanan wilayah TPS sehingga beberapa TPS menerima beban lebih dari kapasitasnya atau kurang dari kapasitas TPS yang seharusnya disediakan. Akibatnya, beberapa masyarakat/pelaksana membuang sampah ke pembuangan terdekat atau bahkan di luar tempat penampungan sementara.

Beberapa permasalahan yang sering dihadapi pada TPS adalah sebagai berikut :

1. Kapasitas beberapa TPS tidak mencukupi untuk menampung sampah dari area pelayanannya, sehingga banyak timbunan sampah di TPS, sering meluber ke sekitarnya, menimbulkan bau, lalat dan ketidaknyamanan lingkungan.
2. Beberapa TPS yang ada di Kabupaten Jombang memiliki keterbatasan lahan.
3. Volume sampah di TPS berlebih/meluber karena jadwal pengangkutan ke TPA lebih awal dari kedatangan alat pengumpul dan beberapa armada pengangkut yang melakukan kecurangan dengan tidak langsung



mengangkut kontainer yang tidak penuh sampah, tapi menaruhnya ke TPS berikutnya.

4. TPS harus menampung sampah yang sudah membusuk karena petugas pengumpul sampah dari sumber tidak mengangkut sampah setiap hari.
5. Pengelolaan 3R di TPS belum dilaksanakan untuk mengurangi volume sampah.
6. Beberapa TPS (kontainer atau transfer depo) yang berada di pinggir jalan berpotensi memiliki sampah dalam keadaan berantakan.
7. Desain TPS belum memperhatikan aspek kemudahan dalam pemindahan sampah dari alat pengumpul kontainer/transfer depo.
8. TPS yang ada belum memperhatikan keberadaan sampah B3 atau TPS belum menyediakan tempat/wadah khusus untuk B3.

Permasalahan Sistem Pengangkutan Sampah

Beberapa tantangan yang masih dihadapi dalam pengangkutan sampah Kabupaten Jombang dari TPS ke TPA, adalah sebagai berikut :

1. Sampah belum seluruhnya dapat terangkut ke TPA karena keterbatasan armada dan sumberdaya manusia (SDM).
2. Terbatasnya jumlah armada karena keterbatasan dana dari Dinas PU. Cipta Karya, Tata Ruang, Kebersihan dan Pertamanan untuk perawatan armada serta pengadaan baru sehingga mengakibatkan 1 armada melakukan beberapa kali ritasi.
3. Sarana kontrol angkutan sampah belum optimal karena tidak disertai peralatan komunikasi dan sistem kontrol yang efektif.
4. Waktu pengambilan sampah dari TPS sering tidak sesuai dengan jadwal pengangkutan, sehingga banyak sampah yang tidak terangkut ke TPA.
5. Tidak ada pengawasan terhadap pelaksanaan pengangkutan, sehingga berpotensi adanya kecurangan dalam pengangkutan sampah.
6. Belum ada SOP pengangkutan sampah ke TPA.



7. Belum ada peningkatan kualitas SDM/pelaksana pengangkutan sampah, sehingga petugas tidak memahami pentingnya pengangkutan sampah ke TPA.
8. Belum ada monitoring dan perawatan jalan yang sering dilalui lalu lintas pengangkutan sampah dengan melakukan kerjasama dengan dinas terkait.

Kondisi Eksisting Pengaturan Pengelolaan Sampah

Dalam pengelolaan dan penanganan sampah Kabupaten Jombang masih sering menghadapi permasalahan pada aspek hukum yaitu:

1. Evaluasi terhadap pelaksanaan peraturan kebersihan belum ada (hendaknya setiap tahun dilakukan evaluasi).
Efektivitas maupun efisiensi dari pelaksanaan peraturan kebersihan selama ini belum pernah dilakukan sehingga dari kinerja penanganan sampah dari aspek pengaturan/hukum masih belum optimal.
Evaluasi terhadap peraturan yang ada harus terus dilakukan dan dikembangkan sehingga perda yang ada sesuai dengan kondisi yang ada
2. Pelaksanaan yustisi yang sudah ada belum optimal, sehingga masih banyak yang membuang sampah sembarangan karena tidak ada denda / sanksi yang diberikan.
3. Sengketa permasalahan sampah baik antara pemerintah, pengusaha, LSM dan masyarakat belum ada hukum yang jelas.
4. Belum ada peraturan mengenai jenis plastik di pasar, akibatnya banyak yang menggunakan plastik yang hanya sekali pakai dan tidak digunakan lagi/dijual kembali, misalnya gelas dan botol minuman dapat dijual kembali.
5. Belum ada peraturan tentang pengadaan tempat sampah yang memenuhi standar yang ada bahkan jika perlu, perlunya perda yang mengatur pengomposan skala individual dan komunal.



6. Sanksi/hukum yang ada sekarang hanya untuk yang membuang sampah sembarangan, yang lain belum ada. Misalnya sanksi untuk pemilahan sampah, dsb
7. Belum ada peraturan yang mengatur tentang kewenangan pengelola sampah di lingkungan RT/RW baik swasta resmi atau tidak resmi (hak dan kewajiban).
8. Belum ada peraturan yang secara rinci mengatur kewajiban dan hak untuk daerah yang terakses dan tidak terakses pelayanan kebersihan.
9. Belum ada peraturan yang mengatur tentang tata cara pengelolaan sampah B3 dari sampah masyarakat maupun rumah sakit.

Kondisi Eksisting Kelembagaan Pengelolaan Sampah

Dalam pengelolaan dan penanganan sampah Kabupaten Jombang, permasalahan kelembagaan yang masih dihadapi adalah sebagai berikut :

- a. Kurangnya koordinasi menyebabkan sampah langsung dibuang ke TPA, dan tidak ada pengolahan/usaha pengurangan volume sampah.
- b. Belum optimalnya koordinasi antara instansi yang terlibat dalam hal kebersihan kota dan kesinergisan program seperti antara Dinas-dinas yang terkait.
- c. Belum semua timbulan sampah di Kabupaten Jombang dikelola dan ditangani secara teknis oleh Dinas PU. Cipta Karya, Tata Ruang, Kebersihan, dan Pertamanan, misalnya data untuk sampah pasar, industri, RS dsb.
- d. Belum adanya sertifikasi khusus untuk pengelolaan sampah khususnya di TPA; Perlu adanya SDM yang memiliki sertifikat khusus yang mampu dalam mengelola sampah maupun operasional TPA itu sendiri sehingga penanganan permasalahan sampah kurang optimal karena kurangnya kualitas SDM.
- e. Kewenangan penanganan sampah oleh Dinas PU. Cipta Karya, Tata Ruang, Kebersihan, dan Pertamanan tidak sampai ke sumber sampah



sehingga dinas tidak punya kekuatan untuk/dasar untuk mengontrol langsung ke sumber.

Dalam rangka pengelolaan sampah dan kebersihan di Kabupaten Jombang, kegiatan-kegiatan yang telah dilaksanakan dalam kurun tahun anggaran 2016 antara lain :

a. Gerakan Jumat Bersih.

Kegiatan ini telah dilakukan oleh segenap elemen masyarakat di Kabupaten Jombang, baik dari instansi pemerintah, swasta, sekolah dan masyarakat di tingkat desa/kelurahan.



Gambar 3.14. Foto Kegiatan Jumat Bersih

b. Terbentuknya Kader Lingkungan

Kader lingkungan memiliki kegiatan utama, yaitu:

- Memilah sampah dari sumbernya (rumah tangga).

Dengan swadaya sendiri masyarakat telah mengupayakan tempat sampah baik tang terpilah, maupun yang belum terpilah di lingkungan pemukiman, sekolah dan perkantoran.



Gambar 3.15 Foto Sarana pengumpulan sampah

- Mendaur ulang sampah organik menjadi pupuk kompos dan memanfaatkan sampah anorganik menjadi barang-barang kerajinan tangan yang dapat dipakai kembali. Kader ini berkumpul dalam Komunitas 3R, yang terdiri dari kader lingkungan yang terbentuk di masyarakat dengan mandiri telah melaksanakan kegiatan sosialisasi terkait upaya pengurangan, sampah, mendaur ulang dan pemakaian kembali/pemanfaatan sampah, baik sampah organik maupun sampah anorganik.



Gambar 3.16. Produk kerajinan 3R



Gambar 3.17. Kegiatan Pelatihan Daur Ulang Sampah Anorganik

- Kegiatan bank sampah.

Dalam rangka pengurangan sampah yang dibuang ke TPA terutama sampah anorganik, di Kabupaten Jombang telah terbentuk 25 Bank sampah baik di lingkungan pemukiman, sekolah dan pasar. Bank Sampah merupakan sebuah konsep pengumpulan sampah kering, seperti karton, majalah, kaleng, dan sampah plastik yang sudah terkoordinasi dan memiliki jaringan kerja antara kelompok masyarakat dengan para pelapak



sampah di area tertentu. Adapun kegiatan Bank Sampah dapat dilihat **Gambar 3.18**.



Gambar 3.18 Kegiatan Bank Sampah

- c. Pengurangan volume sampah dari sumbernya/Gerakan Sampah Tuntas Di Tempat.
- Terbentuknya lingkungan pemukiman yang telah melaksanakan pengelolaan sampah dengan metode 3R.
 - Pemberian bantuan unit komposter dan keranjang Takakura ke pemukiman, sekolah dan perkantoran untuk mengolah sampah organik



Gambar 3.19 Keranjang Takakura



- Pembuatan unit TPS dan Unit produksi kompos skala komunal/lingkungan.

Sampah yang masuk ke TPA dilakukan pemilahan sampah dan pemanfaatan sampah organik dengan adanya unit produksi kompos di TPA Jombang dengan kapasitas produksi 30m³/hari. Dengan pengolahan sampah tuntas di tempat terjadi pengurangan jumlah timbulan sampah adalah sebesar 10.926,33 Ton /tahun. Bentuk kegiatannya dapat dilihat pada **Tabel 3.14**.

Tabel 3.14. Data Pengolahan Sampah

No	Kegiatan	Volume ton/tahun
1	Komposting :	
	a. Unit TPST	1.095,00
	b. Unit Kompos di TPA dan Workshop PU. Cipta Karya	4.190,00
	c. Pemukiman, Sekolah, Kantor, Pasar, Rumah Sakit dan Puskesmas	676,22
2	Kegiatan Pemilahan Sampah di TPS dan TPA oleh pemulung	4.852,00
3	Kegiatan 3R sampah anorganik di pemukiman dan sekolah (karya daur ulang)	18,67
4	Kegiatan Bank Sampah di pemukiman, sekolah dan pasar	94,44
Jumlah		10.926,33

- d. Pemberian reward kepada masyarakat dalam pengelolaan persampahan melalui lomba kebersihan, komposting dan Pemilihan Kader Lingkungan terbaik. Apresiasi yang diberikan berupa hadiah uang pembinaan.



Gambar 3.20 Lokasi TPA

- e. Pengelolaan Sampah TPA dengan Metode Control Landfill yang pada tahun 2013 dipersiapkan untuk Sanitary Landfill.

TPA Jombang beroperasi sejak tahun 1993, saat ini luas lahan 8,3 ha dan akan ada perluasan TPA sekitar 20 Ha. Pemerintah Kabupaten Jombang mengupayakan target pengurangan volume sampah yang masuk ke TPA dan peningkatan volume sampah. Adapun profil TPA Jombang dapat dilihat pada gambar dibawah ini.



Gambar 3.21 Lokasi Pengolahan sampah di TPA



Gambar 3.22 Fasilitas TPA



Gambar 3.23 Pembuatan Kompos



Gambar 3.24 Sumur Pantau dan Drainase dengan Saluran Lindi



Gambar 3.25 Instalasi Pengolahan Lindi

f. Kegiatan pemanfaatan sampah menjadi energi



Gambar 3.26 Pembuatan Biogas di TPA



Di Kabupaten Jombang telah diupayakan pemanfaatan sampah sebagai sumber energi alternatif melalui komposter biogas yang dilakukan di lingkungan pemukiman, sekolah dan perkantoran. Selain itu juga telah dilakukan pula pemanfaatan gas methan di TPA Jombang. Volume sampah yang dimanfaatkan sebagai sumber energi di unit biogas, sebesar :

Pemukiman	= 1,92 m ³ / bulan
Sekolah	= 0,96 m ³ / bulan
Perkantoran	= 0,48 m ³ / bulan
TPA	= 2.000 m ³ / bulan

Hasil kegiatan pembuatan biogas ini dapat dilihat pada gambar dibawah ini.



Gambar 3.27. Pembuatan Biogas di Sekolah



Gambar 3.28. Pembuatan Biogas di Pemerintah daerah



Gambar 3.29 Penggunaan gas methan TPA untuk sumber energi genset



Gambar 3.30 Penggunaan gas metan TPA untuk lampu penerangan dan kompor gas



Bab 4

INOVASI DAERAH DALAM PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP

Lingkungan hidup merupakan sumber penunjang kehidupan bagi manusia dan makhluk hidup lain. Keberadaan lingkungan hidup yang layak untuk ditempati adalah daerah yang bersih, aman, dan tentram. Untuk mewujudkan hal itu haruslah dibuat komitmen untuk menjaga dan upaya untuk Pengelolaan lingkungan hidup adalah upaya terpadu untuk melestarikan fungsi lingkungan hidup yang meliputi kebijaksanaan penataan, pemanfaatan, pengembangan, pemeliharaan, pemulihan, pengawasan, dan pengendalian lingkungan hidup. Pengelolaan lingkungan hidup diselenggarakan dengan asas tanggung jawab negara, asas keberlanjutan, dan asas manfaat bertujuan untuk mewujudkan pembangunan berkelanjutan yang berwawasan lingkungan hidup dalam rangka pembangunan manusia Indonesia seutuhnya dan pembangunan masyarakat Indonesia seutuhnya yang beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Bentuk upaya pengelolaan lingkungan hidup yang dilakukan oleh Kabupaten Jombang dilakukan dengan cara seperti rehabilitasi lingkungan, penegakan hukum yang berkaitan dengan lingkungan, peran masyarakat terhadap



pengelolaan lingkungan, dan peran lembaga daerah dalam menghasilkan produk hukum, menetapkan anggaran untuk pengelolaan lingkungan.

4.1 REHABILITASI LINGKUNGAN

Kegiatan rehabilitasi lingkungan merupakan kegiatan yang digunakan untuk memperbaiki lingkungan akibat kegiatan manusia kepada lingkungan yang telah terdegradasi. Upaya untuk memperbaiki lingkungan yang telah terdegradasi tersebut, Pemerintah Daerah Kabupaten Jombang mempunyai program rehabilitasi lingkungan.

4.1.1 Penghijauan dan Reboisasi

Penghijauan adalah usaha penataan lingkungan dengan mempergunakan tanaman sebagai materi pokoknya, (upaya yang dapat menanggulangi degradasi dan kualitas lingkungan). Penghijauan adalah segala daya upaya untuk memulihkan dan atau mempertahankan dan mengembangkan secara berkelanjutan kondisi tanah beserta kelengkapannya sehingga secara optimal dapat melaksanakan fungsi-fungsinya sebagai unsur produksi, sebagai media pengaturan tata air dan sebagai media perlindungan alam lingkungan. Program penghijauan ini bertujuan untuk menciptakan pelestarian alam dengan mengikutsertakan masyarakat pada lokasi kegiatan. Indikator keberhasilan program ini adalah masyarakat menjadi sadar akan pelestarian alam dan mempunyai kemampuan untuk berperan dalam pelestarian alam karena memperoleh manfaat dari kegiatan ini sehingga tidak terjadi kerusakan alam akibat kegiatan manusia. Penghijauan dalam arti luas adalah segala daya untuk memulihkan, memelihara dan meningkatkan kondisi lahan agar dapat berproduksi dan berfungsi secara optimal, baik sebagai pengatur tata air atau pelindung lingkungan. Begitu pentingnya sehingga penghijauan sudah merupakan program nasional yang dilaksanakan di seluruh Indonesia.



Adapun manfaat penghijauan dan reboisasi adalah sebagai berikut :

a) Manfaat secara hidrologis

Mampu menjaga keseimbangan sistem air dialam, dengan adanya banyak pohon yang ditanam itu berarti kita sedang mencegah terjadinya banjir dan tanah longsor. Akar pohon sangat bermanfaat dalam menjaga kestabilan air dalam tanah.

b) Manfaat secara orologis

Mencegah terjadinya erosi dan pengikisan tanah yang dapat menimbulkan bencana alam tanah longsor.

c) Manfaat secara ekologis

Mampu menjaga lingkungan menjadi lebih asri, nyaman serta menjadi tempat tinggal yang layak bagi tanaman dan hewan didalamnya. Dengan begitu alam pun akan selaras dan menghasilkan apa yang dibutuhkan oleh manusia.

d) Manfaat secara klimatologis

Mencegah polusi dan pemanasan global yang sudah terjadi di dunia ini. Tingkat karbondioksida yang cukup tinggi dalam dunia ini mengurangi jumlah oksigen. Sedangkan pohon atau tumbuhan menghasilkan oksigen yang berguna untuk kehidupan dibumi.

Dalam kegiatan penghijauan di Kabupaten Jombang, Bupati Jombang mencetuskan Program '*One Man One Tree*' yaitu mendorong warga masyarakat melestarikan lingkungan hidup dengan program penghijauan. Dalam pelaksanaan penghijauan seperti uraian di atas, maka yang dilakukan oleh Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Jombang adalah melakukan penanaman pohon di beberapa wilayah di Kabupaten Jombang.

Pada tahun 2016, Pemerintah Daerah Kabupaten Jombang melakukan program penghijauan dan reboisasi terhadap lahan seluas 88,1 Ha dengan menanam 106.601 batang pohon. Berdasarkan data Perhutani KPH Jombang tahun 2016, kegiatan penghijauan dan reboisasi ini dilakukan di 5 kecamatan yaitu Kecamatan Kabuh, Kecamatan Mojoagung, Kecamatan Mojowarno, Kecamatan Plandaan, Kecamatan Wonosalam. Kegiatan penghijauan yang paling besar dilakukan di



Kecamatan Mojowarno dengan luas lahan yang dilakukan penghijauan sebesar 44,90 Ha dan jumlah pohon yang ditanam sebanyak 54.329 batang pohon. Kegiatan penghijauan yang paling kecil dilakukan di Kecamatan Wonosalam yaitu seluas 9,00 Ha dengan menanam 10.890 batang pohon.

Kegiatan penghijauan dan reboisasi di Kabupaten Jombang ini tidak hanya dilakukan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Jombang saja, tetapi juga melibatkan seluruh elemen masyarakat luas dalam pelaksanaannya.

4.2. Kegiatan Fisik Lainnya oleh Instansi dan Masyarakat

Upaya untuk merehabilitasi lingkungan bukan hanya dilakukan oleh pemerintah Kabupaten saja, melainkan juga kewajiban masyarakat dan berbagai Instansi di Kabupaten Jombang untuk membantu upaya rehabilitasi lingkungan tersebut. Pada tahun 2016 tercatat ada 116 kegiatan fisik dalam upaya rehabilitasi lingkungan di Kabupaten Jombang. Beberapa kegiatan fisik lain yang dilakukan oleh masyarakat, instansi, maupun pemerintah kabupaten dalam upaya rehabilitasi lingkungan diantaranya adalah Pembangunan Drainase/Trotoar, Rehabilitasi/Pemeliharaan Drainase/Trotoar, Pembangunan IPAL Domestik Komunal, Pembangunan Toilet Umum Taman Kebonratu, Pembangunan Sarana dan Prasarana Air Minum / Air Bersih, Penataan Ruang Terbuka Hijau (RTH) yang dilakukan oleh Dinas PU Cipta Karya, Tata Ruang, Kebersihan dan Pertamanan Kabupaten Jombang. Secara lengkap lokasi yang dilakukan rehabilitasi lingkungan dapat dilihat pada buku data **Tabel-43**.

4.2.1. Pengawasan AMDAL

Dalam rangka melaksanakan pembangunan berwawasan lingkungan sebagai upaya sadar lingkungan dan upaya mengelola sumberdaya secara bijaksana dalam pembangunan yang berkelanjutan untuk meningkatkan kesejahteraan dan mutu hidup, perlu dijaga keserasian antar berbagai usaha dan/atau kegiatan. Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, salah satu kewajiban pemerintah daerah adalah melakukan pembinaan dan pengawasan ketaatan penanggung jawab usaha



dan/atau kegiatan terhadap ketentuan perizinan lingkungan dan peraturan perundang-undangan serta menetapkan dan melaksanakan kebijakan mengenai AMDAL dan UKL-UPL. Permasalahan yang sering ditemukan dalam kegiatan pengawasan UKL-UPL dan AMDAL adalah :

1. Masih banyaknya perusahaan yang belum memiliki dokumen lingkungan.
2. Masih banyaknya perusahaan yang belum melaksanakan kegiatan pengelolaan dan pemantauan lingkungan dan mematuhi persyaratan yang telah ditetapkan.
3. Belum sesuai upaya pengelolaan lingkungan yang dilakukan perusahaan dengan baku mutu yang telah ditetapkan.
4. Terbatasnya anggaran dalam melaksanakan kegiatan pengawasan mengakibatkan tidak semua perusahaan bisa terawasi dengan baik.

4.2.2. Dokumen Lingkungan

Setiap kegiatan diperkirakan akan menimbulkan dampak terhadap lingkungan hidup. Dampak terhadap lingkungan hidup tersebut dapat mengenai komponen fisik-kimia, biologi, sosial-ekonomi-budaya maupun kesehatan masyarakat. Untuk mengurangi adanya resiko terhadap lingkungan maka setiap rencana kegiatan yang akan dilakukan selalu harus disertai dengan kegiatan penyusunan Dokumen Lingkungan. Kriteria kegiatan penyusunan Dokumen Lingkungan tersebut ditentukan berdasarkan skala rencana kegiatan yang akan dilakukan. Jika diperkirakan akan memberikan perubahan mendasar pada lingkungan, maka rencana kegiatan tersebut harus dimulai dengan penyusunan AMDAL, sebaliknya jika tidak menimbulkan perubahan mendasar pada lingkungan maka cukup menyusun UKL-UPL. Untuk kegiatan yang sudah berjalan namun belum mempunyai dokumen lingkungan, maka wajib menyusun DPPL atau SPPL. Ketentuan tersebut secara jelas telah diatur pada Peraturan Menteri Lingkungan Hidup No.11 Tahun 2006 tentang Jenis Usaha dan/atau Kegiatan yang Wajib AMDAL.



Dokumen Izin Lingkungan memberikan konsekuensi adanya pedoman untuk senantiasa melakukan perlindungan dan pengelolaan lingkungan, sebagaimana diamanatkan dalam UU No.32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Dari berbagai kegiatan usaha di Kabupaten Jombang, pada tahun 2016 banyak dokumen lingkungan yang dihasilkan, yang berarti bahwa kepedulian pelaku usaha terhadap lingkungan di Kabupaten Jombang semakin meningkat.

Dokumen UKL-UPL merupakan persyaratan mutlak yang harus dimiliki oleh berbagai kegiatan usaha untuk dapat memperoleh izin-izin pelaksanaan kegiatan selanjutnya, diantaranya izin lingkungan. Selama tahun 2016 mulai dari Bulan Januari hingga Desember, terdapat 76 perusahaan yang telah mendapatkan izin lingkungan dari Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Jombang. Terdapat 55 perusahaan yang telah memiliki dokumen UKL-UPL, 3 perusahaan telah memiliki DPLH, 2 perusahaan memiliki KA ANDAL dan ANDAL, 3 perusahaan memiliki RKL-RPL. Untuk AMDAL, tercatat ada 4 dokumen yang telah dinilai oleh KPA Jombang, dan untuk SPPL tercatat ada 299 dokumen yang semuanya telah disetujui.

4.2.3. Pengawasan Izin Lingkungan (AMDAL, UKL/UPL, SPPL)

Pengawasan pelaksanaan dokumen lingkungan dilakukan untuk mengetahui ketaatan pemrakarsa dari kegiatan/usaha dalam melaksanakan upaya pengelolaan dan pemantauan lingkungan sesuai ketentuan-ketentuan yang ditetapkan dalam dokumen-dokumen lingkungan tersebut.

berdasarkan kegiatan pengawasan yang telah dilakukan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Jombang melalui Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Jombang ditemukan beberapa temuan yang terdapat pada tabel dibawah ini.



Tabel 4.1. Hasil Pengawasan Izin Lingkungan (AMDAL, UKL/UPL, SPPL)

No.	Nama Perusahaan/Pemrakarsa	Waktu (tgl/bln/thn)	Hasil Pengawasan
1	Pabrik kecap sumber mas	11 Februari 2016	- Melengkapi flow meter pada IPAL - Saluran drainase dan outlet IPAL masih menjadi satu - Belum melaporkan hasil uji laboratorium
2	UD. Varia indo prima	11 Februari 2016	Belum memiliki izin IPLC
3	Fa. Sumber Terang	11 Februari 2016	Saluran pembuangan air dari IPAL harus dipisahkan dari saluran drainase
4	PT. CJ. Feed Mojoagung	17 Februari 2016	Supaya mempertahankan kinerja pengelolaan lingkungan
5	PT. Volma	17 Februari 2016	Belum ada pencatatan debit dan pH harian
6	PT. Terang mandiri hanjaya	17 Februari 2016	Belum melakukan pengujian kualitas air limbah dan belum menyampaikan laporan periodik pelaksanaan dokumen lingkungan
7	PT. Kimia farma	23 Februari 2016	Supaya mempertahankan kinerja pengelolaan lingkungan
8	PT. Venezia Footwear	25 Februari 2016	Belum memiliki izin TPS LB3
9	CV. Dhuha	25 Februari 2016	Belum menyampaikan laporan periodik pelaksanaan dokumen lingkungan
10	RS. Pelengkap	12 Februari 2016	- Belum menyampaikan laporan periodik pelaksanaan dokumen lingkungan - Belum mempunyai izin IPLC dan TPS Limbah B3
11	RS. Airlangga	12 Februari 2016	- Hasil pengujian air limbah belum memenuhi baku mutu - Belum mempunyai izin TPS Limbah B3
12	Kampung domba	16 Februari 2016	Mengajukan review Dokumen UKL-UPL terkait penambahan jenis ternak dan kapasitas
13	RPA Phalosari	16 Februari 2016	Belum menyampaikan laporan periodik pelaksanaan dokumen lingkungan

Sumber: BLH Kabupaten Jombang



4.2.4. Penegakan Hukum

Penegakan hukum merupakan suatu upaya perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup terhadap masyarakat dari pencemaran yang dapat menimbulkan kerusakan lingkungan.

4.2.5. Pengaduan Masyarakat

Dalam rangka perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, setiap orang mempunyai hak melakukan pengaduan atas dugaan pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup. Pengaduan masalah pencemaran lingkungan dapat disampaikan kepada instansi yang bertanggung jawab baik secara lisan maupun tulisan.

Selama tahun 2016, Pos Pengaduan Lingkungan Kabupaten Jombang menerima sebanyak 20 pengaduan tentang berbagai masalah pencemaran lingkungan. Adapun pengaduan tersebut adalah sebagai berikut:

1. Masyarakat RT 03 RW 07 Dsn Geneng Desa Jombatan Kecamatan Jombang, merasa terganggu dengan adanya aktifitas pembangunan gedung di jalan KH. Hasyim Ashari 45 Jombang. Aktifitas pembangunan ini mengakibatkan gangguan getaran, kebisingan, debu serta retakan bangunan rumah kami yang ada di sebelah kanan dan kiri bangunan tersebut, serta belum adanya sosialisasi ke warga sekitar.
2. Permohonan penertiban lingkungan "Bengkel Munandar" Dusun Sambisari RT 03 RW 02 Desa Ceweng Kec. Diwek.
3. Pengaduan Kasus Peleburan Emas an. Andoko Sidobayan Luar Candi Mulyo RT 02 RW 05 Jombang dengan pihak pelapor ibu Sulami keluhan terkait penggunaan air keras (air raksa) yang menyebabkan bau yang sangat menyengat, asap dari proses peleburan yang sangat menyesakkan dan pemasakan emas yang tidak pernah mengenal waktu.
4. Dugaan gangguan lingkungan akibat industri Jual Beli Besi UD. Tanjung Abadi akibat getaran alat membuat kerusakan dinding rumah sebelah dan suara aktivitas pekerja yang mengganggu.



5. Radar Jombang hari Senin tanggal 18 April 2016 mengenai dugaan tercemarnya Sungai yang terletak di Jalan Mayjen Sungkono, Desa Tunggorono, oleh limbah industri, maka pada tanggal 19 April 2016.
6. Surat dari LSM “Berani Ungkap Kebenaran Dengan Fakta” tanggal 21 Maret 2016 No. 037/LSM-GW/O/DHA/III/2016 perihal Klarifikasi dan Konfirmasi, terhadap temuan LSM Government Watch dan Laporan masyarakat adanya indikasi pengelolaan limbah PT Mirolam Adi Gunawan, Kesamben yang tidak dikelola dengan maksimal, sehingga menimbulkan pencemaran lingkungan dan berdampak pada air sumur warga.
7. Detikcom di lokasi, Jumat (13/5/2016).
8. Dugaan pembuangan limbah cair tanpa dikelola terlebih dahulu di Avour Mojongapit mengakibatkan sungai berbau membuat mengganggu pernafasan dan membuat mual dan partikel - partikel kecil limbah plastik yang tidak bisa terurai masuk ke dalam sungai.
9. Media Massa rabu 25 Mei 2016 "Aparatur Desa Mancar tutup mata, ada limbah B3 di desanya.
10. Pengaduan warga Dsn Kweden Desa Sidowarek Ngoro terhadap dugaan kasus pencemaran lingkungan terhadap industri pengolahan kelapa UD. Dunia kelapa selaku penyewa KUD Anugerah Sidowarek Ngoro.
11. Dugaan pencemaran sumur warga akibat aktivitas pembuangan air limbah yang tidak terkelola dengan baik.
12. Pencemaran lingkungan berupa lalat, pembakaran dan bau yang diakibatkan dari kopra yang membusuk.
13. Berdasarkan surat pernyataan pengaduan dusun Sentulan Desa Bongkot Kecamatan Peterongan keberatan adanya tempat/usaha pemotongan ayam milik Erik/Suharti sangat mengganggu lingkungan karena :
 - Merasakan dampak udara/bau yang sangat busuk setiap hari.
 - Merasakan dampak suara bising/keras yang mengganggu setiap malam.
 - Merasakan dampak pencemaran sungai karena limbahnya dibuang di sungai.



- Merasakan dampak bau yang sangat busuk di sekitar lingkungan.
- 14. Berdasarkan surat pengaduan warga masyarakat Desa kedawong diwek atas dugaan pencemaran udara dan tanah oleh IPAL Komunal Desa Kedawong.
- 15. Mulai awal pindah 2007 kebisingan tidak terlalu keras, pada 4 tahun terakhir semakin keras dan sepanjang hari.
- 16. Pengaduan perwakilan masyarakat Desa Segodorejo Kecamatan Sumobito Pengaduan Lingkungan Hidup atas kegiatan usaha 1. RM Sagu.
- 17. Pengaduan perwakilan masyarakat Desa Segodorejo Kecamatan Sumobito Pengaduan Lingkungan Hidup atas kegiatan usaha RPA an. Eko Sumarsono.
- 18. Pengaduan perwakilan masyarakat dan LSM atas dugaan pencemaran air di Pabrik Plastik Rafiah dan Kantong di Desa Godong Kecamatan Gudo.
- 19. Pengaduan masyarakat atas dugaan pencemaran air dan kebisingan PT. Sejahtera Usaha Bersama Unit II Desa Pundong Kecamatan Diwek.
- 20. Pengaduan masyarakat atas dugaan pencemaran air dikarenakan air sungai sering berubah - ubah warna selama perusahaan beroperasi dan terlihat air keluar dari saluran milik PT. Yinda Plastic Recycling dengan industri pengolahan plastik yang terletak di DSn. Cangkring Randu Desa Cangkring Randu Kecamatan Perak.

4.2.6. Peran Serta Masyarakat

Pengelolaan dan pelestarian lingkungan bukan hanya tanggung jawab pemerintah pusat dan pemerintah daerah saja, melainkan merupakan tanggung jawab bersama antara pemerintah pusat, pemerintah daerah dan masyarakat juga. Masyarakat merupakan subjek utama yang menentukan keberlangsungan sumber daya alam lingkungan mereka. Peran serta masyarakat mempunyai arti yang penting dalam upaya penyelamatan lingkungan karena peranserta masyarakat merupakan salah satu faktor yang sangat penting dan menentukan keberhasilan pelaksanaan pengelolaan lingkungan.



Taman dari PT. SUB



Taman dari PT. Merak Muda Gasindo

Gambar 4.3. Taman Partisipasi Masyarakat

Upaya perbaikan lingkungan yang telah dilakukan pemerintah dan melibatkan masyarakat Jombang antara lain dalam bentuk adanya gerakan kerja bakti setiap Jumat dan Car Free untuk mengurangi pencemaran udara dan dalam rangka mengkampanyekan hemat bahan bakar minyak yang dilaksanakan setiap hari minggu pada jam 05.30 s/d 07.30 WIB di jalan KH. Wachid Hasyim.

Peran serta masyarakat dan Pemerintah Daerah di Kabupaten Jombang ditunjukkan dengan diraihnya beberapa penghargaan, keikutsertaan masyarakat dalam kegiatan penyuluhan, dan peran serta masyarakat yang lain.



Car free day setiap hari Minggu pagi pukul : 05.30 – 07.30 WIB

Gambar 4.4 Kegiatan Car Free day



4.2.7. Jumlah Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Lingkungan Hidup

LSM (Lembaga Swadaya Masyarakat) merupakan salah satu proses dalam penguatan masyarakat sipil dengan pendekatan pemberdayaan masyarakat. Tujuan dasar pemberdayaan masyarakat disini adalah terciptanya keseimbangan antara keberdayaan masyarakat dan kelestarian lingkungan. Tanpa lingkungan yang dapat menjamin kehidupan dan penghidupan yang layak, keberdayaan masyarakat akan sangat sulit terwujud. Jumlah LSM Lingkungan yang terdaftar di Kantor Kesbanglinmas Kabupaten Jombang adalah 37 LSM. Nama-nama dan alamat LSM Lingkungan di Kabupaten Jombang selengkapnya dapat dilihat pada tabel dibawah ini.

Tabel 4.2. Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Lingkungan Hidup

No.	Nama LSM	Alamat
1.	Yays. Desa (YADESA)	Jln. Jagalan gg. I Rt. 01 Rw. 02 Kepatihan Jombang
2.	Yays. Citra Palapainsani (YCPI)	Jln. Penegak No. 9 Mojongapit Jombang Tlp. (0321) 875739
3.	Yays. Pengkajian dan Pengembangan Sumberdaya Masyarakat (YP2SM)	Jln. Jayabaya No. 44 Jombang
4.	Lembaga Independen Bangun Ekonomi Rakyat Tertinggal Indonesia (LIBERTI)	Jl. Dsn Cangakan Wonerejo Kel. Sidowarek Kec. Ngoro Kab Jombang Hp. 08155093604
5.	LPSM Yays "Dian Indonesia"	Jln. R Patah No. 88 Rt.01 Rw.05 Ds. Candimulyo Kec. Jombang
6.	Lembaga Kajian Pengembangan Masyarakat (ELJIMAS)	Perum Griya Indah P-13 Tlp. 7177117
7.	Generasi Muda Indonesia	Dsn. Kedung Betik Rt. 06 Rw. 02 Ds. Kedung Betik Kec. Kesamben
8.	ELKASEM	Jln. Jaya Abadi H/21 Jombang
9.	PEKAT	Tugu Sumberejo 14/04 Peterongan Tlp 280279-7280169
10.	Lembaga Riset dan Pengembangan Masyarakat (LERPAM)	Perum Jaya Abadi Blik. C/9 Tlp. 864677-7202279
11.	Lembaga Paramita	Perum Sambong Indah G/25 Tlp. 871365
12.	Yays. Merah Putih	Jln. KH Hasyim Asyari 171 Balongbesok Diwek



Laporan Kinerja Pengelolaan Lingkungan Hidup Daerah

Kabupaten Jombang Tahun 2016



No.	Nama LSM	Alamat
13	Yays. Binatama	Perum Candi Indah Blok E/17 Jombang
14	Forum Komunikasi Nusantara (FKN)	Jln. Wahid Hasyim 123 Tlp. 861697
15	Yapesimarindo	Perum Pulo Asri Sejahtera B-12 Tlp. 864721
16	Bina Usaha Mandiri (BUMI)	Pangkalkepuh No.34 Gudo Jombang Tlp. 866545
17	Peduli Bangsa	Jln. Raya Ngogri 10 Megaluh Tlp. 856153
18	Yay Rachmat	Paculgowang Cukir Diwek Tlp. 872054
19	Yay. Ravin	Perum Jombang Permai Jln Sawo Q-4 Tlp. 863312
20	Insed	Jln. Ir. Juanda 45 Tlp. 863931
21	Yay. Soerontanu	Jln. Patimura 25 Tlp. 865873-867010
22	Yay. Dua Ribu	Jl. Merdeka No. 107 Tlp. 8699996-867611
23	Yay. Laskeda	Jln. Gerilya 50 Kwaron Diwek Tlp. 864573
24	Akar Satu	Jln Pandega 26A Mojongapit Tlp. 875735 / 3397088
25	Lekas	Jln. Melati 70 Banjardowo Tlp. 7187979
26	Laras	Jln. Kapten Tendean 257 B Tlp. 7211744
27	Yays. Rakyat Mandiri	Jln. Penegak 36 Mojongapit Tlp. 875739
28	Ichdre	Airlangga 11
29	Mitra Usaha Tani Group	Dsn. Temon Rt. 03 Rw. 01 Ds. Temuwulan Perak Jombang
30	FKMPL Kabupaten Jombang	Jln. Yosudarso 199 Tunggorono Jombang
31	Yays. P3M	Jln. Gatot Subroto 141 Jelak Ombo Jombang Tlp. 0321 6148301
32	Gerakan Cinta Anak Bangsa	Jln. KH. Dahlan Gg. Masjid No. 09 Jombang Tlp. 0321 6206169
33	Green Palace Center	Jln. Dr. Wahidin II/4 Rt. 17 Rw.4 Sengon Jombang Tlp. 7186321
34	Yayasan Indonesia	Blimbing Rt.3 Rw.2 Desa Blimbing Kec. Kesamben Jombang
35	Lembaga "Nusantara Bangkit Berkarya"	Jln. Melati No. 70 Rt 04 Rw. 01 Banjardowo Jombang
36	Lembaga Swadaya Masyarakat Peduli Rakyat Tani Indonesia	Jln. Raya Caruban Rt. 04 Rw. 03 Desa Alang-alang Jogoroto
37	LSM Selo Liman Kabupaten Jombang	Jln. Sambong Permai Blok J No. 9 Jombang Tlp. 0321 3808060
33	Green Palace Center	Jln. Dr. Wahidin II/4 Rt. 17 Rw.4 Sengon Jombang Tlp. 7186321
34	Yayasan Indonesia	Blimbing Rt.3 Rw.2 Desa Blimbing Kec. Kesamben Jombang



No.	Nama LSM	Alamat
35	Lembaga "Nusantara Bangkit Berkarya"	Jln. Melati No. 70 Rt 04 Rw. 01 Banjardowo Jombang
36	Lembaga Swadaya Masyarakat Peduli Rakyat Tani Indonesia	Jln. Raya Caruban Rt. 04 Rw. 03 Desa Alang-alang Jogoroto
37	LSM Selo Liman Kabupaten Jombang	Jln. Sambong Permai Blok J No. 9 Jombang Tlp. 0321 3808060

Sumber: Kantor Kesbanglinmas Kabupaten Jombang, 2016

4.2.8. Penghargaan

Salah satu upaya pemerintah untuk meningkatkan peran serta masyarakat dalam pengelolaan lingkungan adalah dengan memberikan penghargaan lingkungan. Berikut ini peran serta masyarakat dan Pemerintah Daerah di Kabupaten Jombang yang meraih beberapa penghargaan tersaji pada tabel dibawah ini.

Tabel 4.3. Penghargaan Lingkungan Hidup

No.	Nama Orang/ Kelompok/ Organisasi	Nama Penghargaan	Pemberi Penghargaan	Tahun Penghargaan
1	Pariman	Sertifikat Kalpataru Kategori Lingkungan	Kementrian Lingkungan Hidup	1996
2	Wagisan	Pelestari Fungsi Lingkungan Hidup	Gubernur Jawa Timur	2011
3	Wagisan	Sertifikat Kalpataru Kategori Penyelamat Lingkungan	Kementrian Lingkungan Hidup	2012
4	Gupuh Heri Susanto	Pelestari Fungsi Lingkungan Hidup	Gubernur Jawa Timur	2012
5	Soetarno	Pembina Fungsi Lingkungan	Kepala Badan Pengendalian Dampak Lingkungan Hidup Jawa Timur	2013
6	Desa Mojokrapak, Tembelang	Desa Berseri Tingkat Madya	Gubernur Jawa Timur	2014
7	Desa Kapatihan, Jombang	Desa Berseri Tingkat Madya	Gubernur Jawa Timur	2014
8	Desa Jarak, Wonosalam	Desa Berseri Tingkat Madya	Gubernur Jawa Timur	2014
9	SDN Blimbing Gudo	Adiwiyata Propinsi	Gubernur Jawa	2014



Laporan Kinerja Pengelolaan Lingkungan Hidup Daerah

Kabupaten Jombang Tahun 2016



No.	Nama Orang/ Kelompok/ Organisasi	Nama Penghargaan	Pemberi Penghargaan	Tahun Penghargaan
			Timur	
10	MIN Pucangsimo	Adiwiyata Nasional	Menteri LH dan Menteri Pendidikan Nasional	2014
11	SMP 2 Jombang	Adiwiyata Nasional	Menteri LH dan Menteri Pendidikan Nasional	2014
12	MAN Tambakberas	Adiwiyata Nasional	Menteri LH dan Menteri Pendidikan Nasional	2014
13	Desa Mojokrapak, Tembelang	Desa Berseri Tingkat Mandiri	Gubernur Jawa Timur	2016
14	Desa Jombok, Ngoro	Desa Berseri Tingkat Pratama	Gubernur Jawa Timur	2016
15	Desa Sengon, Jombang	Desa Berseri Tingkat Pratama	Gubernur Jawa Timur	2016
16	SMA Mojoagung	Adiwiyata Propinsi	Gubernur Jawa Timur	2016
17	SMA Bandarkedungmulyo	Adiwiyata Propinsi	Gubernur Jawa Timur	2016
18	SMA 2 Jombang	Adiwiyata Propinsi	Gubernur Jawa Timur	2016
19	SMP 1 Peterongan	Adiwiyata Propinsi	Gubernur Jawa Timur	2016
20	SMP 1 Mojowarno	Adiwiyata Propinsi	Gubernur Jawa Timur	2016
21	SMP Wahid Hasyim Tebuireng	Adiwiyata Propinsi	Gubernur Jawa Timur	2016
22	MAN Denanyar	Adiwiyata Propinsi	Gubernur Jawa Timur	2016
23	SMP 5 Jombang	Adiwiyata Nasional	Menteri LH dan Menteri Pendidikan Nasional	2016
24	SMA 1 Jombang	Adiwiyata Nasional	Menteri LH dan Menteri Pendidikan Nasional	2016
25	SMP 3 Peterongan	Adiwiyata Mandiri	Presiden RI	2016
26	SMP 1 Jombang	Adiwiyata Mandiri	Presiden RI	2016
27	SMA 3 Jombang	Adiwiyata Mandiri	Presiden RI	2016



No.	Nama Orang/ Kelompok/ Organisasi	Nama Penghargaan	Pemberi Penghargaan	Tahun Penghargaan
28	Desa Jombok, Ngoro	Desa Berseri Tingkat Madya	Gubernur Jawa Timur	2016
29	MIN Puncangsimo	Adiwiyata Mandiri	Presiden RI	2016
30	SMP AWH Tebuireng	Adiwiyata Nasional	Menteri LH & Menteri Pendidikan RI	2016
31	SMAN Mojoagung	Adiwiyata Nasional	Menteri LH & Menteri Pendidikan RI	2016
32	MAN Denanyar	Adiwiyata Nasional	Menteri LH & Menteri Pendidikan RI	2016
33	MI Miftahul Huda Trowulan	Adiwiyata Provinsi	Gubernur Jawa Timur	2016
34	SMPN Ngusikan	Adiwiyata Provinsi	Gubernur Jawa Timur	2016
35	SMPN 3 Jombang	Adiwiyata Provinsi	Gubernur Jawa Timur	2016

Sumber: BLH Kabupaten Jombang

4.2.9. Kegiatan Sosialisasi Lingkungan Hidup

Kegiatan sosialisasi lingkungan hidup merupakan sarana transfer pengetahuan mengenai upaya pengelolaan lingkungan hidup. Kegiatan sosialisasi tersebut diharapkan dapat menjangkau semua kalangan dari berbagai status sosial masyarakat, sehingga upaya pengelolaan lingkungan dapat dilaksanakan secara maksimal.

Pada tahun 2016 ada 6 kegiatan sosialisasi yang dilakukan Pemda Kabupaten Jombang. Beberapa kegiatan yang diselenggarakan oleh Pemda Kabupaten Jombang pada tahun 2016 ini diantaranya:

1. Penyadaran publik pengelolaan sistem irigasi partisipatif oleh BAPPEDA Kabupaten Jombang dengan kelompok sasaran petani
2. Sekolah lapang system of rice intensification/SRI oleh Dinas Pertanian Kabupaten Jombang dengan kelompok sasaran sekolah
3. Sosialisasi hemat energi dan air oleh Bagian SDA dengan sasaran masyarakat
4. Sosialisasi regulasi pemerintah bidang energi dan sumber daya mineral oleh Bagian SDA dengan sasaran SKPD terkait



5. Sosialisasi larangan membuang sampah di Desa Jombatan, Desa Sambongdukuh, Desa Mojokrapak, Desa Jabon, Desa Kepuhkembeng oleh Dinas PU Pengairan Kabupaten Jombang dengan sasaran Masyarakat
6. Pembinaan GHIPPA bidang sumber daya air di Desa Tinggar, Desa Kalangsemanding, Desa Wringinpitu, Desa Rejoslamet, dan Desa Penggaron oleh Dinas PU Pengairan Kabupaten Jombang dengan kelompok sasaran masyarakat.

4.2.10. Kelembagaan

Menurut Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, kewenangan yang luas dimiliki kepada Menteri Lingkungan Hidup untuk melaksanakan seluruh kewenangan pemerintahan di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup serta melakukan koordinasi dengan instansi lain. Melalui Undang-Undang ini, pemerintah pusat memberikan kewenangan yang sangat luas kepada pemerintah daerah dalam melakukan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup di daerah masing-masing.

4.2.11. Produk Hukum Bidang Pengelolaan Lingkungan Hidup

Berdasar pada Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009, Pemerintah Pusat memberikan kewenangan yang luas kepada Pemerintah Daerah untuk melakukan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup di daerah masing-masing. Dalam melakukan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup di Kabupaten Jombang, Pemerintah Daerah Kabupaten Jombang telah mempunyai produk hukum yang digunakan sebagai payung pelaksanaan kegiatan lingkungan di wilayah Kabupaten Jombang. Beberapa produk hukum bidang pengelolaan lingkungan yang dihasilkan Kabupaten Jombang dapat dilihat pada tabel dibawah ini.



Tabel 4.4. Produk Hukum Dalam Tata Ruang Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

No.	Jenis Produk Hukum	No	Tahun	Tentang
1	Perda Kab. Jombang	1	2004	Ijin Penebangan
2	Perda Kab. Jombang	5	2011	Pengelolaan RTH
3	Perda Kab. Jombang	6	2011	Pengelolaan Sampah Kabupaten Jombang
6	Perda Kab. Jombang	3	2014	Pengelolaan limbah dan bahan berbahaya beracun
7	Perda Kab. Jombang	4	2014	Izin Pembuangan air limbah dan pemanfaatan air limbah
8	Perda Kab. Jombang	5	2014	Perlindungan dan pengelolaan mata air
9	Perda Kab. Jombang	6	2014	Izin Lingkungan
10	Perda Kab. Jombang	7	2014	Pengelolaan Air Tanah
11	Perda Kab. Jombang	9	2014	Perlindungan dan pelestarian tumbuhan dan satwa

Sumber : BLH Kabupaten Jombang, 2016

4.2.12. Anggaran Pengelolaan Lingkungan Hidup

Anggaran pengelolaan lingkungan hidup Kabupaten Jombang pada tahun 2016 sepenuhnya berasal dari Anggaran Pembangunan dan Belanja Daerah (APBD). Besar anggaran tersebut adalah sebesar Rp. 2.479.300.933.570. Dari keseluruhan anggaran tersebut sebanyak 1,79% dialokasikan untuk pengelolaan lingkungan hidup pada beberapa SKPD. Uraian lengkap peruntukan anggaran dan jumlah rincian anggaran dapat dilihat pada **Tabel berikut**



Laporan Kinerja Pengelolaan Lingkungan Hidup Daerah
Kabupaten Jombang Tahun 2016



ANGGARAN UNTUK PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP

No	Jenis	Jumlah Anggaran Tahun 2016	Jenis	Jumlah Anggaran Tahun 2017	Prosentase (tahun terakhir)
1	APBD total	2.479.300.933.570	APBD total	2.491.470.519.792	
2	Lembaga Pengelola Lingkungan Hidup - Badan Lingkungan Hidup	3.281.220.000	Lembaga Pengelola Lingkungan Hidup - Dinas Lingkungan Hidup	17.518.034.817	0,70
3	APBD sektor lain terkait dengan pengelolaan lingkungan hidup	728.328.400	APBD sektor lain terkait dengan pengelolaan lingkungan hidup	14.348.890.730	0,58
	Dinas Pasar		Dinas Pasar		
	- Penataan Tempat Berusaha Bagi Pedagang Pasar	159.564.400,00	- Pembinaan Kebersihan Ketertiban dan Keamanan Pasar	78.827.500	
	- Pembersihan Saluran dan Selasar dalam Pasar Daerah	46.545.000,00	- Pengadaan alat kebersihan pasar	71.505.000	
	- Pembinaan Kebersihan, Ketertiban dan Keamanan Pasar	95.937.500,00	Dinas Perhubungan		
	Dinas Perhubungan		- Rehabilitasi/ Pemeliharaan Terminal/ Sub Terminal	11.000.000	
	Rehabilitasi/ Pemeliharaan Terminal/ Sub Terminal	19.000.000,00	Dinas Kesehatan dan RSUD		
	Dinas PU Pengairan		Jasa pemusnahan sampah medis	375.488.500	
	- Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Pengelolaan Sumber Daya Air	407.281.500,00	Dinas Perumahan & Pemukiman		
			Bangunan pembuangan air kotor	156.000.000	
			Pembangunan SPAL setempat	804.000.000	
			Dinas PU dan Tata Ruang		
			- Promosi, sosialisasi, dan pembinaan bidang SDA	65.887.500	
			- Pemeliharaan saluran/sungai dalam kota	243.000.000	
			- Pemeliharaan saluran pembuang	12.543.182.230	
4	APBD Pengelola Kebersihan - Bidang Kebersihan dan Pertamanan pada Dinas PU Cipta Karya, Tata Ruang, Kebersihan dan Pertamanan	14.391.722.000	APBD Pengelola Kebersihan - Bidang Pengelolaan Sampah dan Pertamanan pada Dinas Lingkungan Hidup	12.800.420.000	0,51
5	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	309.510.453.310	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	344.415.880.840	



4.2.13. Jumlah Personil Lembaga Pengelola Lingkungan Hidup menurut Tingkat Pendidikan

Pengelolaan lingkungan hidup yang ada di Kabupaten Jombang selain ditunjang oleh adanya anggaran pengelolaan lingkungan hidup baik yang bersumber dari APBD tetapi juga di dukung oleh adanya sumber daya manusia di bidang lingkungan hidup. Data mengenai jumlah personil lembaga pengelola lingkungan hidup di Kabupaten Jombang menurut tingkat pendidikannya terdiri dari tingkat pendidikan S2, S1, dan SLTA. Uraian jumlah masing-masing personil yaitu sebagai berikut.

Tabel 4.3. Jumlah Personil Lembaga Pengelola Lingkungan Hidup menurut Tingkat Pendidikan di Kabupaten Jombang

No.	Tingkat Pendidikan	Jumlah Laki-Laki	Jumlah Perempuan
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Master (S2)	5	4
2.	Sarjana (S1)	4	8
3.	SLTA	1	3

Sumber : Data Kepegawaian dan Bapeda Kabupaten Jombang, 2016

Struktur organisasi Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Jombang berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 8 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Jombang, terdiri dari :

1. Kepala Badan;
2. Sekretariat, membawahi :
 - a. Sub Bagian Umum.
 - b. Sub Bagian Keuangan.
 - c. Sub Bagian Penyusunan program dan Pelaporan.
3. Bidang Tata Lingkungan dan Pengendalian Dampak, membawahi :
 - a. Sub Bidang Tata Lingkungan dan Pengkajian Dampak Lingkungan.
 - b. Sub bidang Pengendalian Dampak Lingkungan.



4. Bidang Konservasi dan Pengelolaan Sumber Daya Alam membawahi :
 - a. Sub Bidang Konservasi lingkungan.
 - b. Sub Bidang Pengelolaan Sumber Daya Alam.
 - c. Kelompok Jabatan Fungsional.
 - d. UPT.

Saat ini Badan Lingkungan Hidup masih terus berupaya meningkatkan kualitas sumber daya manusia dengan mengikutsertakan staf-stafnya mengikuti pelatihan-pelatihan atau kursus-kursus mengenai masalah lingkungan hidup. Tabel dibawah ini menunjukkan jumlah staf fungsional bidang lingkungan dan staf yang telah mengikuti Diklat.

Tabel 4.5 Jumlah Staf Fungsional Bidang Lingkungan Dan Staf Yang Telah Mengikuti Diklat

No.	Nama Instansi	Nama Jabatan Fungsional	Jumlah Staf Fungsional Laki-Laki	Jumlah Staf Fungsional Perempuan	Jumlah Staf Yang Sudah Diklat Laki-Laki	Jumlah Staf Yang Sudah Diklat Perempuan
1.	BLH	PPNS	0	0	1	0
2.	BLH	PPLHD	0	0	1	2
3.	Perhutani KPH Jombang	Kepala Urusan Lingkungan	2	0	0	0

Sumber: Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Jombang, 2016



Bab 5

PENUTUP

Pelaporan status lingkungan hidup sebagai sarana penyediaan data dan informasi lingkungan dapat menjadi alat yang berguna dalam menilai dan menentukan prioritas masalah, dan membuat rekomendasi bagi penyusunan kebijakan dan perencanaan untuk membantu pemerintah daerah dalam pengelolaan lingkungan hidup dan menerapkan mandat pembangunan berkelanjutan.

Berdasarkan uraian BAB II sampai dengan BAB IV, dapat disimpulkan terkait permasalahan lingkungan hidup yaitu sebagai berikut:

A. Kesimpulan

Pemerintah telah menargetkan peningkatan Kinerja Pengelolaan Lingkungan Hidup Daerah yang mencakup seluruh sektor pembangunan, yang tercermin pada meningkatnya kualitas air, udara serta tutupan hutan untuk mewujudkan pembangunan yang ramah lingkungan dan kehidupan masyarakat dalam lingkungan yang bersih dan sehat. Untuk mencapai target ini, tentu diperlukan aksi nyata dari semua pemangku kepentingan dalam upaya perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.

Peningkatan kualitas lingkungan hidup ini tentu harus didukung dengan penguatan kapasitas pengelolaan lingkungan hidup yang antara lain mencakup



kelembagaan, sumber daya manusia, penegakan hukum lingkungan, dan kesadaran masyarakat.

Laporan Kinerja Pengelolaan Lingkungan Hidup Daerah sebagai bagian dari pertanggungjawaban pemerintah dalam pencapaian program-program terkait target perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup kepada publik.

Dengan berpedoman pada Peraturan Menteri Negara lingkungan Hidup Nomor 19 dan 20 Tahun 2008 tentang Standar Pelayanan Minimal bidang lingkungan hidup daerah provinsi dan daerah kabupaten/kota serta petunjuk teknisnya, diharapkan empat jenis pelayanan dan indikator yang telah ditetapkan dapat dilaksanakan dengan baik dan sesuai dengan batas waktu pencapaiannya. Untuk penerapan dan pencapaian SPM bidang lingkungan hidup tahun 2016 dimana ada empat jenis pelayanan yang sudah dilaksanakan yaitu pelayanan pencegahan pencemaran air, pencegahan pencemaran udara sumber tidak bergerak, informasi status kerusakan lahan dan/atau tanah untuk produksi biomassa dan tindak lanjut pengaduan masyarakat akibat adanya dugaan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup sedangkan jenis pelayanan yang belum dilaksanakan secara maksimal yaitu penyediaan informasi status kerusakan lahan dan/atau tanah untuk produksi biomassa dimana pada tahun 2016 sudah dianggarkan pada APBD Kabupaten Jombang melalui anggaran Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Jombang tahun anggaran 2016 dan kegiatan analisa sampel tanahnya juga sudah dilaksanakan tetapi penetapan status kerusakan lahannya masih dalam proses.

Melalui standar pelayanan minimal tersebut, diharapkan dapat meningkatkan kualitas lingkungan hidup baik air, udara dan lahan serta meningkatnya kualitas penanganan pengaduan masyarakat yang berkaitan dengan permasalahan lingkungan hidup. Melalui upaya pengelolaan lingkungan hidup yang berkelanjutan dimana kondisi lingkungan hidup di Kabupaten Jombang dapat ditingkatkan daya dukung dan daya tampung lingkungannya, sehingga tujuan pelaksanaan pembangunan yang berkelanjutan dalam rangka peningkatan kesejahteraan masyarakat dapat terwujud.



B. Saran

Agar keempat jenis pelayanan dan indikator yang telah ditetapkan dapat dilaksanakan dengan baik dan sesuai dengan batas waktu pencapaiannya maka Standar Pelayanan Minimal (SPM) bidang lingkungan hidup ini juga menuntut adanya perbaikan terus menerus dan berkesinambungan mutu pelayanan yang diberikan, sesuai dengan target-target kinerja yang telah ditetapkan. Dan untuk jenis pelayanan yang belum maksimal dilaksanakan pada tahun 2016 yaitu pelayanan penyediaan informasi status kerusakan lahan dan/atau tanah untuk produksi biomasa harus segera diperbaiki pada tahun-tahun berikutnya mengingat anggaran/ pembiayaannya sudah dianggarkan mulai tahun anggaran 2016 pada anggaran Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Jombang, serta target pencapaiannya juga harus disesuaikan dengan target pencapaian secara nasional.

Untuk mengetahui tingkat pencapaian SPM bidang lingkunganhidup di Kabupaten Sukamara, pemerintah diharapkan dapat melakukan analisis perencanaan dan pembiayaan SPM yang bertujuan mengkaji kesenjangan dalam pencapaian SPM, menganalisa kapasitas daerah, mengidentifikasi permasalahan dalam pencapaian SPM, menganalisa perhitungan biaya yang dibutuhkan untuk mencapai SPM, merencanakan langkah-langkah pencapaian SPM dan menyediakan umpan balik bagi pemerintah.

Akhirnya keempat jenis standar pelayanan minimal (SPM) bidang lingkungan hidup daerah ini maupun target kinerja pelayanan yang ingin dicapai di dalamnya, kembali kepada kesungguhan pemerintah untuk dapat mengalokasikan sumber daya, pikiran dan komitmennya bagi terselenggaranya dan meningkatnya mutu pelayanan yang ingin dicapai.